



LAPORAN AKHIR
ANALISIS
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2012-2016

KERJA SAMA
BADAN PUSAT STATISTIK
BALAI STATISTIK DAERAH BAPPEDA DIY
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah selama suatu periode waktu tertentu. PDRB dinilai dalam satuan moneter dan dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016” ini merupakan publikasi yang membahas kinerja ekonomi melalui data PDRB dan berbagai aspek data terkait pada kondisi 2012 sampai dengan 2016. Pembahasan analisis selain secara sektoral juga melakukan perbandingan antarprovinsi dan antarwilayah kabupaten/kota.

Analisis dalam dan lintas sektoral yang disajikan dalam publikasi ini, diantaranya: struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan hubungan laju pertumbuhan ekonomi dengan inflasi, pengurangan pengangguran, pengurangan kemiskinan, pembangunan manusia, dan beberapa indikator sosial lain. Analisis lebih jauh juga melakukan identifikasi potensi ekonomi kabupaten/kota dan serta mendeteksi tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota. Pada akhir bab disarikan kesimpulan dari pembahasan analisis dan mencoba merumuskan rekomendasi kebijakan untuk tindak lanjut pelaksanaan pembangunan yang akan datang.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan pihak terkait sebagai bahan dalam evaluasi dan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, April 2017

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,


Johanes De Brito Priyono

KATA SAMBUTAN

Perencanaan pembangunan yang terdokumentasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan data dan indikator statistik sebagai evaluasi kinerja dari implementasi pembangunan maupun digunakan sebagai ukuran yang menjadi dasar peletakan sasaran target pencapaian untuk rencana pembangunan yang akan datang.

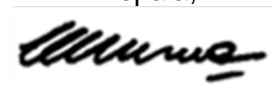
Kami menyambut baik diterbitkannya Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016”, sebagai hasil kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Balai Statistik Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis ini ditunggu-tunggu oleh lembaga eksekutif dan legislatif daerah karena merupakan salah satu bahan untuk menyusun kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun-tahun mendatang. Hasil analisis dalam publikasi ini juga bermanfaat untuk mengevaluasi realisasi dari target indikator pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Melalui analisis data PDRB dan indikator turunannya, potensi perekonomian daerah terukur dan teridentifikasi. Di samping itu analisis yang mengaitkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketenagakerjaan, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antardaerah serta capaian pembangunan manusia menjadikan publikasi layak menjadi acuan baik oleh pemerintah daerah maupun peneliti untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dan lebih mendalam. Konteks pembangunan DIY yang unik, oleh karena satu sisi indikator-indikator mencerminkan prestasi yang membanggakan namun di dimensi lain mencerminkan kondisi yang masih memerlukan kerja keras untuk memperbaiki format perencanaan implementasi pembangunan di wilayah D.I. Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya atas segala usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan publikasi ini. Mudah-mudahan kerja sama antara BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan selalu menghasilkan dokumen evaluasi dan perencanaan pembangunan yang bermanfaat mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, April 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Tavip Agus Rayanto

ABSTRAKSI

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi daerah mempunyai kualitas pertumbuhan yang baik bila pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan berkurangnya angka pengangguran, berkurangnya tingkat kemiskinan, dan berkurangnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk serta berkurangnya ketimpangan antarwilayah.

Aktivitas ekonomi D.I. Yogyakarta terus berkembang, tidak terkecuali dalam periode lima tahun terakhir yaitu 2012 hingga 2016. Pada tahun 2016 nilai PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta atas dasar harga berlaku mencapai Rp110,10 triliun, sedangkan nilai atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 87,69 triliun. Dibanding tahun 2015, perekonomian D.I. Yogyakarta tahun 2016 atas dasar harga konstan 2010 tumbuh sebesar 5,05 persen. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tumbuh rata-rata sebesar 5,16 persen per tahun. Tiga kategori usaha dengan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir adalah Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, serta Jasa Kesehatan Manusia dan Kegiatan Sosial masing-masing sebesar 8,23 persen, 7,25 persen, dan 6,57 persen per tahun. Sementara itu, tiga kategori dengan kontribusi terbesar dalam PDRB D.I. Yogyakarta 2016 atas dasar harga berlaku adalah Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masing-masing sebesar 13,21 persen, 10,41 persen, dan 10,22 persen.

Nilai PDRB per kapita riil (atas dasar harga konstan) tahun 2016 sebesar Rp23,57 juta atau tumbuh sebesar 3,87 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp22,69 juta. Namun PDRB D.I. Yogyakarta belum terbagi tidak merata secara merata ke penduduk. Pada tahun 2016 (September 2016) masih terdapat penduduk miskin sejumlah 488,83 ribu orang, atau 13,10 persen dari jumlah penduduk D.I. Yogyakarta. Demikian pula distribusi pendapatan antarpenduduk DIY masih terjadi ketimpangan meskipun dalam skala moderat, angka Rasio Gini sebesar 0,425. Indeks ketimpangan antarwilayah yang diukur dengan Indeks Williamson menghasilkan tingkat ketimpangan yang sedang (moderat) dan kecenderungannya membaik meskipun tingkat penurunannya relatif kecil.

Ketimpangan pertumbuhan wilayah yang disebabkan potensi sektor-sektor dideteksi dengan analisis *shift share*. Hasil pengukuran analisis *shift share* untuk kurun waktu 2012-2016, Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul masuk dalam kategori daerah yang sedang berkembang (kuadran II). Kota Yogyakarta hanya terkategori sebagai daerah yang cenderung berpotensi (kuadran III), sementara Kulon Progo masih menjadi daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV).

Kata kunci: Pengangguran, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, ketimpangan penduduk, ketimpangan antarwilayah, kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Wiliamson, dan Analisis Shift Share.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Dasar Pelaksanaan	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sasaran	4
E. Manfaat.....	5
F. Lokasi Kegiatan	5
G. Sumber Pendanaan	5
H. Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung	5
I. Rencana Kerja.....	5
J. Lingkup Pekerjaan	5
II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pembangunan	8
1. Konsepsi Pembangunan	8
2. Pembangunan Kewilayahan	8
3. Pembangunan Manusia	10
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	11
1. Definisi PDRB	11
2. Pendekatan Penghitungan.....	11
3. Metode Penghitungan	12
4. Turunan PDRB	14
5. PDRB menurut Lapangan Usaha	14
6. PDRB menurut Pengeluaran	15
7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008	17

8. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi	18
C. Potensi dan Kualitas Indikator Pertumbuhan PDRB	18
1. Pertumbuhan Ekonomi	18
2. Kesenjangan (Disparitas) Antarwilayah	19
3. Kesenjangan (Disparitas) Pendapatan dan Kemiskinan	21
4. Ketimpangan Antarwilayah dengan Indeks Williamson	22
D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	24
1. Kependudukan	24
2. Ketenagakerjaan	25
III METODOLOGI.....	27
A. Sumber Data	28
B. Kerangka Pikir Analisis	28
C. Indikator Penyajian PDRB	29
1. Distribusi Persentase	29
2. PDRB per Kapita	29
3. Indeks Perkembangan	29
4. Indeks Berantai (Angka Laju Pertumbuhan)	29
5. Indeks Harga Implisit	30
6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi Harga Produsen) ...	30
7. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi/Deflasi	30
D. Analisis Potensi dan Kualitas Indikator Pertumbuhan PDRB	31
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	31
2. Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan	34
3. Indikator Kemiskinan	38
4. Indikator Ketimpangan (Disparitas)	41
IV. PDRB Menurut Lapangan Usaha	49
A. Struktur Perekonomian PDRB	50
B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan	53
1. Pertumbuhan menurut Kategori	54
2. Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota	56
C. PDRB Per Kapita	57
D. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB	58

E. Indeks Perkembangan Kategori	60
F. Perbandingan Nilai PDRB Antarkabupaten/kota	61
G. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi	66
V. PDRB Menurut Pengeluaran	69
A. Struktur PDRB Pengeluaran	72
1. Konsumsi Rumah Tangga	72
2. Konsumsi Pemerintah	74
3. Investasi	74
4. Ekspor dan Impor	76
B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran	77
VI. Potensi dan Kualitas Indikator Pertumbuhan PDRB	79
A. Perkembangan Indikator Utama Ekonomi D.I. Yogyakarta	80
1. Pertumbuhan Ekonomi	80
2. Pengurangan Angka Pengangguran	83
3. Pengurangan Kemiskinan	84
B. Posisi dan Kualitas Pertumbuhan Kabupaten/Kota	85
1. Sebaran Pertumbuhan	85
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan	87
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM	88
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran	89
5. Potensi Sektoral Kabupaten/Kota	90
C. Penduduk dan Ketenagakerjaan	93
1. Angka Beban Tanggungan (<i>Dependency Ratio/DR</i>)	93
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	94
3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	95
4. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)	97
5. Produktivitas Tenaga Kerja	99
D. Kemiskinan dan Ketimpangan	102
1. Kemiskinan	103
2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan	105
E. Disparitas antar Kabupaten/Kota	107
1. Indeks Ketimpangan Regional	107

2. Disparitas Sektoral (<i>Shift Share Analysis</i>)	108
VII. Kesimpulan dan Rekomendasi	115
A. Kesimpulan	116
B. Rekomendasi	120
Daftar Pustaka	123
Lampiran	125

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Contoh Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA 1968 dan SNA 2008	32
Tabel 3.2. Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 dan 2010	34
Tabel 3.3. Perbandingan Klasifikasi PDB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	35
Tabel 4.1. Perbandingan angka PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kategori Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	57
Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	58
Tabel 4.3. Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2015	60
Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori di DI Yogyakarta 2011–2015, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2011-2015, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2015 (persen).....	63
Tabel 4.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DI Y 2011–2015, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2011-2015 dan Andil Pertumbuhan 2015 (persen)	66
Tabel 4.6. Perkembangan PDRB Per Kapita D.I. Yogyakarta, 2011 – 2015	67
Tabel 4.7. Indeks Perkembangan PDRB D.I.Yogyakarta menurut Kategori, 2011-2015 (2010=100)	70
Tabel 4.8. Nilai PDRB Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011 – 2015 (juta rupiah)	71
Tabel 4.9. Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2015**) (juta rupiah)	73
Tabel 4.10. Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2011, 2013, 2015 (persen)	74
Tabel 4.11. Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011 - 2015 (rupiah).....	75
Tabel 4.12. Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2015.....	76
Tabel 5.1. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan di DI	

	Yogyakarta, 2011–2015 (juta rupiah)	82
Tabel 5.2.	Struktur PDRB menurut Penggunaan di DIY, 2011 – 2015 (persen).....	83
Tabel 5.3.	Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2011–2015.....	85
Tabel 5.4.	Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan di DIY, 2011–2015 (persen) .	87
Tabel 6.1.	TPT menurut Pendidikan, Daerah, dan Jenis Kelamin, 2015	100
Tabel 6.2.	Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY, 2011-2015 (persen) ,	101
Tabel 6.3.	Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2011–2015	102
Tabel 6.4.	Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2011 – 2015	110
Tabel 6.5.	Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2011–2015	112
Tabel 6.6.	Proportional Shift (PS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2011–2015 ...	114
Tabel 6.7.	Different Shift (DS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2011–2015	115
Tabel 6.8.	Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2011-2015	116
Tabel 6.9.	Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2011-2015	117

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Pikir Analisis	28
Gambar 3.2. Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita	37
Gambar 3.3. Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja	40
Gambar 3.4. Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan	46
Gambar 3.5. Kurva Lorenz	49
Gambar 4.1. Perbandingan Pertumbuhan PDRB DI Yogyakarta Tahun Dasar 2000 dan 2010	58
Gambar 4.2. Produk Domestik Regional Bruto D.I Yogyakarta, 2011-2015 (triliun rupiah)	59
Gambar 4.3. Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor, 2013- 2015 (persen)	61
Gambar 4.4. Pertumbuhan dan Pangsa Distribusi Beberapa Lapangan Usaha 2015	64
Gambar 4.5. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2013-2015	64
Gambar 4.6. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB D.I.Yogyakarta, 2011-2015 (persen)	68
Gambar 4.7. Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011 - 2015 (triliun rupiah)	72
Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY, 2011-2015	82
Gambar 6.1. Pertumbuhan Beberapa Kategori, 2011-2015 (persen)	92
Gambar 6.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2011-2015 (persen)	93
Gambar 6.3. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2011	94
Gambar 6.4. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2015	94
Gambar 6.5. Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY, 2010-2015	95
Gambar 6.6. Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah, 2011-2015	97
Gambar 6.7. TKK dan TPT Penduduk DIY, 2011-2015 (persen)	98
Gambar 6.8. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2011	103

Gambar 6.9.	Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2015	103
Gambar 6.10.	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2011 – 2015	106
Gambar 6.11.	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di DIY, 2011 – 2015	108
Gambar 6.12.	Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas September 2015	109
Gambar 6.13.	Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY, 2011–2015 (persen)	109
Gambar 6.14.	Indeks Williamson DIY, 2011-2015	111
Gambar 6.15.	Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Gini Rasio, 2011-2015	118
Gambar 6.16.	Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Target Pertumbuhan dalam RPJMD DIY 2012-2017, Tahun 2011-2015 (persen)	119

BAB 1

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Manfaat
- F. Lokasi Kegiatan
- G. Sumber Pendanaan
- H. Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung
- I. Rencana Kerja
- J. Lingkup Pekerjaan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelang akhir periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017, di tahun 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencatatkan hasil pembangunan yang membanggakan di samping juga mampu menorehkan landasan tonggak pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya keras pemerintah daerah yang didukung segenap lapisan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan seperti yang tertung dalam Visi Pembangunan DIY 2012-2017 yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”. Salah satu landasan pembangunan ekonomi yang mempunyai ekspektasi cukup besar karena akan memberikan multiplier effect peningkatan skala aktivitas berbagai bidang ekonomi yaitu dimulainya pembangunan bandara udara baru di Kulon Progo New Yogyakarta International Airport.

Indikator makro ekonomi D.I. Yogyakarta tahun 2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta telah berada pada garis tren menguat setelah mengalami perlambatan di dua tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa beberapa kategori lapangan usaha ekonomi perlu dijaga kapabilitas peningkatannya. Sementara kategori lapangan usaha lain masih membutuhkan perhatian untuk menemukan tuas pendongkrak pertumbuhan. Indikator makro ekonomi D.I. Yogyakarta lainnya, yaitu inflasi, nilai tukar rupiah, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan serta iklim investasi mengindikasikan kondisi yang semakin kondusif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur agregasi produktivitas ekonomi atau nilai tambah ekonomi seluruh kategori lapangan usaha ekonomi suatu wilayah. Nilai absolut PDRB D.I. Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu meningkat, baik menurut harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Kondisi ekonomi D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 menunjukkan bahwa kelompok sektor tersier masih merupakan kegiatan ekonomi yang dominan karena memberikan kontribusi dua pertiga dari total PDRB D.I. Yogyakarta.

Pada periode 2011-2015 pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan kategori jasa pendidikan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, dan kategori informasi dan komunikasi. Selama periode 2011-2015 rata-rata pertumbuhan ekonomi masih mencapai 5,24 persen. Di sisi lain, dalam kurun waktu tersebut kategori yang mempunyai rata-rata pertumbuhan tertinggi, antara lain: kategori jasa keuangan, kategori jasa kesehatan, dan kategori informasi dan komunikasi. Di samping itu masih ada 7 kategori lainnya yang rata-rata pertumbuhannya di atas rata-rata pertumbuhan total PDRB. Berdasarkan indeks perkembangan sektoral dapat dideteksi

bahwa beberapa kategori mempunyai potensi berkembang lebih cepat dibanding kategori lain, yaitu kategori jasa keuangan, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa kesehatan, kategori jasa perusahaan, dan kategori jasa pendidikan.

Dilihat pertumbuhan kewilayahannya, lima kabupaten/kota yang ada di DIY selama periode 2011-2015 rata-rata pertumbuhannya pada kisaran 4,61 persen sampai dengan 5,60 persen, dengan pertumbuhan terendah ada di Kulon Progo dan yang tertinggi di Sleman. Di sisi lain, pembangunan ekonomi D.I. Yogyakarta masih menyisakan permasalahan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Salah satu indikator kesenjangan pendapatan adalah dilihat dari gap PDRB per kapita riil kelima wilayah kabupaten-kota. Perbedaan PDRB per kapita riil Kota Yogyakarta dan empat kabupaten lainnya terlihat mencolok. Perbandingan PDRB per kapita tertinggi yaitu Kota Yogyakarta dengan Kulon Progo yang terendah mencapai lebih dari 3,5 kali lipatnya. Dibanding dengan Sleman yang PDRB per kapitanya paling tinggi di antara tiga kabupaten lain PDRB per kapita riil Kota Yogyakarta masih sebesar 2,25 kali lipat. Demikian pula dari indikator kesenjangan ekonomi lain yang bisa dilihat dari Indeks Williamson dan Rasio Gini yang nampaknya D.I. Yogyakarta masih pada posisi yang timpang bila disandingkan dengan provinsi-provinsi lain.

Capaian kondisi pembangunan D.I. Yogyakarta yang di satu sisi mengindikasikan keberhasilan namun di sisi lain masih sulit untuk di taskkan menarik untuk selalu diteliti, ditelusuri, dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Hal ini yang mendasari bahwa analisis PDRB penting untuk dilakukan untuk dapat memantau perkembangan ekonomi secara sektoral, maupun dari sisi pola pengeluaran, serta melihat perkembangan beberapa indikator sosial, sehingga diharapkan dari analisis ini dapat menjadi salah satu alat analisis kebijakan pemerintah daerah untuk dapat merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan D.I. Yogyakarta yang lebih maju dan tepat sasaran.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Kepala BPS Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Standar Belanja;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa di Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA DIY Nomor: 14/DPA/2017.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY 2012-2016 adalah memperoleh data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi di DIY.

2. Tujuan

Tujuan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Mengetahui struktur dan dinamika ekonomi DIY 2012-2016 berdasarkan tahun dasar 2010;
2. Menyediakan angka dan indeks turunan PDRB DIY dan Kabupaten/Kota 2012-2016;
3. Menyediakan hasil analisis sektoral PDRB DIY dan antarwilayah kabupaten/kota tahun 2012-2016 menurut kategori dan subkategori lapangan usaha;
4. Menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan validitas implementasi program pembangunan.

D. Sasaran

Data PDRB DIY Tahun 2012-2016 menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan dilengkapi data pendukung lain yang terkait, serta indikator ekonomi sosial lainnya.

E. Manfaat

Manfaat hasil Penyusunan Analisis PDRB DIY 2012–2016 adalah pilihan rekomendasi kebijakan hasil analisis dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran pembangunan daerah dan juga kabupaten/kota se-D.I. Yogyakarta ke depan.

F. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengumpulan data, penghitungan, dan analisis adalah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016 seluruhnya dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2017 pada Balai Statistik Daerah Bappeda D.I. Yogyakarta.

H. Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung

Dalam pelaksanaan Analisis PDRB DIY 2011-2015 ini menggunakan tenaga ahli dan pendukung yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah: 7 orang terdiri dari unsur pimpinan di Bappeda dan BSD DIY dan BPS Provinsi DIY;
2. Tim Pelaksana: 84 orang dari BPS Provinsi DIY dan BPS Kabupaten/Kota se-DIY yang berpendidikan S3, S2, S1, dan SLTA.
3. Konsultan Ahli: 1 orang dari Dosen/Fungsional Tertentu/Eselon II/III.

I. Rencana Kerja

Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan Analisis PDRB DIY 2012-2016, urutannya sebagai berikut:

1. Pemrosesan berkas-berkas Kontrak Kerja (Surat Perjanjian);
2. Penyusunan Metodologi Analisis;
3. Pengumpulan data sekunder;
4. Kompilasi dan pengolahan data;
5. Penghitungan Indikator;
6. Analisis dan penyajian;
7. Penyerahan Draft Publikasi.

J. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan Penyusunan Analisis PDRB DIY 2012-2016 Tahun Anggaran 2017, meliputi:

1. Menyediakan angka PDRB DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY 2012-2016 menurut lapangan usaha dan penggunaan;

2. Menganalisis laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut lapangan usaha dan penggunaan tahun 2012-2016;
3. Menganalisis gambaran dan dinamika struktur perekonomian daerah serta besarnya peranan masing-masing kategori dan subkategori (kelompok) lapangan usaha tahun 2012-2016;
4. Menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi kabupaten/kota di DIY tahun 2012-2016;
5. Menganalisis tingkat inflasi kategori lapangan usaha atas dasar harga produsen tahun 2012-2016;
6. Menganalisis pendapatan perkapita penduduk, disparitas pendapatan dan disparitas regional tahun 2012-2016;
7. Menganalisis tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk di DIY, kabupaten/kota, perkotaan dan pedesaan tahun 2012-2016 (termasuk pengangguran terdidik).
8. Menganalisis sektor ekonomi unggulan pada periode 2012-2016.
9. Menganalisis disparitas ekonomi antarprovinsi-provinsi di Jabalnusra.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pembangunan
- B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- C. Kualitas Pertumbuhan
- D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Konsepsi Pembangunan

Konsep pembangunan di tahun 1970-an yang cukup populer adalah yang didefinisikan oleh Portes (1970), yang mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Situasi lingkungan juga mempengaruhi konsepsi pembangunan yang muncul. Di era tahun 1990-an, Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Konsepsi mengenai pembangunan juga dikemukakan Alexander (1994), yaitu proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Berdasarkan beberapa konsepsi di atas, maka makna terpenting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

2. Pembangunan Kewilayahan

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu negara maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga mempunyai kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Pembahasan pembangunan ekonomi secara nasional dititikberatkan pada analisis ekonomi makro, sementara pembahasan pembangunan

ekonomi di tingkat wilayah membahas kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ke berbagai lokasi dalam suatu ruang ekonomi (*economic space*) tertentu (Sukirno, 1976).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan atau kesempatan kerja baru serta untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (Blakely, 1989 dalam Mudrajat Kuncoro, 2004, 110). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang No 22 Tahun 1999 / Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Substansi lain dari kedua UU tersebut yaitu adanya bagian pemberian kewenangan urusan, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Terkait dengan urusan pembiayaan, makna terpenting adalah daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber daya potensi ekonomi serta sumber daya alamnya tanpa adanya intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah sehingga kemajuan daerah lebih cepat tercapai.

Pembangunan suatu daerah juga mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Hoover dan Fisher (Nurcahyani, 2001) menyebutkan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi regional, meliputi: pertama, ekonomi subsisten. Dalam tahapan ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri pada tingkat cukup untuk hidup sehari-sehari. Kehidupan penduduk sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian dan pengumpulan hasil-hasil alamnya.

Kedua, pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal. Pada tahap kedua ini telah terdapat peningkatan baik dalam prasarana maupun sarana transportasi yang mengakibatkan terjadinya beberapa spesialisasi pada lokasi-lokasi tertentu. Di kalangan masyarakat petani timbul spesialisasi baru di luar pertanian dimana hasil produksi, bahan dasar dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian bersangkutan.

Ketiga, perdagangan antardaerah. Hal ini terjadi karena telah terdapat perbaikan dalam bidang transportasi dan terjadi perubahan-perubahan di sektor kegiatan dari arah produksi jenis ekstensifikasi menjadi pertanian yang lebih dititikberatkan ke intensifikasi. Hasil sampingannya juga dapat dipakai sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk kegiatan industri pedesaan.

Keempat, industrialisasi. Dengan makin bertambahnya penduduk dan menurunnya potensi dari peningkatan produksi pertanian dan produksi ekstraktif lainnya, daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja yaitu melalui industrialisasi yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri-industri manufaktur serta pertambangan dan galian.

Kelima, spesialisasi daerah. Dalam tahap ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi kegiatan, baik barang dan jasa-jasa untuk keperluan penjualan ke daerah lain yang termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus lainnya.

Keenam, aliran faktor produksi antardaerah. Peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhirnya meningkatkan tingkat mobilisasi faktor produksi antardaerah.

Di awal era otonomi daerah, permasalahan pokok pembangunan daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Bila dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan kurang akurat maka permasalahan ini berlarut-larut dan menyebabkan kemajuan perekonomian daerah berjalan di tempat. Energi sumber daya dan pembiayaan pembangunan yang seharusnya sudah dimanfaatkan untuk implementasi lanjut bagi pengembangan potensi daerah masih berkuat untuk menentukan skala prioritas kebijakan.

Konsepsi pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely tersebut di atas pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Pada umumnya, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur besaran nilai tambahnya yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Boediono (1999, 1), faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang atau kesempatan kerja di daerah.

3. Pembangunan Manusia

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

Pada tahun 1991 Bank Dunia menerbitkan laporannya yang menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan adalah....memperbaiki kualitas kehidupan” (*World Development Report*). Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional.

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan.

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme – UNDP*). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- **Umur panjang dan hidup sehat** (*a long and healthy life*)
- **Pengetahuan** (*knowledge*)
- **Standar hidup layak** (*decent standard of living*)

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Definisi PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

2. Pendekatan Penghitungan

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Listrik dan

Gas; E. Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Pengangkutan dan Pergudangan; ; I. Pengangkutan dan Komunikasi; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, dan ekspor neto.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari **ketiga pendekatan** tersebut **secara teoritis akan sama**. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar **harga pasar** karena mencakup **penyusutan** dan **pajak tak langsung neto**.

3. Metode Penghitungan

a. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

b. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan

ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan). Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.

Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

Ekstrapolasi

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2000. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2000, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

Deflasi

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan

komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

4. Turunan PDRB

a. PDRB atas dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah/ wilayah, termasuk penyusutan dan pajak tak langsung neto.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

c. PDRN atas dasar Biaya Faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRN atas dasar biaya faktor disebut sebagai **Pendapatan Regional**.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan **jumlah penduduk pada pertengahan tahun**. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil).

5. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 9 (sembilan) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 9 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam **Sektor Primer**. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam **Sektor Sekunder**. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai **Sektor Tersier**.

6. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut penggunaan terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun. Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil pengolahan SUSENAS BPS Provinsi DIY. Sementara untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi (harga konsumen) diperoleh dari hasil pengolahan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS Provinsi DIY.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat desa diperoleh dari daftar K1, K2 dan K3 dari BPS. Apabila diteliti lebih jauh maka pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya. Subsidi tidak dimasukkan, karena pengeluarannya merupakan transfer.

Kelompok pengeluaran pembangunan yang tujuan utamanya untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah dan tidak termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah. Tetapi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTDB dibedakan atas pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi, pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan/kendaraan, dan pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Ditinjau dari sudut kepemilikan, PMTDB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing pelaku usaha (9 sektor). Sementara kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang (*commodity flows*).

Perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke region dan barang modal yang masuk antar region atau antar pulau, ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/ bangunan. Sementara perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan cara mendeflate/ membagi nilai pembentukan modal tetap bruto (nilai barang impor) atas dasar harga berlaku dengan IHPB barang impor, dan dengan IHPB sektor industri untuk barang modal antar pulau. Data mengenai investasi diperoleh dari BI Yogyakarta dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Pemda DIY.

Pengertian inventori adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Perubahan inventori/stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai inventori/ stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai inventori/stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan).

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008

Selama satu dekade terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan regional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional dan regional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar tersebut dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *2008 System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Table* (SUT).

Implikasi dari perubahan harga tahun dasar memberikan dampak, antara lain: meningkatkan nominal PDB/PDRB yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara/wilayah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi, dan pergeseran struktur perekonomian. Dampak lain adalah merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi, dan juga berdampak pada perubahan input data untuk *modelling* dan *forecasting*.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut: secara umum perekonomian Indonesia relatif stabil; selama 10 (sepuluh) tahun terakhir telah terjadi perubahan struktur ekonomi terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun; teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008; tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan indeks harga produsen (*producer price index/PPI*); dan tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB/PDRB.

8. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak Januari 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225–462 komoditas. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

Laju inflasi/deflasi adalah persentase perubahan indeks setiap bulan diperoleh dengan cara mengurangkan indeks (IHK subkelompok/kelompok/umum) suatu bulan dengan indeks (IHK subkelompok/kelompok/ umum) bulan sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan indeks (IHK subkelompok/kelompok/umum) bulan sebelumnya dan dikalikan 100.

C. Potensi dan Kualitas Indikator Pertumbuhan PDRB

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah terlalu bermakna. Namun meraih keduanya secara bersamaan bukanlah perkara mudah. Para ekonom pun punya pandangan berbeda mengenai hal ini. Mengorbankan pemerataan seringkali diperlukan guna meraih pertumbuhan, kata para ekonom penganut aliran capital fundamentalism. Pertumbuhan hanya bisa berlangsung ketika ketimpangan justru eksis dalam masyarakat, terutama pada fase awal pembangunan, kata ekonom Simon Kuznets, 60 tahun lampau.

Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitman Rostow (1916-1979) yang juga diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru telah menimbulkan permasalahan kesenjangan pendapatan yang menganga. Di samping itu tahapan pembangunan juga telah menimbulkan kesenjangan sosial dan afiliasi politik yang berujung terjadinya krisis ekonomi dan sosial di tahun 1998.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sedangkan menurut Tambunan (1996), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi negara Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara di Afrika merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (stagnasi). Oleh

karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ekonom, baik dari negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara industri maju.

Teori pertumbuhan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut Sukirno (1997), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Todaro (2000) mengatakan, ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pendapatan yang diinvestasikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stok modal (*capital stock*) yang pada akhirnya akan diinvestasikan lagi dalam bentuk pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku. Kondisi demikian akan memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, yang terjadi beberapa tahun kemudian secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Dimana peningkatan tenaga kerja terjadi jika penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan kerja secara umum. Sedangkan kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi memungkinkan pemanfaatan barang modal secara lebih produktif.

2. Kesenjangan (Disparitas) Antarwilayah

Menurut Arsyad (1997), penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara sedang berkembang. Misalnya ketidakmerataan

kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, dan kebebasan untuk memilih. Uppal dkk, (1986), mengatakan bahwa penurunan kesenjangan antar daerah dapat disebabkan karena adanya alokasi dana pembangunan, antar lain seperti misalnya transfer pemerintah pusat melalui berbagai grant dan pengeluaran pemerintah pusat di masing-masing provinsi melalui daftar isian proyek (DIP).

Pendiri ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo (dalam Lipsey, 1985), sangat memperhatikan distribusi pendapatan di antara tiga kelas sosial yang besar yaitu pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini mereka menentukan tiga faktor produksi : tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap faktor produksi ini merupakan pendapatan bagi tiga kelas dalam masyarakat. Smith dan Ricardo tertarik pada apa yang menentukan pendapatan masing-masing kelompok dari pendapatan nasional, dan bagaimana suatu pertumbuhan dalam pendapatan nasional mempengaruhi distribusi pendapatan ini. Teori ini meramalkan bahwa kalau masyarakat mengalami perkembangan tuan tanah akan menjadi makmur dan kapitalis akan menjadi semakin melarat.

Disparitas antarwilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada pula yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi, kesehatan, maupun sektor infrastruktur, perumahan dan lain sebagainya. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yang merata mengarah kepada pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah atau daerah. Pada dasarnya tujuan akhir dari pembangunan wilayah yang seimbang adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah pedesaan/daerah belakang sehingga taraf hidupnya sejajar atau setara dengan taraf hidup penduduk di wilayah perkotaan/maju melalui pembangunan sektor pertanian, industri, perdagangan atau bisnis, fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Alam, 2006).

Menurut Yadiansyah (2007), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Indonesia adalah, yang pertama: konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terpusat di Pulau Jawa, sehingga membuat terbelakangnya pembangunan ekonomi provinsi di luar Jawa, khususnya Indonesia Bagian Timur. Kedua, alokasi investasi. Pola distribusi nilai tambah industri antardaerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri

(PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Terpusatnya investasi di Pulau Jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kebijakan dari birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa (Tambunan, 1996).

Ketiga adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarpulau. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antardaerah. Keempat, yaitu perbedaan sumber daya. Dasar pemikiran "klasik" sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA-nya akan lebih maju masyarakatnya dan lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu dibutuhkan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Daerah-daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti NAD, Riau, Kalimantan, dan Papua memang masih lebih baik di banding daerah di luar Jawa yang miskin SDA, tetapi tingkat pendapatan di daerah-daerah kaya tersebut tidak lebih tinggi dibanding daerah di Jawa yang relatif kaya SDM dan teknologi. Kelima, adalah perbedaan kondisi demografis antardaerah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Terakhir adalah kurang lancarnya perdagangan antardaerah. Ketidaklancaran ini disebabkan terutama oleh keterbatasan sarana prasarana transportasi dan komunikasi, perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input antara, barang baku, dan material-material lainnya untuk produksi dan jasa jadi terganggu.

3. Kesenjangan (Disparitas) Pendapatan dan Kemiskinan

Menurut Ray (1998) ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki sesuatu barang, pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama. Disparitas pendapatan dan kekayaan seseorang dalam banyak situasi berhubungan dengan isu-isu pendapatan dan kebebasan dalam berpolitik. Menurut Wie (1983), bahwa masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pembagian pendapatan antargolongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan pedesaan, dan pembagian pendapatan antardaerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan bisa dilihat dari segi perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari dua indikator, yaitu: perbandingan antara tingkat pendapatan perkapita di daerah perkotaan dan pedesaan dan disparitas dari pendapatan daerah perkotaan dan pedesaan (perbedaan dalam pendapatan rata-rata antarkedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antardaerah adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia, yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antardaerah.

Tambunan (2001) mengatakan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis “*development gap*” atau “disparitas” antar kabupaten/kota, provinsi, atau negara, yaitu:

- a. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Konsumsi rumah tangga per kapita.

Asumsi yang digunakan untuk menganalisis konsumsi rumah tangga per kapita adalah *saving behavior* dari masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit di dalam pengeluaran tidak berubah.

- c. *Human Development Index*.

Asumsi semakin baik pembangunan di wilayah, maka semakin tinggi HDInya.

- d. Kontribusi sektoral terhadap PDRB.

Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi persentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

- e. Struktur Fiskal.

Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, dilihat dari pendapatan riil perkapita yang tinggi, penerimaan pemerintah daerah tersebut (PAD asli) juga tinggi.

Selain itu, menurut Tambunan (2001), distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan akan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pengsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

4. Ketimpangan Antarwilayah dengan Indeks Williamson

Untuk memahami konvergensi dan divergensi dalam perkembangan suatu wilayah, Williamson mengamati tingkat kesenjangan diberbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Williamson menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari berbagai negara dengan tahun yang relatif sama. Dalam melakukan perhitungan Williamson menggunakan data PDB perkapita serta jumlah penduduk dari berbagai negara. Hasil perhitungan ini kemudian digabungkan dengan tingkat perkembangan ekonomi

(berdasarkan tingkat PDB) negara-negara tersebut dari Kuznets. Berdasarkan penggabungan kedua perhitungan tersebut, Williamson menyatakan bahwa ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan nasional dan ketidaksamaan regional. Tingkat ketidaksamaan regional adalah sangat tinggi dalam golongan pendapatan menengah berdasarkan Kuznets, tetapi secara konsisten lebih rendah apabila kita bergerak ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Dapat dikatakan juga bahwa pada waktu tingkat perkembangan perekonomian suatu negara masih rendah, maka tingkat kesenjangan pun semakin rendah (nilai CV rendah). Nilai CV ini terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat perkembangan ekonomi negara semakin tinggi maka nilai CV-nya semakin rendah. Bagi negara-negara yang telah maju ternyata nilai CV-nya rendah, seperti negara-negara yang sangat belum berkembang. Apabila hubungan antara Indeks Williamson dengan perkembangan ekonomi digambarkan dengan grafik, maka grafik tersebut akan berbentuk huruf U terbalik (Williamson, 1975).

Menurut Williamson (1975), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan antarwilayah, yaitu :

a. *Labor Migration* (Perpindahan Tenaga Kerja)

Perpindahan tenaga kerja antar daerah mungkin sangat selektif karena baik oleh hambatan keuangan dari pada tingkat pendapatan yang rendah atau kelambanan tradisional di masyarakat pedesaan, dan daerah non industri yang miskin. Orang-orang yang pindah mungkin ditandai sebagai orang-orang yang bersemangat dan berjiwa *entrepreneur*, terdidik dan mempunyai keterampilan dan dalam unsur-unsur produktif. Perpindahan penduduk yang selektif semacam ini akan memberikan penekanan terhadap adanya tendensi kearah terpencarnya pendapatan regional, tingkat partisipasi tenaga kerja, jika yang lain tetap, cenderung akan menguntungkan daerah yang kaya dan merugikan daerah yang miskin. Lebih dari itu, *human capital* yang berharga cenderung mengalir keluar dari daerah miskin ke daerah kaya yang membuat sumber-sumber regional perkapita yang dimiliki akan lebih pincang dan ketidaksamaan akan lebih besar.

b. *Capital Migration* (Perpindahan Modal)

Perpindahan modal swasta secara inter-regional cenderung berakibat buruk. Faedah eksternal ekonomis dan faedah umum yang berasal dari aglomerasi dari proyek-proyek modal di daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya modal dari daerah miskin, hal ini cenderung memperjelas ketidaksamaan regional dan memperluas perpecahan antar daerah kaya dan daerah miskin. Resiko yang tinggi, kekurangan kemampuan *entrepreneur*, dan pasar modal yang belum

berkembang boleh jadi akan menekan kegiatan investasi dan akumulasi modal di daerah miskin.

c. *Central Government Policy* (Kebijakan Pemerintah Pusat)

Pemerintah pusat secara terang-terangan ataupun tidak melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional yang menimbulkan peningkatan ketidaksamaan regional. Jika keadaan politik di wilayah yang miskin kurang memuaskan maka pemerintah pusat dapat saja mengalihkan investasi dari daerah miskin ke daerah kaya. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar. Tetapi apabila pemerintah pusat cenderung berlaku adil maka kebijaksanaannya dapat mengurangi kesenjangan ini. Dengan memperhatikan pola investasi regional pemerintah pusat, hendaknya jelas bahwa setelah pembangunan berlangsung, maka investasi pemerintah diharapkan semakin berkurang, dan dalam banyak hal investasi pemerintah akan dibiayai oleh investasi sebelumnya.

d. *Interregional Linkages* (Keterkaitan antar Daerah)

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada permulaan pembangunan mungkin efek menyebar dari perubahan teknologi dan perubahan sosial serta pengandaan pendapatan adalah kecil., tetapi selanjutnya diharapkan pada saat pembangunan telah berjalan, peningkatan disuatu daerah akan memberikan efek yang menyebar ke daerah di sekitarnya.

D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Kependudukan

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Dalam proses transisi demografi, periode perubahan dibagi atas empat tahap. *Tahap Pertama*, adalah periode dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya sama-sama tinggi. Pada *tahap kedua*, karena adanya perbaikan dalam fasilitas kesehatan, tingkat kematian menurun. Namun penurunan yang terjadi pada tingkat kematian ini tidak disertai dengan penurunan tingkat kelahiran, akibatnya pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Pada *tahap ketiga*, penurunan tingkat kematian diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berpikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada tahap akhir proses transisi ini baik tingkat

kelahiran maupun tingkat kematian sudah tidak banyak berubah lagi. Angka kelahiran dan kematian yang secara alamiah memang harus terjadi. Akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah (Susanti, 1995).

Apabila proses transisi demografi dikaitkan dengan proses peningkatan pendapatan perkapita, maka pada awal proses pembangunan peningkatan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan penurunan angka kematian yang begitu cepat daripada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kematian yang cepat ini disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Selain itu peningkatan pendapatan masyarakat ini juga akan menyebabkan penerimaan pajak pemerintah meningkat, dan hal ini tentu saja memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya di bidang kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, akibat lain dari penurunan angka kematian yang lebih cepat daripada penurunan angka kelahiran adalah tingginya jumlah penduduk usia muda dan usia tua pada struktur penduduk menurut umur, akibat dari hal ini adalah jumlah penduduk yang hidupnya ditanggung oleh penduduk usia kerja menjadi semakin tinggi. Dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita, perubahan pada aspek sosial-ekonomi dan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kelahiran juga akan turun dengan cepat. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk menurun dan dengan sendirinya jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja akan menurun.

2. Ketenagakerjaan

Menurut konsep BPS, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ingin bekerja (contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain). Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja dan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dari jumlah penduduk dalam (ii). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4 persen.

Menurut Tambunan (1996), tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun yang kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada

besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Angkatan kerja adalah penduduk yang berdasarkan usia sudah bisa bekerja. Menurut Subri (2003), tenaga kerja adalah usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan itu dapat berupa lebih besarnya penawaran di banding permintaan terhadap tenaga kerja dan lebih besarnya permintaan di banding penawaran tenaga kerja.

Sedangkan menurut Ananta (1990), tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-bangsa menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun ke atas sebagai tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10-14 dan 65 tahun ke atas yang bekerja. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja memproduksi barang dan jasa. Di Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang benar-benar mau bekerja. Mereka yang mau bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Thomas Robert Malthus dalam Albert WS Kusen (2013), menyebutkan bahwa ukuran pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika Pendapatan Nasional Bruto (PNB) potensialnya meningkat. Sektor yang paling dominan adalah sektor industri dan pertanian. Jika output di kedua sektor itu ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa di tingkatkan. Menurut Thomas Robert Malthus ada dua faktor yang sangat menentukan pertumbuhan yaitu faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi; dan juga faktor nonekonomis seperti keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. Tetapi, diantara faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor akumulasi modal.

Meski relasi antara pertumbuhan dan ketimpangan telah memicu debat panjang para ahli, namun tetap ada keinginan kuat untuk "mengawinkan" keduanya. Oleh karena kompleksitasnya permasalahan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ini, dalam dua dekade terakhir telah memunculkan sejumlah gagasan konseptual agar implikasi pembangunan lebih baik, mulai dari *redistribution with growth*, *the quality of growth*, *broad-based growth*, *pro-poor growth*, hingga *inclusive growth*. Analisis PDRB ini hanya berfokus membahas tentang konsep kualitas pertumbuhan (*the quality of growth*).

BAB 3

METODOLOGI

- A. Sumber Data
- B. Kerangka Pikir Analisis
- C. Indikator Penyajian PDRB
- D. Analisis Potensi dan Kualitas Indikator
Pertumbuhan PDRB

BAB III METODOLOGI

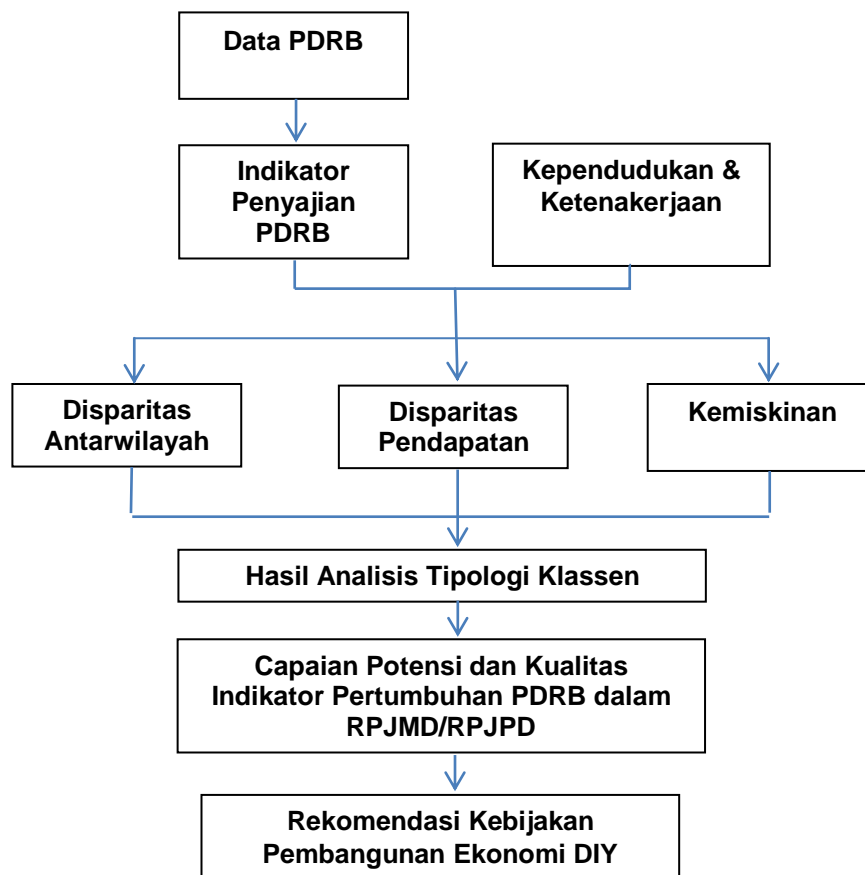
A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Analisis PDRB 2012-2016 ini bersumber dari data PDRB DIY dan PDRB Kabupaten/Kota yang merupakan hasil pengolahan data dari kegiatan Survei Khusus Neraca Produksi dan Neraca Konsumsi, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk 2010 (SP2010), survei dan kompilasi data keuangan dari Pemerintah Daerah DIY maupun kabupaten/kota, kompilasi data keuangan dari Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, Survei Statistik Harga Konsumen, Survei Statistik Niaga dan Jasa, Survei Statistik Pertanian, Survei Industri Besar Sedang (IBS), Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK), Angka Kemiskinan 2010-2016, dan data-data dari DIY dalam Angka (DDA DIY).

B. Kerangka Pikir Analisis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan sumber data, maka kerangka pikir analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Analisis



C. Indikator Penyajian PDRB

Data PDRB yang digunakan dalam buku Analisis PDRB Provinsi DIY ini terdiri dari PDRB menurut sektor/ lapangan usaha dan menurut penggunaan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Nilai PDRB juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu distribusi persentase (kontribusi/peran), PDRB per kapita, indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks harga implisit.

1. Distribusi Persentase

Distribusi persentase diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor/penggunaan dengan total PDRB. Distribusi persentase mengindikasikan struktur PDRB menurut sektor atau menurut penggunaan.

$$Share(\%) = \frac{ntb \text{ sektor/ penggunaan}}{PDRB_t} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_t}{\sum penduduk_t} \quad \dots\dots\dots(3.2)$$

3. Indeks Perkembangan

Indeks perkembangan diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari suatu tahun terhadap tahun dasarnya. Formulasi Indeks Perkembangan, sebagai berikut:

$$IP_t = \frac{PDRB_t - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.3)$$

4. Indeks Berantai (Angka Laju Pertumbuhan)

Indeks berantai diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Apabila indeks berantai dikurangi dengan 100, maka diperoleh **angka laju pertumbuhan**.

$$IB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.4)$$

5. Indeks Harga Implisit

Indeks harga implisit diperoleh dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 pada tahun yang sama dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga di level produsen.

$$II_t = \frac{PDRB_{adhb}_t}{PDRB_{adhk}_t} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.5)$$

6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi Harga Produsen)

Selanjutnya, apabila dari indeks harga implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga suatu tahun terhadap tahun sebelumnya (laju inflasi).

$$IIB_t = \frac{II_t - II_{t-1}}{II_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.6)$$

7. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Laju Inflasi/Deflasi

Metode yang digunakan dalam penghitungan IHK adalah *Formula Laspeyres* yang telah dimodifikasi, yaitu:

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.7)$$

Keterangan:

- IHK_n = Indeks Harga Konsumen bulan ke-n
- P_{ni} = Harga jenis barang/jasa i pada bulan ke (n)
- P_{(n-1)i} = Harga jenis barang/jasa i pada bulan ke (n-1)
- $\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$ = Relatif Harga (RH) jenis barang/jasa i pada bulan ke (n)
- P_(n-1) · Q_{0i} = Nilai Konsumsi (NK) jenis barang/jasa i pada bulan ke (n-1)
- P_{0i} · Q_{0i} = Nilai Konsumsi (NK) jenis barang/jasa i pada tahun dasar
- K = Jumlah jenis barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas IHK.

Persentase (%) perubahan IHK (laju inflasi/deflasi) bulanan diperoleh dari:

$$\frac{I_n - I_{n-1}}{I_{n-1}} \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.8)$$

Keterangan:

- I_n = IHK bulan n
- I_{n-1} = IHK bulan n-1
- Inflasi jika nilainya > 0, dan
- Deflasi jika nilainya < 0.

Persentase perubahan IHK dalam satu tahun dihitung dengan menggunakan metode *point to point*, tetapi sebelum April 1998 menggunakan metode kumulatif bulanan.

D. Analisis Potensi dan Kualitas Indikator Pertumbuhan PDRB

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi mengacu pada fungsi produksi yang diperkenalkan oleh **Cobb-Douglass** (Mankiw, 2004), yaitu:

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta \dots\dots\dots(3.9)$$

keterangan:

- Y_t = tingkat produksi (output) pada periode t
- T_t = tingkat teknologi pada periode t
- K_t = jumlah stok modal pada periode t
- L_t = jumlah tenaga kerja pada periode t
- α = produktivitas modal
- β = produktivitas tenaga kerja

Formula di atas dapat dituliskan dalam bentuk persamaan fungsi berikut:

$$Y = f(T, K, L)$$

Dari rumusan fungsi produksi Cobb-Douglas tampak bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap teknologi, kapital, dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena peningkatan teknologi, kapital atau tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.10)$$

keterangan:

- LPE = Laju pertumbuhan ekonomi
 $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke t
 $PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke (t-1)

Jika pertumbuhan ekonomi diamati dalam suatu periode waktu beberapa tahun, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dihitung dengan formula:

$$r = \left(\sqrt[n-1]{\frac{PDRB_{t_n}}{PDRB_{t_0}}} - 1 \right) \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.11)$$

keterangan:

- r = Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun
 n = Jumlah tahun periode (dihitung mulai dari 1 sampai dengan n)
 t_n = Tahun terakhir periode
 t_0 = Tahun awal periode

Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat baik dari sisi lapangan usaha, wilayah (kabupaten/kota), maupun penggunaan. Ukuran andil terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dengan formula berikut:

$$Andil_{it} = \frac{(LPE_{it} \times DP_{i(t-1)})}{100} \quad \dots\dots\dots(3.12)$$

- $Andil_i$ = Andil sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap pertumbuhan ekonomi
 LPE_i = Laju pertumbuhan ekonomi sektor/ wilayah/ komponen ke-i
 $DP_{i(t-1)}$ = Distribusi persentase sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap total PDRB pada tahun sebelumnya
 i = 1, 2, ..., 9
 t = tahun observasi

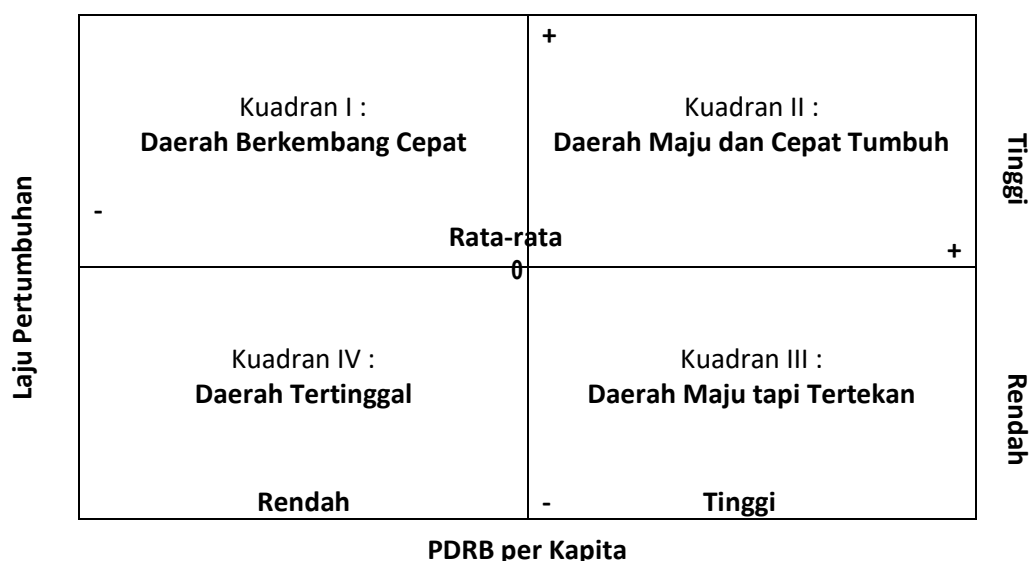
Laju pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan PDRB per kapita suatu wilayah, dapat digunakan untuk membandingkan secara relatif posisi wilayah tersebut terhadap wilayah lainnya. Perbandingan absolut antar kabupaten/kota atau menurut Sjafrizal (1997) disebut sebagai **Tipologi Klassen** disajikan pada Gambar 2.1 dalam bentuk "**diagram empat kuadran**", di mana sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu horisontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Pada tengah masing-masing sumbu (vertikal dan horisontal) digambarkan garis tegak lurus pada masing-masing sumbu. Garis-garis ini menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi (tegak lurus dengan garis vertikal) dan rata-rata PDRB per kapita (tegak lurus dengan garis horisontal). Garis-garis tersebut membagi bidang grafik menjadi 4 (empat) kuadran. Selanjutnya searah putaran jarum jam, empat kuadran tersebut disebut dengan kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah).

Apabila suatu kabupaten/kota menempati kuadran I, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY, namun mempunyai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan DIY. Apabila terletak di kuadran II, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata DIY. Suatu titik di kuadran III menggambarkan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita DIY, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan DIY. Selanjutnya dengan mudah dapat diinterpretasikan bahwa suatu titik di kuadran IV menggambarkan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita DIY, dan juga tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan DIY.

Kabupaten/kota di kuadran I disebut “daerah berkembang cepat”, menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya relatif masih rendah, sehingga Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkannya. Namun demikian, karena tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, kabupaten/kota tersebut masih berpeluang dipacu untuk mengejar daerah lain. Kabupaten/ kota yang terletak di kuadran II disebut “daerah maju dan cepat tumbuh” yang secara relatif menunjukkan daerah-daerah sudah maju perekonomiannya, dan akan lebih cepat maju karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang relatif tinggi dibanding dengan rata-rata DIY. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran III merupakan “daerah maju tapi tertekan”, secara absolut sudah mencapai tingkat perekonomian yang tinggi namun tingkat pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding dengan rata-rata DIY. Sementara kabupaten/kota yang digambarkan di kuadran IV disebut “daerah tertinggal”, sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dibanding daerah-daerah lainnya relatif lebih rendah baik dari segi besaran PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhannya.

Gambar 3.2

Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita



2. Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya. Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

a. Pendidikan Penduduk

Pendidikan mencerminkan kualitas pengetahuan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka kualitas pengetahuan dan ketrampilannya diasumsikan semakin baik. Pendidikan tertinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk.

b. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha merupakan mata pencaharian penduduk untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Kategori lapangan usaha mengacu pada lapangan usaha 9 (sembilan) sektor seperti yang digunakan dalam uraian PDRB tahun dasar 2000.

c. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)

Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{Jml\ Penduduk_{0-14} + Jml\ Penduduk_{65+}}{Jml\ Penduduk_{15-64}} \dots\dots\dots(3.13)$$

Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kesempatan memperoleh pekerjaan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD'45) pasal 27 ayat 2. Setiap penduduk yang mampu dan mau bekerja diharapkan akan memperoleh pekerjaan yang sesuai disertai dengan jaminan

perlindungan kerja yang manusiawi, termasuk di dalamnya memperoleh upah yang cukup untuk hidup layak. Namun harapan tersebut masih jauh dari kenyataan yang terjadi.

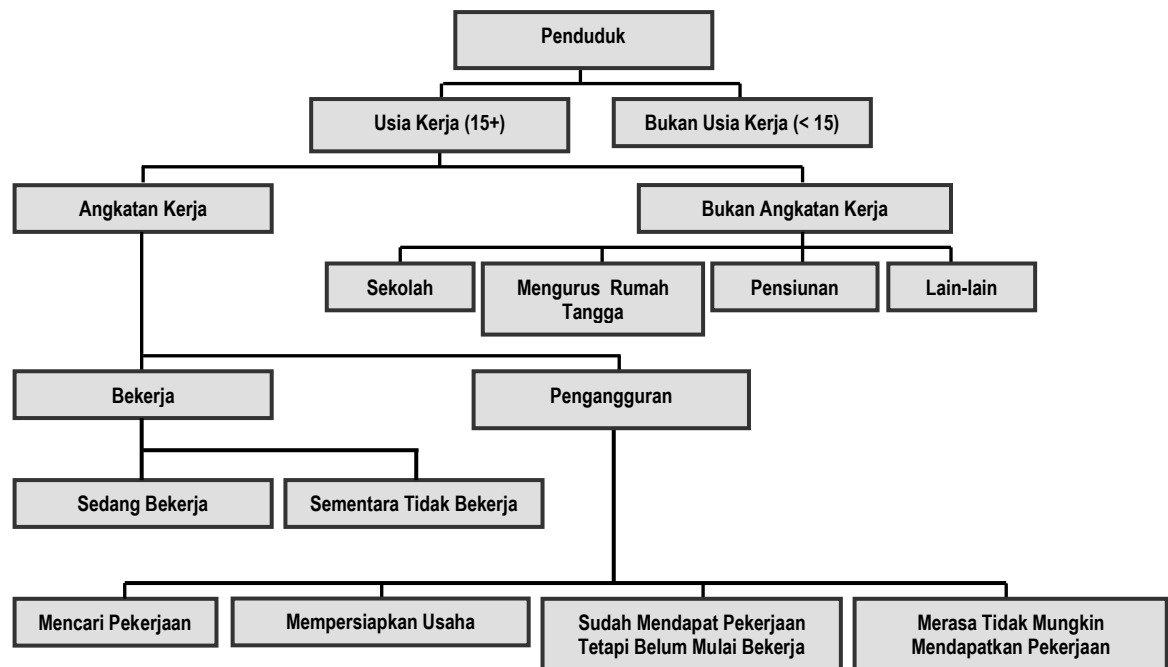
Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran dari *the International Labor Organization (ILO)*, penduduk dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.

Penduduk **bekerja** adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. **Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. **Pengangguran terbuka** adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep tersebut digambarkan dalam Gambar 2.2.

Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:

- **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran.
- **Penghasilan** mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/barang.
- **Hari kerja** adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
- **Jam kerja** adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.

Gambar 3.3
Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja



Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.14)$$

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

e. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Menurut Simanjutak (2001), kesempatan kerja adalah penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor. Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan kerja.

$$TKK = \frac{\text{Jumlah pendudukbekerja}}{\text{Jumlah angkatankerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.15)$$

TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau wilayah.

Untuk keperluan analisis lebih lanjut, dapat dihitung **laju pertumbuhan kesempatan kerja (r_{KK})**, yaitu perbandingan antara selisih jumlah kesempatan kerja dalam 2 (dua) periode waktu terhadap jumlah kesempatan kerja pada periode waktu awal, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menyajikan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja.

$$r_{KK} = \frac{B_t - B_{t-1}}{B_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.16)$$

keterangan:

B_t = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t
 B_{t-1} = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t-1

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran. Dalam analisis ini indikator pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.17)$$

g. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan pengangguran, demikian pula berlaku sebaliknya.

Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Menurut Simanjutak (2001), Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi/ produk domestik bruto (regional bruto (PDB/PDRB). Dengan demikian elastisitas kesempatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{KK} = \frac{r_{KK}}{r_{PDRB}} \quad \dots\dots\dots(3.18)$$

keterangan:

E_{KK} = Elastisitas kesempatan kerja

r_{KK} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja

r_{PDRB} = Laju pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

h. Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Pada kajian ini, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan nilai tambah (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada setiap sektor. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja yang dimaksud di sini merupakan produktivitas selama satu tahun.

$$PTK_i = \frac{PDRB_i}{TK_i} \dots\dots\dots(3.19)$$

keterangan:

PTK_i = Produktivitas tenaga kerja sektor ke-i

$PDRB_i$ = PDRB sektor ke-i

TK_i = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i

Laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas pada kurun waktu tertentu.

3. Indikator Kemiskinan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan.

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai *"inability of the individual to meet basic needs"* (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Amartya Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *"the failure to have certain minimum capabilities"*. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan **nilai standar kebutuhan minimum**, baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut

digunakan sebagai **garis pembatas** untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. *Uppal (1985)* menyebutkan garis pembatas tersebut sebagai **garis kemiskinan (*poverty line*)** atau **batas kemiskinan (*poverty treshold*)**.

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara **2.100 kilo kalori per kapita per hari** dan kebutuhan minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. Biaya untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut sebagai **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)**. Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. **Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan** merupakan **indikator kemiskinan** yang sering digunakan dan biasa disebut **Head Count Index (HCI)**.

Kajian tentang kemiskinan tidak cukup hanya mempelajari jumlah dan persentase penduduk miskin saja yang diukur dari metode HCI. Salah satu kelemahan metode HCI adalah tidak memperhitungkan kedalaman kemiskinan serta ketimpangan sebaran pada kelompok miskin (*distribution among the poor*). Dua indikator berikut ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dalam melihat perubahan tingkat hidup penduduk miskin. Indikator tersebut adalah **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index* atau P_1)** dan **Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* atau P_2)**.

Penurunan angka pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman dari insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan dari P_2 mengidentifikasi berkurangnya (membaiknya) ketimpangan di antara penduduk miskin.

Pada tahun 1994 **Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT)** memperkenalkan suatu rumusan yang mengandung tiga jenis indikator kemiskinan. Rumusan FGT inilah yang kemudian digunakan sebagai indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, dengan formula sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = (I / N) \sum_{j=1}^Q \left(\frac{(Z - Y_j)}{Z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots(3.20)$$

Keterangan:

- P_{α} = Indeks kemiskinan ($\alpha = 0,1,2$)
- N = Jumlah penduduk
- Z = Garis kemiskinan
- Y_j = Pengeluaran perkapita penduduk di bawah garis kemiskinan Z

Q = Banyaknya penduduk miskin

Pengeluaran penduduk miskin perkapita dapat langsung dihitung dari hasil SUSENAS yang menggambarkan perbedaan antara pengeluaran si miskin (*proxy* pendapatan) dengan garis kemiskinan. Perbedaan tersebut dinyatakan dengan :

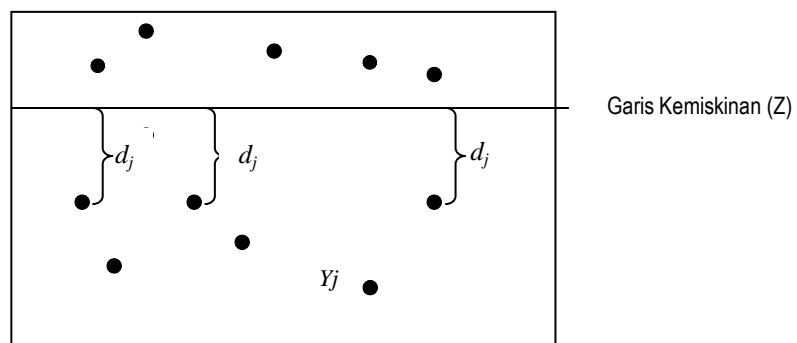
$$d_j = Z - Y_j \quad \dots\dots\dots(3.21)$$

bila persamaan ini dimasukkan ke dalam rumus FGT di atas, maka akan diperoleh :

$$P_\alpha = (1/N) \sum_{j=1}^Q \left(\frac{d_j}{Z} \right)^\alpha \quad \dots\dots\dots(3.22)$$

Keterangan: d_j/Z disebut **rasio kesenjangan kemiskinan (*poverty gap ratio*)**.

Gambar 3.4
Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan



Gambar 3.4 adalah *plotting* pengeluaran per kapita (Y_j) dengan garis kemiskinan (Z). Jarak antara pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap batas kemiskinan ditunjukkan oleh setiap titik d_j yang terdistribusikan di bawah garis kemiskinan. **Golongan penduduk sekitar garis miskin** relatif lebih mudah ditanggulangi, tetapi **rentan terhadap perubahan harga**. Jika harga naik menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas, maka mereka yang berada di atas garis kemiskinan akan mudah jatuh ke dalam kategori penduduk miskin. Sebaliknya, jika terjadi penurunan harga menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke bawah, maka mereka akan masuk ke dalam kategori penduduk tidak miskin. Golongan penduduk seperti inilah yang dikenal sebagai ***the near non-poor*** yang sensitif terhadap perubahan harga.

Dari rumusan FGT diperoleh tiga macam indeks, yaitu :

- i. Jika $\alpha = 0$ maka $P_0 = Q/N$ rasio ini tidak lain adalah ***Head Count Index***, dan bila dikalikan dengan 100 menjadi **persentase penduduk miskin**. Jika 20 persen dari total penduduk diklasifikasikan sebagai miskin, maka $P_0 = 0,2$.

- ii. Jika $\alpha = 1$ maka P_1 menunjukkan ukuran **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index*)**. P_1 merupakan persentase rata-rata kesenjangan antar pengeluaran penduduk miskin di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah seluruh penduduk (baik yang di bawah atau di atas garis kemiskinan). Misal $P_1 = 0,15$ ini berarti bahwa kesenjangan antara total pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, jika dirata-ratakan terhadap seluruh rumah tangga (baik rumah tangga miskin atau tidak miskin) adalah sebesar 15 persen. Karena nilai P_1 belum menggambarkan kesenjangan riil yang dihadapi oleh penduduk miskin, maka nilai P_1 harus dikoreksi dengan jumlah penduduk yang berada di atas GK dengan rumus:

$$\frac{P_1}{P_2} = \sum_{j=1}^Q \left(\frac{Z - Y_j}{Q} \right) \dots\dots\dots(3.23)$$

Rasio P_1/P_2 merupakan persentase rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain rasio tersebut merupakan rata-rata kesenjangan taraf hidup yang diukur dengan pengeluaran.

- iii. Jika $\alpha = 2$ maka P_2 menunjukkan ukuran **Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* atau *distribution sensitive index*)** yang menggambarkan ketimpangan antar penduduk miskin. Tidak seperti dua ukuran terdahulu, ukuran ini sensitif terhadap penyebaran pengeluaran (*proxy* pendapatan) yang terjadi di antara penduduk miskin, dan juga dapat dipakai untuk mengetahui intensitas kemiskinan (*severity*). Ukuran ini dianggap yang paling memenuhi aksioma-aksioma untuk ukuran kemiskinan yang diinginkan oleh berbagai literatur, termasuk *Amartya Sen* (1976) dengan '*transfer axiom*'-nya, yaitu jika terjadi transfer pengeluaran dari penduduk miskin kepada penduduk yang lebih miskin berarti secara rata-rata telah terjadi suatu penurunan kemiskinan (BPS, 1992).

4. Indikator Ketimpangan (Disparitas)

a. Ketimpangan Pendapatan

Para pengamat ekonomi banyak yang menaruh perhatian pada permasalahan distribusi pendapatan atau pembagian pendapatan seperti diawali oleh *Sundrum* (1973) serta *King* dan *Weldon* (1975). Dalam waktu relatif singkat bermunculan para ahli ekonomi yang melakukan penelitian seperti *Hendra Esmara* (1974 dan 1978), kemudian *Parera* (1977) atau *Sam F. Poli* (1978). Tetapi sebagian besar hanya bertujuan mengetahui gambaran ketimpangan/ kesenjangan/ *gap* dalam pembagian pendapatan, yang biasanya dinyatakan dalam ukuran **Gini Ratio**. Sedangkan pengukuran jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka masih jarang dilakukan.

Selama ini, pemerintah di banyak negara berkembang dalam kebijakan politik dan ekonominya lebih menekankan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

dalam upaya terciptanya kemakmuran bagi penduduknya. Terdapat dua pilihan antara: memperbesar 'kue' terlebih dahulu, baru kemudian dibagi merata, atau dilakukan pembagian secara merata terlebih dahulu berapapun besar 'kue' yang diperoleh. Namun terlepas dari polemik dikhotomi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih berarti jika terjadi pemerataan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat luas.

a.1. Rasio Gini (*Gini Ratio*)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (selanjutnya disebut **Kurva Lorenz**) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut :

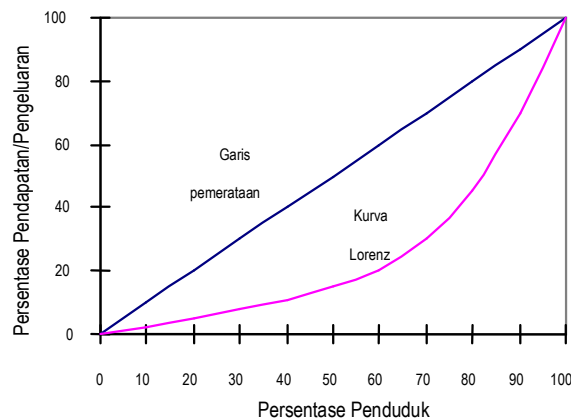
$$RasioGini = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots(3.24)$$

Keterangan :

- P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i
- Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i
- k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin **mendekati 1** maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati **ketimpangan sempurna**. Sebaliknya, semakin **mendekati 0** distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati **pemerataan sempurna**. Menurut **Harry T. Oshima**, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "**rendah**"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "**moderat**"; dan jika nilainya **lebih besar dari 0,5** dikatakan berada dalam ketimpangan "**tinggi**".

Gambar 3.5. Kurva Lorenz



a.2. Ketimpangan Kriteria Bank Dunia (KBD)

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan, yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

- Tingkat ketimpangan **rendah**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **moderat**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12 sampai dengan 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **tinggi**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima **kurang dari 12** persen jumlah pendapatan.

b. Ketimpangan Sektoral Antar Kabupaten/Kota

Selain tingkat ketimpangan pendapatan, disparitas ekonomi juga dapat digambarkan dengan disparitas sektoral antar wilayah. Indikator disparitas antar wilayah merupakan ukuran yang menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan antar wilayah dalam hal potensi ekonomi, keberhasilan pembangunan, atau kombinasi antara berbagai aspek secara sektoral.

- **Indeks Ketimpangan Regional**

Indeks Williamson adalah salah satu ukuran ketimpangan antar wilayah (region). Pengukuran ini didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar region (yang berupa besaran PDRB). Kriteria pengukuran adalah: semakin besar nilai indeks,

semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi masing-masing region dengan rata-ratanya; sebaliknya, **semakin kecil nilai indeks menunjukkan tingkat pemerataan antar region yang semakin baik.**

Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}} \dots\dots\dots(3.25)$$

keterangan:

- IW : Indeks Williamson
- y : Rata-rata pendapatan (PDRB) di Provinsi DIY
- y_i : Rata-rata pendapatan (PDRB) di region ke-i
- f_i/n : Proporsi jumlah penduduk region ke-i terhadap jumlah penduduk Provinsi DIY
- i : 1,2, ..., 5 (Kabupaten/ kota di Provinsi DIY).

- **Analisis Pergeseran (*Shift Share Analysis*)**

Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan salah satu metode analisis penting yang umum digunakan dalam studi-studi ekonomi regional. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan regional, menelusuri jejak kecondongan dan sebab-sebab perubahan dalam lapangan kerja, serta menentukan besar dan arah perubahan industri regional. Disamping itu analisis SS juga digunakan sebagai alat dalam analisis deskriptif untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan.

Analisis *Shift-Share* (SS) merupakan teknik yang relatif sederhana untuk mengevaluasi posisi relatif dan perubahan struktur suatu perekonomian lokal (misalnya kabupaten atau propinsi) dalam hubungannya dengan perekonomian acuan (nasional). Metode analisis ini bertitik tolak pada anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yakni:

- i. **Pertumbuhan nasional (*national growth component*)**, perubahan output atau pendapatan (atau indikator ekonomi lainnya seperti jumlah kesempatan kerja) suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan nasional secara umum, perubahan kebijaksanaan ekonomi nasional, atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian seluruh wilayah dan sektor secara seragam.
- ii. **Pertumbuhan sektoral (*industrial mix component*)**, timbul karena perbedaan permintaan output akhir, ketersediaan bahan baku, kebijaksanaan sektoral, serta perilaku dan kinerja struktur pasar setiap sektor nasional.

- iii. **Pertumbuhan daya saing wilayah (*competitive effect component*)**, terjadi karena peningkatan atau penurunan output atau pendapatan suatu wilayah yang lebih cepat atau lambat dari wilayah lainnya.

Perubahan nilai tambah bruto (NTB) atau PDRB suatu sektor *i* di suatu wilayah *j* dalam 2 periode, yaitu periode *o* dan periode *t* dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^t - Q_{ij}^o$$

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^o (Y_t/Y_o - 1) + Q_{ij}^o (Q_i^t/Q_i^o - Y_t/Y_o) + Q_{ij}^o (Q_{ij}^t/Q_{ij}^o - Q_i^t/Q_i^o) \dots\dots\dots (3.26)$$

Dari persamaan diatas dapat kita asumsikan bahwa pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah disebabkan oleh 3 komponen pertumbuhan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

keterangan:

- PR_{ij} = Pangsa Regional sektor *i* pada wilayah *j*
 PS_{ij} = Proportional Shift (pergeseran proporsional) sektor ke-*i* pada wilayah *j*
 DS_{ij} = Different Shift (pergeseran yang berbeda) sektor ke-*i* pada wilayah *j*
 Y_o dan Y_t = Total PDRB Wilayah pada tahun 0 dan pada tahun *t*
 Q_{ij}^o dan Q_{ij}^t = PDRB sektor *i* propinsi *j* pada tahun 0 dan pada tahun *t*
 Q_i^o dan Q_i^t = Total PDRB Wilayah sektor *i* pada tahun 0 dan pada tahun *t*

$$PR_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Y_t}{Y_o} - 1 \right\} \dots\dots\dots (3.27)$$

$$PS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_i^t}{Q_i^o} - \frac{Y_t}{Y_o} \right\} \dots\dots\dots (3.28)$$

$$DS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_{ij}^t}{Q_{ij}^o} - \frac{Q_i^t}{Q_i^o} \right\} \dots\dots\dots (3.29)$$

Analisis SS dapat dibagi ke dalam 2 bagian:

1) Analisis Pangsa Regional (*Share Analysis*)

Untuk melihat struktur atau posisi relatif provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia atau di tingkat propinsi. Sebagai indikator bisa dipergunakan nilai output, nilai tambah, atau jumlah tenaga kerja yang bekerja. *Share analysis* akan mengukur proporsi dari, misalnya, PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi. Oleh sebab itu bila nantinya ditemukan satu atau beberapa kabupaten di suatu propinsi memiliki pangsa yang tinggi maka kabupaten tersebut dikatakan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pembentukan atau

pertumbuhan PDRB propinsi. Disamping itu analisis ini juga digunakan untuk melihat peranan/kontribusi sektor yang signifikan di suatu wilayah.

2) Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)

Dalam analisis pertumbuhan regional komponen pergeseran lebih penting daripada komponen PR. Total pergeseran (total shift) terdiri dari:

- ∞ Perubahan secara proporsional atau Proportionality Shift (PS) mengukur sejauh mana laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah berbeda dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat wilayah. Jadi PS memperlihatkan struktur ekonomi dan perubahannya di suatu wilayah.
- ∞ Perubahan yang berbeda atau Different Shift (DS) terjadi apabila laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pada sektor yang sama di wilayah lain. Perbedaan ini mencerminkan posisi keuntungan lokasi (*locational advantage position*) suatu wilayah yang mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan satu atau beberapa sektor tertentu di wilayah tersebut.

Berdasarkan besaran PS dan DS beberapa wilayah dalam suatu daerah dapat di kelompokkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat (*rapid growth region*),

Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah wilayah yang pertumbuhannya tertekan tapi berkembang (*depressed region* yang berkembang),

Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah wilayah yang tertekan namun cenderung berpotensi (*depressed region* yang berpotensi)

Kategori IV (PS dan DS negatif) adalah wilayah *depressed region* dengan daya saing lemah dan juga peranan terhadap wilayah rendah.

Keunggulan analisis *shift share* antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *shift share* tergolong sederhana.
2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Kelemahan Analisis *Shift-Share*, yaitu:

1. Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*.

2. Masalah *benchmark* berkenaan dengan *homothetic change*, apakah t atau $(t+1)$ tidak dapat dijelaskan dengan baik.
3. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap.
4. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
5. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor.
6. Tidak ada keterkaitan antardaerah.

BAB 4

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

- A. Struktur Perekonomian PDRB
- B. Pertumbuhan Ekonomi
- C. PDRB Per Kapita
- D. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB
- E. Indeks Perkembangan Kategori
- F. Perbandingan Nilai PDRB Antar Kabupaten/Kota
- G. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi

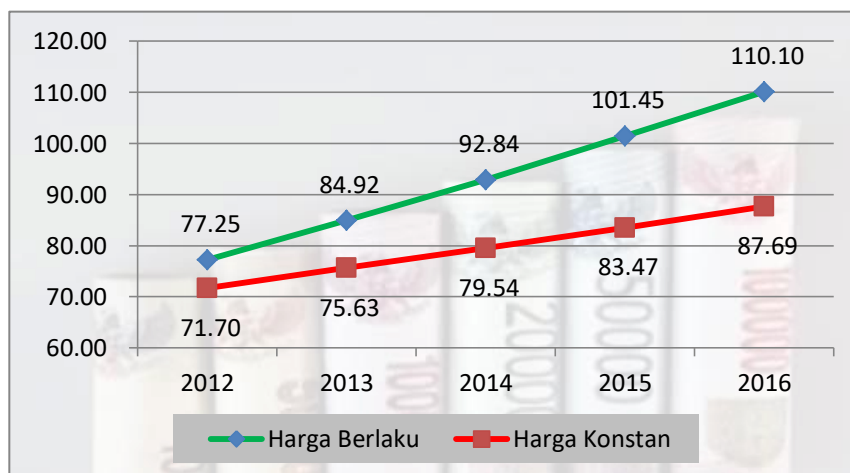
BAB IV

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT LAPANGAN USAHA

A. Struktur Perekonomian PDRB

Kinerja perekonomian DIY masa mendatang tampaknya memberikan harapan yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan daerah. Hal ini terlihat dari kecenderungan peningkatan perekonomian DIY selama kurun waktu 2012-2016 (Gambar 4.1). Berdasarkan penghitungan tahun dasar 2010, secara nominal PDRB DIY atas dasar harga berlaku tahun 2016 telah meningkat sekitar 33 triliun rupiah dibanding tahun 2012. Sementara nilai PDRB tahun 2016 atas dasar harga konstan juga naik sekitar 16,0 triliun rupiah. (data rinci pada lampiran 1 dan lampiran 2).

**Gambar 4.1. Produk Domestik Regional Bruto DI Yogyakarta
Tahun 2012 - 2016 (triliun rupiah)**



Struktur perekonomian DIY tahun 2016 yang diukur dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku memberikan gambaran bahwa perekonomian DIY tidak didominasi oleh satu atau beberapa lapangan usaha tertentu. Kontribusi terbesar masing-masing lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB DIY tahun 2016 tidak lebih dari 14 persen. Tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah industri pengolahan (13,21 persen); pertanian, kehutanan dan perikanan (10,41 persen); dan penyediaan akomodasi dan makan minum (10,22 persen). Sementara, tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah adalah pengadaan air (0,10 persen), pengadaan listrik dan gas (0,13 persen); serta pertambangan dan penggalian (0,54 persen).

Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan yang besar terutama berasal dari kontribusi golongan pokok industri pengolahan makanan dan minuman. Dilihat secara mikro, industri skala besar seperti PT. Srihusada dan PT. Madukismo cukup nyata memberikan sumbangan ekonomi daerah. Di samping itu aneka jenis industri kecil dan rumah tangga merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk D.I. Yogyakarta selain pertanian. Sementara itu golongan pokok pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian merupakan penyumbang terbesar kategori pertanian pada PDRB.

Tabel 4.1. Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2012 – 2016 (persen)

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	11,19	11,13	10,52	10,64	10,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,56	0,54
3	Industri Pengolahan	13,26	13,62	13,59	13,11	13,21
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,10	0,10	0,12	0,13
5	Pengadaan Air	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,36	9,34
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,30	8,17	8,27	8,22	8,48
8	Pengangkutan dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,68	5,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22
10	Informasi dan Komunikasi	9,49	8,92	8,51	8,13	8,14
11	Jasa Keuangan	3,49	3,73	3,88	3,97	3,94
12	Real Estat	7,03	6,85	7,00	7,02	7,09
13	Jasa Perusahaan	1,08	1,01	1,03	1,03	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7,68	7,89	8,07	8,26	8,37
15	Jasa Pendidikan	8,24	8,03	8,19	8,48	8,25
16	Jasa Kesehatan	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
17	Jasa-jasa Lainnya	2,57	2,53	2,53	2,55	2,57
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Kategori atau lapangan usaha penyediaan akomodasi makanan dan minuman merupakan lapangan usaha yang favorit. Pada saat musim liburan, Yogyakarta yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia aktivitas usaha-usaha yang tercakup dalam lapangan usaha ini sangat padat. Golongan pokok usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang utama lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY. Sementara itu golongan pokok usaha penyediaan akomodasi memberikan sumbangan sekitar seperlima dari kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB DIY.

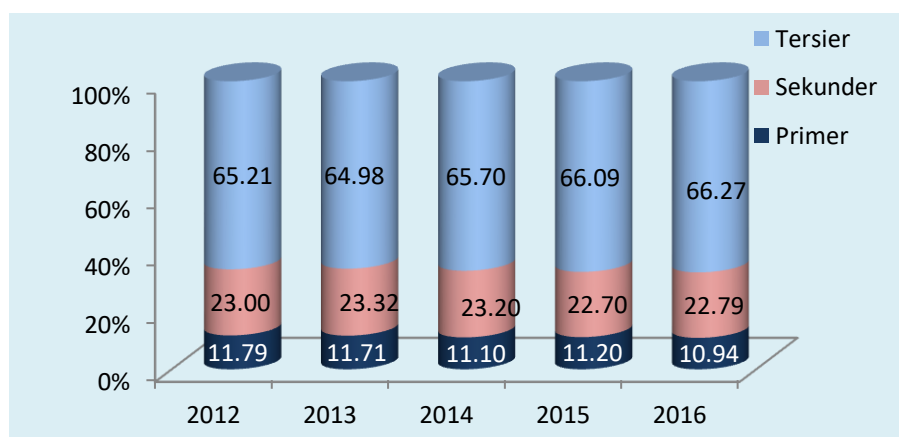
Enam kategori usaha ekonomi menjadi pelapis kedua dalam struktur ekonomi DIY, yaitu konstruksi, jasa pendidikan, jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, perdagangan dan reparasi mobil dan motor, informasi dan komunikasi, dan real estat. Kontribusi masing-masing kategori berkisar antara 7 sampai dengan 9 persen.

Melihat tiga kategori usaha sebagai penyumbang utama dan enam kategori pada kelompok pelapis kedua tersebut memperlihatkan bahwa struktur perekonomian DIY menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Kondisi ini juga selaras dengan Visi DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**. Demikian pula dikaitkan kondisi ekonomi DIY tersebut juga mempunyai keterpaduan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**.

Berdasarkan sifat output barang yang dihasilkan, 17 kategori lapangan usaha PDRB dapat diagregasi dalam tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Disebut sektor primer bila outputnya masih tergantung pada sumber daya alam. Yang termasuk sektor primer adalah lapangan usaha pertanian dan pertambangan. Lapangan usaha yang input utamanya berasal dari sektor primer disebut sektor sekunder. Yang termasuk sektor sekunder ini adalah lapangan usaha industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air; dan konstruksi. Sementara lapangan usaha lainnya, yaitu perdagangan dan reparasi mobil dan motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estat; jasa perusahaan; jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan; dan jasa lainnya dikelompokkan ke dalam sektor tersier.

Selama lima tahun terakhir, komposisi kelompok sektor penyusun PDRB relatif sama. Proporsi sektor primer dan sektor sekunder terhadap total PDRB cenderung semakin berkurang, sebaliknya sektor tersier semakin besar proporsinya karena mengambil alih pengurangan peran sektor primer dan sekunder tersebut. Pada tahun 2016 sektor tersier memegang peran 66,27 persen dari total PDRB.

Gambar 4.2 Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor, 2012- 2016 (persen)



Pergeseran perubahan struktur ekonomi terjadi secara pelan namun pasti. Dulunya lapangan usaha pertanian menjadi andalan namun semakin tergeser. Demikian pula peran lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga semakin berkurang, apalagi ada Peraturan Daerah (Perda) yang melarang penggalian pasir tanpa izin di Sungai Progo semakin menambah terdesaknya mata pencaharian usaha penggalian.

Kecenderungan menurunnya peran kategori (lapangan usaha) di kelompok sektor primer juga terjadi di kelompok sektor sekunder. Keseluruhan lapangan usaha yang tergabung dalam kelompok sektor sekunder (empat lapangan usaha) kontribusinya cenderung semakin menurun.

Penurunan kontribusi yang terjadi pada sektor primer dan sektor sekunder menyebabkan meningkatnya kontribusi sektor tersier. Kecenderungan meningkatnya peran sektor tersier terutama terjadi pada tujuh lapangan usaha dari sebelas lapangan usaha di sektor tersier. Penguatan peran paling konsisten terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dan bila dilihat golongan pokoknya bersumber pada golongan usaha penyediaan makan minum, seperti restoran, warung makan, kedai makan dan minum, dan sejenisnya.

B. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*) menunjukkan tingkat keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari besaran PDRB atas dasar harga berlaku, maka laju pertumbuhan ekonomi tersebut dianggap kurang pas karena dalam PDRB harga berlaku masih terkandung perubahan harga. Oleh karena itu agar PDRB dapat mengukur laju pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya (*the real economic growth*), maka pengaruh perubahan harga-harga dalam PDRB perlu dihilangkan, dan kondisi ini dapat tercapai dengan melakukan penghitungan laju pertumbuhan ekonomi dari PDRB atas dasar harga konstan. Oleh karena itu seperti dijelaskan dalam metodologi, laju pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain untuk menghilangkan faktor kenaikan harga dalam penghitungan laju pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan capaian keberhasilan pembangunan secara makro dan digunakan sebagai tolok ukur dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan serta intervensi kebijakan. Laju dan andil pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari indikator ekonomi yang dapat diamati menurut kategori maupun dari sisi penggunaan nilai tambah serta secara spasial antarwilayah kabupaten/kota.

1. Pertumbuhan menurut Kategori

PDRB dengan seri penghitungan 2010 sudah mengaplikasikan SNA2008. Salah satu implikasinya adalah adanya perubahan nomenklatur penggolongan maupun penggunaan istilah dari sektor menjadi industri atau kategori atau masih bisa juga menggunakan istilah lapangan usaha.

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2016 sebesar 5,05 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun 2015 yang hanya sebesar 4,95 persen. Kondisi perekonomian yang selalu melambat tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2016 ini mulai membaik. Tingginya laju pertumbuhan pada tahun 2016 diakibatkan oleh tingginya pertumbuhan semua lapangan usaha dengan peningkatan pertumbuhan yang cukup besar pada kategori industri pengolahan, pengadaan listrik dan kategori informasi dan komunikasi.

Tabel 4.2. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori di DI Yogyakarta 2012–2016, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2012-2016, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2016 (persen)

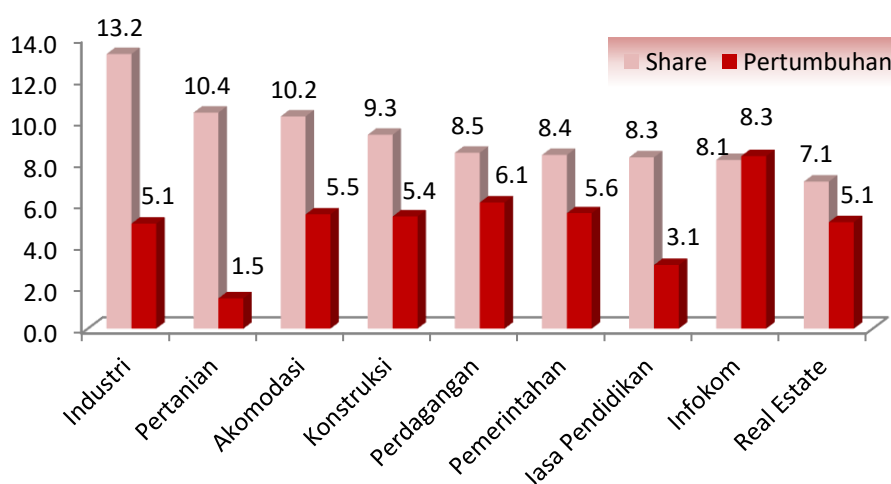
Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}	Rata-rata 2012-2016	Andil Pertumbuhan 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	5,13	2,26	-2,10	2,11	1,46	0,92	0,13
2. Pertambangan & Penggalian	1,67	3,92	2,11	0,13	0,42	1,63	0,00
3. Industri Pengolahan	-2,84	6,87	3,82	2,13	5,07	4,46	0,65
4. Pengadaan Listrik, Gas	10,20	6,08	6,83	2,19	14,26	7,25	0,02
5. Pengadaan Air	3,46	0,95	3,91	2,90	2,36	2,52	0,00
6. Konstruksi	4,46	4,94	5,65	4,24	5,42	5,06	0,51
7. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,66	5,26	5,69	6,19	6,09	5,81	0,51
8. Pengangkutan & Pergudangan	4,73	6,10	3,80	3,73	4,61	4,56	0,25
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,82	7,13	6,79	5,77	5,51	6,30	0,52
10. Informasi dan Komunikasi	10,74	6,22	6,13	5,11	8,32	6,44	0,89
11. Jasa Keuangan	3,23	11,50	8,27	8,27	4,98	8,23	0,18
12. Real Estat	8,88	4,01	7,77	6,05	5,14	5,73	0,37
13. Jasa Perusahaan	7,99	3,27	7,61	7,31	3,43	5,38	0,04
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,49	4,94	5,90	5,57	5,57	5,50	0,42
15. Jasa Pendidikan	5,26	4,58	7,91	7,28	3,07	5,69	0,27
16. Jasa Kesehatan	9,18	7,00	7,65	7,15	4,52	6,57	0,12
17. Jasa Lainnya	4,28	4,86	5,29	8,00	5,70	5,96	0,16
PDRB	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,16	5,05

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

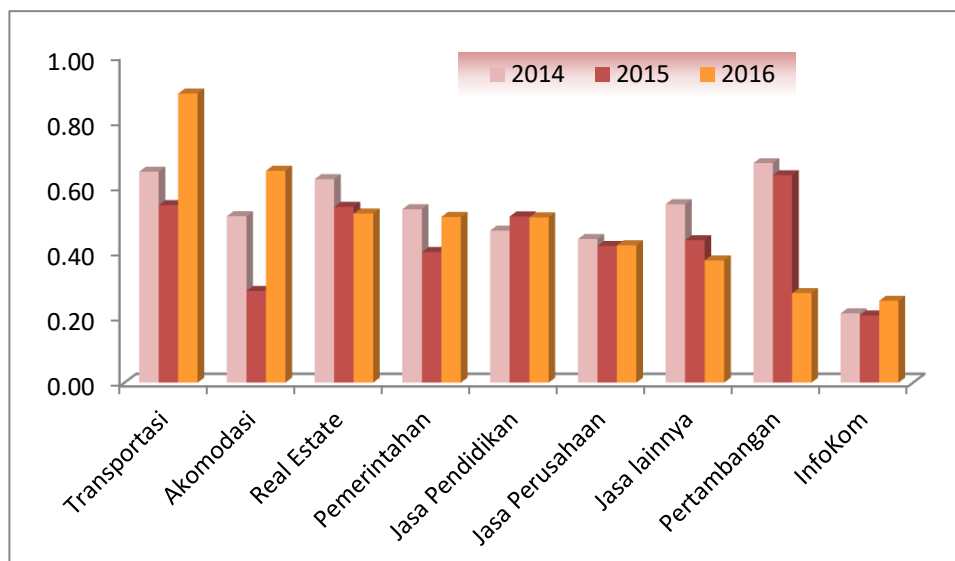
Pada tahun 2016, kategori-kategori yang berada di kelompok sektor tersier menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih cepat meskipun laju pertumbuhan tertinggi berada pada sektor sekunder yaitu pengadaan listrik dan gas. Kategori lainnya dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi adalah informasi dan komunikasi dan kategori perdagangan dan reparasi mobil dan motor.

Grafik 4.3. Pangsa Distribusi dan Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha 2016



Potensi ekonomi daerah dapat juga dilihat dari pangsa distribusi yang dikaitkan dengan pertumbuhannya seperti yang terlihat pada Gambar 4.3. Kategori Pengadaan listrik dan gas meskipun memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016, namun kategori ini tidak berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki share yang sangat kecil terhadap perekonomian DI. Yogyakarta. Kategori yang memiliki potensi besar adalah industri pengolahan yang memiliki share paling besar dengan pertumbuhan yang juga relatif tinggi. Namun kategori ini juga ada keterbatasan karena industri yang berkembang adalah industri berskala kecil menengah dengan kemampuan produksi yang terbatas. Meskipun kategori pertanian memberikan sumbangan besar namun banyaknya alih fungsi lahan dan keterbatasan luas area pertanian menjadi kendala dalam pengembangan potensi ini. Kategori yang sangat potensi berkembang adalah informasi dan komunikasi yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi disamping juga memberikan sumbangan yang besar terhadap total ekonomi.

Grafik 4.4. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha 2014-2016



Diamati lebih lanjut peran masing-masing kategori terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dapat dilihat dari andil pertumbuhannya. Masing-masing lapangan usaha memberikan andil yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2016. Berbeda dengan potensi yang dimiliki, kategori yang memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2016 yang sebesar 5,05 persen adalah kategori transportasi dengan andil sebesar 0,89 persen. Selanjutnya diikuti oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori real estate dengan andil masing-masing sebesar 0,65 persen dan 0,52 persen. Kategori lainnya yang memberikan andil diatas 0,5 persen adalah administrasi pemerintahan dan kategori jasa pendidikan yang masing-masing mempunyai andil sebesar 0,51 persen. Kategori pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk hanya mampu memberikan andil bagi pertumbuhan tahun 2016 sebesar 0,13 persen.

2. Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota

Wilayah DIY yang secara administrasi terdiri dari empat kabupaten dan satu kota menunjukkan bahwa DIY dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia luasnya relatif kecil. Meskipun nilai PDRB mempunyai besaran nilai yang berbeda-beda, namun pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY pada tahun 2016 berada pada kisaran 4,7 - 5,3 persen. Dibanding tahun sebelumnya, kesenjangan pertumbuhan antar kabupaten/kota semakin menyempit. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Kabupaten Sleman, yakni sebesar 5,27 persen, kemudian diikuti Kota Yogyakarta dan Bantul yang tumbuh sebesar 5,11 persen dan 5,06 persen. Urutan keempat dan kelima adalah kabupaten Gunungkidul dan kabupaten Kulon Progo yang tumbuh masing-masing sebesar 4,89 persen dan 4,76 persen.

Dilihat dari sisi kemampuan wilayah, perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah mencapai 46,63 persen dari luas wilayah DIY, nilai total PDRB yang dihasilkan di tahun 2016 sebesar 15,0 triliun rupiah atau 13,63 persen dari total PDRB DIY. Kulon Progo yang luas wilayahnya sebesar 18,40 persen dari luas wilayah DIY hanya mampu menggali total PDRB sebesar 8,3 triliun rupiah, dengan persentase terhadap total PDRB DIY terendah yaitu 7,46 persen. Kabupaten Sleman yang luasnya 18,04 persen dari luas wilayah DIY menghasilkan total PDRB sebesar 37,04 triliun rupiah atau sekitar 33,68 persen dari total PDRB DIY. Kabupaten Bantul pada tahun 2016 memberikan sumbangan terhadap PDRB DIY sebesar 18,54 persen atau sebesar 20,92 triliun rupiah. Sementara itu Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 1,02 persen dari luas wilayah DIY, namun karena merupakan pusat kegiatan ekonomi selain pertanian dan penggalian, memberikan sumbangan sebesar 28,92 triliun rupiah atau sekitar 26,30 persen terhadap total PDRB DIY.

Pertumbuhan ekonomi Sleman memberikan andil pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,77 persen terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2016 yang sebesar 5,05 persen,. Selanjutnya diikuti sumbangan dari Kota Yogyakarta sebesar 1,37 persen, dan Bantul sebesar 0,95 persen. Aktivitas ekonomi yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul sudah mulai menggeliat dan memberikan peran terhadap pertumbuhan ekonomi DIY masing-masing sebesar 0,36 dan 0,65 persen.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DI Y 2012–2016, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2012-2016 dan Andil Pertumbuhan 2016 (persen)

Kabupaten/ Kota/ Provinsi	2012	2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata 2012-2016	Andil Pertumbuhan 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Kulonprogo	4,37	4,87	4,57	4,62	4,76	4,71	0,36
2. Bantul	5,33	5,46	5,04	4,97	5,06	5,13	0,95
3. Gunungkidul	4,84	4,97	4,54	4,82	4,89	4,80	0,65
4. Sleman	5,79	5,89	5,30	5,28	5,27	5,43	1,77
5. Yogyakarta	5,40	5,47	5,28	5,09	5,11	5,24	1,37
Jumlah	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,16	5,05

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta
Ket: * angka sementara; ** angka sangat sementara

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Data penduduk yang digunakan adalah hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2020.

Nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku tahun 2016 mengandung arti bahwa bila total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk maka rata-rata setiap penduduk mendapatkan bagian sebesar 29,59 juta rupiah setahun (Tabel 4.4). Sementara bila dihitung berdasarkan harga konstan, maka rata-rata setiap penduduk memperoleh bagian sebesar 23,57 juta rupiah setahun. Berdasarkan harga konstan tahun 2010, nilai PDRB per kapita riil juga mencerminkan bahwa terciptanya PDRB DIY sebesar 110,10 triliun rupiah jika dibagi rata untuk setiap penduduk maka setiap bulannya setiap penduduk memperoleh bagian sekitar 2,47 juta rupiah. Namun demikian dalam konteks kehidupan sosial ekonomi distribusi pendapatan tidaklah terbagi merata seperti dalam hitungan matematis. Oleh

karena itu perlu peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan agar kesenjangan distribusi pendapatan tidak semakin menganga.

Tabel 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita D.I. Yogyakarta, 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh. berlaku (juta rupiah)	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341
PDRB adh. konstan 2000 (juta rupiah)	71.702.449	75.627.450	79.536.082	83.474.441	87.687.927
Penduduk pertengahan tahun (orang)*	3.552.462	3.594.854	3.637.116	3.679.176	3.720.900
PDRB per kapita adh. Berlaku:(rupiah)	21.744.880	23.623.920	25.526.402	27.573.470	29.589.170
PDRB per kapita adh. konstan 2000 (rupiah)	20.183.875	21.037.697	21.867.898	22.688.352	23.566.322
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	6,94	8,64	8,05	8,02	7,31
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	4,11	4,23	3,95	3,75	3,87

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Ket : *) Hasil Backcasting dan Proyeksi SP 2010

D. Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) dan Inflasi PDRB (Indeks Harga Implisit)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kebijakan ekonomi makro yang berdampak luas terhadap aktivitas berbagai sektor ekonomi yang melingkupinya. Indeks harga secara sederhana adalah perbandingan antara harga dari suatu paket komoditas dalam suatu kelompok barang atau jasa (*market basket*) pada suatu periode waktu terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan. Persentase perubahan IHK yang diamati dari periode ke periode inilah yang dikenal sebagai inflasi. Inflasi ini merupakan gambaran perkembangan harga yang dibeli di tingkat konsumen.

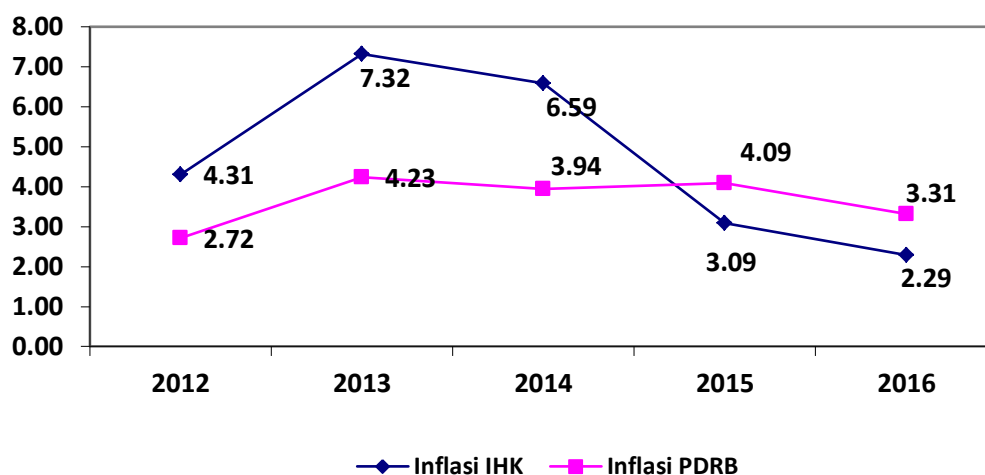
Satu jenis inflasi yang lain adalah inflasi yang diturunkan dari indeks harga implisit PDRB (selanjutnya disebut inflasi PDRB), yaitu ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai rasio PDRB nominal terhadap PDRB riil dikali dengan 100. Inflasi PDRB ini dapat dipandang sebagai gambaran perkembangan harga di tingkat produsen.

Meskipun kedua inflasi mencerminkan perkembangan harga, namun antara inflasi IHK dan inflasi PDRB ada beberapa perbedaan yang mendasar, terutama dalam hal metode penghitungannya. Perbedaan pertama adalah inflasi PDRB mencerminkan harga semua barang dan jasa **yang diproduksi di wilayah domestik**, sedangkan inflasi IHK menghitung harga berbagai barang dan jasa baik produk domestik maupun impor **yang dibeli** oleh konsumen.

Inflasi IHK dihitung dari perubahan harga sekeranjang belanjaan barang dan jasa (398 komoditas) yang **tetap** di wilayah perkotaan (Yogyakarta) pada suatu periode/tahun dengan harga di tahun dasar (2012). Barang dan jasa tersebut masing-masing mempunyai bobot yang telah ditentukan melalui survei biaya hidup (SBH) mengenai komposisi komoditas yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Survei terakhir yang dilaksanakan BPS pada tahun 2012 sehingga harga pada tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun dasar penghitungan. Inflasi PDRB membandingkan harga berbagai barang dan jasa yang **diproduksi saat ini** di wilayah perkotaan dan pedesaan dengan harga barang dan jasa yang sama pada tahun dasar 2010. Dengan demikian, jumlah barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung inflasi PDRB dapat berubah atau menyesuaikan diri secara otomatis dari waktu ke waktu.

Inflasi IHK tahun kalender 2016 merupakan tingkat perubahan IHK Umum pada posisi bulan Desember tahun 2016 dibandingkan dengan IHK Umum bulan Desember tahun 2015. Inflasi PDRB tahun 2015 merupakan perubahan harga rata-rata di tingkat produsen pada tahun 2016 dibandingkan dengan rata-rata harga produsen pada tahun 2015. Analogi ini digunakan untuk penghitungan periode-periode yang lain.

Gambar 4.5 Inflasi IHK dan Inflasi PDRB D.I.Yogyakarta, 2012-2016 (persen)



Berdasar Gambar 4.5 terlihat bahwa perkembangan kedua jenis angka inflasi dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang berbeda. Gejolak harga konsumen lebih mudah berfluktuasi karena gejolak harga di tingkat konsumen langsung dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Fluktuasi yang terjadi pada angka inflasi IHK biasanya dipengaruhi oleh kondisi stok barang dan jasa serta proses distribusinya. Stok barang dan jasa kebutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh penyediaan dan kelancaran distribusi dari produsen pada musim panen. Pada musim panen raya barang-barang kebutuhan pangan stok barang mungkin melimpah sehingga mengakibatkan harga barang di tingkat produsen dan konsumen akan turun. Kondisi sebaliknya bisa terjadi yaitu bila tidak ada pasokan dari produsen maka stok barang menipis sementara permintaan tidak berkurang atau bahkan

bertambah sehingga mengakibatkan naiknya harga barang-barang atau jasa. Faktor lain bisa terjadi bila muncul gangguan pada jalur distribusi barang dan jasa, maka secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi naik turunnya harga barang dan jasa terutama kebutuhan pokok pangan, seperti: beras, minyak goreng, dan sayur-sayuran sehingga dampaknya berpengaruh pada meningkatnya angka inflasi. Di samping itu potensi naik turunnya inflasi IHK juga sangat dipengaruhi suplai barang dan jasa pokok nonpangan lainnya, seperti: bahan bakar minyak, gas, dan juga nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

E. Indeks Perkembangan Kategori

Indeks perkembangan merupakan gambaran perkembangan nilai tambah tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks perkembangan sektoral dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui sektor-sektor mana yang berkembang cepat, lambat atau bahkan menurun sejak tahun dasar (2010). Selanjutnya, dengan menelusuri besaran indeks ini akan dapat diketahui sektor yang prospektif pada masa yang akan datang.

Sampai dengan tahun 2016 kategori jasa keuangan di D.I. Yogyakarta memiliki indeks perkembangan atas dasar harga berlaku terbesar, yaitu 213,12. Indeks ini menunjukkan bahwa lapangan usaha jasa keuangan mampu berkembang lebih dua kali lipat dalam waktu lima tahun terakhir. Indeks perkembangan ini belum terbebas dari pengaruh kenaikan harga. Sementara jika dilihat indeks perkembangan atas dasar harga konstan yang telah terbebas dari pengaruh inflasi, maka indeks perkembangan kategori jasa keuangan juga merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 157,71 (Tabel 4.5).

Dalam periode lima tahun terakhir, 2012-2016, kategori informasi dan komunikasi berkembang cukup cepat mengikuti kategori jasa keuangan. Berdasarkan harga konstan kategori informasi dan komunikasi mampu berkembang 155,72 persen lebih besar dibanding tahun 2010. Sementara itu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum berdasarkan harga berlaku berkembang cepat, yaitu 196,08 persen, tetapi berdasar harga konstan hanya sebesar 144,15 persen. Level perkembangan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum secara riil (atas dasar harga konstan) di bawah kategori-kategori berikut: informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Dengan kata lain, laju perkembangan riil nilai tambah barang dan jasa kategori-kategori ini melampaui kategori penyediaan akomodasi dan makan minum.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dan juga kategori pertambangan dan penggalan mempunyai ciri perkembangan cepat pada kondisi harga berlaku, namun termasuk lambat untuk laju perkembangan riil nilai tambah barang dan jasanya.

**Tabel 4.5. Indeks Perkembangan PDRB D.I.Yogyakarta menurut Kategori, 2012-2016
(2010=100)**

Lapangan Usaha	PDRB Berlaku					PDRB Konstan				
	2012	2013	2014	2015*)	2016**)	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	119,14	130,28	134,70	148,83	157,96	103,42	105,76	103,54	105,72	107,27
Pertambangan dan Penggalian	114,86	121,72	132,18	140,92	145,84	109,08	113,35	115,74	115,89	116,37
Industri Pengolahan	111,14	125,48	136,89	144,36	157,86	102,39	109,43	113,61	116,03	121,91
Pengadaan Listrik, Gas	96,05	91,20	107,62	124,58	149,68	116,40	123,48	131,91	134,81	154,03
Pengadaan Air	109,22	117,78	134,90	144,13	150,79	103,79	104,77	108,86	112,02	114,66
Konstruksi	118,88	130,36	141,07	153,63	166,36	109,53	114,93	121,43	126,58	133,43
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124,62	134,82	149,25	162,10	181,33	114,22	120,24	127,08	134,95	143,16
Pengangkutan & Pergudangan	116,57	130,98	145,50	157,87	171,24	108,86	115,49	119,89	124,36	130,09
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125,49	144,32	162,44	180,89	196,08	112,90	120,95	129,16	136,62	144,15
Informasi dan Komunikasi	118,55	122,44	127,70	133,30	144,84	121,32	128,87	136,77	143,76	155,72
Jasa Keuangan	132,33	155,64	176,82	197,72	213,12	114,93	128,15	138,75	150,23	157,71
Real Estat	120,70	129,28	144,44	158,21	173,58	113,75	118,31	127,50	135,22	142,17
Jasa Perusahaan	115,72	118,40	132,37	145,10	154,35	115,09	118,86	127,90	137,24	141,95
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	124,15	140,29	156,82	175,38	192,92	112,48	118,04	125,00	131,97	139,32
Jasa Pendidikan	117,25	125,57	140,03	158,41	167,43	113,28	118,47	127,83	137,14	141,36
Jasa Kesehatan	125,22	136,01	147,81	165,80	179,47	116,30	124,43	133,95	143,52	150,01
Jasa Lainnya	115,02	124,60	136,50	150,26	163,95	111,41	116,82	123,00	132,84	140,42
PDRB	119,43	131,30	143,54	156,85	170,22	110,86	116,93	122,97	129,06	135,57

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

F. Perbandingan Nilai PDRB Antar Kabupaten/Kota

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memiliki luas wilayah sekitar 3.185,8 km² terbagi ke dalam 5 (lima) wilayah administratif kabupaten/kota, yaitu:

1. Kabupaten Kulonprogo
2. Kabupaten Bantul
3. Kabupaten Gunungkidul
4. Kabupaten Sleman
5. Kota Yogyakarta.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota mempunyai hak dalam hal mengatur kebijakan fiskal dan menentukan arah pembangunan. Hal ini menyebabkan perkembangan kinerja perekonomian daerah/wilayah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pembuat kebijakan (*decision maker*) di tingkat kabupaten/kota.

Dalam menganalisis perekonomian makro suatu daerah dapat mengacu pada analisis perekonomian nasional. Meskipun demikian perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan prinsip yang menyebabkan analisis perekonomian nasional tidak dapat diterapkan secara mutlak di tingkat regional. Satu hal yang secara nyata membedakan *region* dengan *nation* adalah bahwa *region* tidak mempunyai kedaulatan sebagaimana *nation*. Hal ini menyebabkan adanya **keterbukaan hubungan antar-region**, sehingga arus barang dan jasa antardaerah sangat bebas, tidak seperti *nation* di mana arus barang dan jasa dari dan ke luar negeri harus melalui pihak bea dan cukai. Keterbukaan antar-region ini menyebabkan teori ekonomi tertutup sangat muskil diterapkan pada tingkat regional. Di satu sisi, adanya keterbukaan antar-region memungkinkan hubungan spasial yang sangat kuat antar region. Adanya hubungan spasial menyebabkan perkembangan perekonomian suatu daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah di sekitarnya baik positif maupun negatif.

Tabel 4.6. Nilai PDRB Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2012 – 2016 (juta rupiah)

Kabupaten/Kota/	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	5.916.574	6.489.593	7.056.572	7.671.548	8.312.455
Bantul	14.510.832	16.138.755	17.682.925	19.325.203	20.924.970
Gunungkidul	10.545.355	11.530.341	12.557.371	13.798.657	14.982.055
Sleman	25.732.249	28.295.363	30.912.239	33.863.669	37.040.185
Kota Yogyakarta	20.536.856	22.537.792	24.664.286	26.792.641	28.915.782
DIY	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341

Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

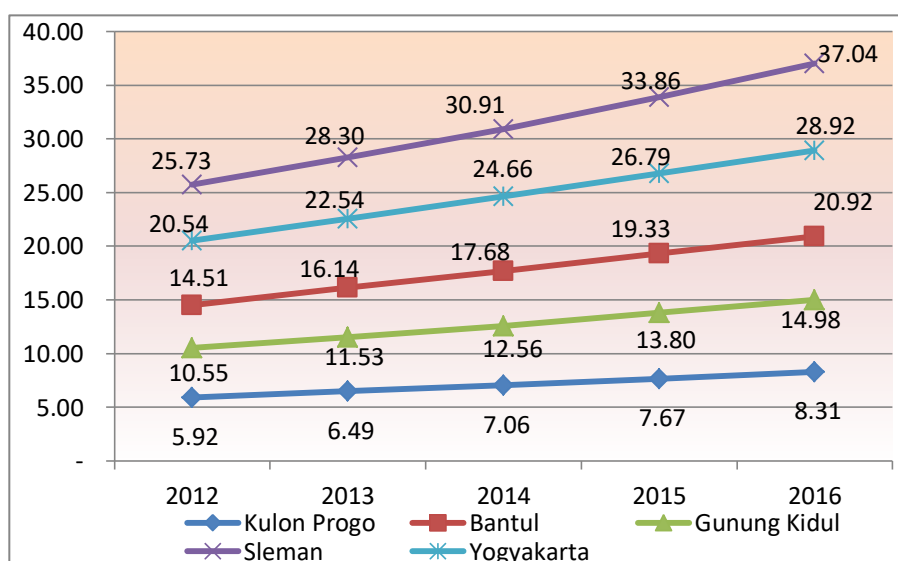
Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Untuk menganalisis kinerja perekonomian kelima kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta memang tidak dapat dipisahkan dari **analisis spasial (tata ruang/geografis)**, karena kelima wilayah tersebut mempunyai keterkaitan erat secara sosial demografis. Untuk membandingkan perkembangan perekonomian makro secara relatif antardaerah, dapat dilakukan dengan melihat besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota sebagai indikator makro.

Tabel 4.6 di atas memperlihatkan perbandingan nilai nominal PDRB antarwaktu dan antardaerah. Sebagai daerah penyanggah utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata

Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sleman masih memiliki potensi terus berkembang lebih cepat, sementara Kota Yogyakarta perkembangannya sudah mengarah ke titik jenuh. Bantul sebagai penyanggah kedua wilayah perkotaan juga berkembang relatif cepat. Sementara Kulon Progo dan Gunungkidul belum ada sektor penggerak loncatan pertumbuhan ekonomi sehingga perkembangan ekonomi kedua wilayah ini masih memerlukan suntikan investasi yang cukup besar untuk memacu roda perekonomiannya.

Gambar 4.6 Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2012 - 2016 (triliun rupiah)



Dari Gambar 4.6 terlihat bahwa selama periode tahun 2012-2016, kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata DIY. Sementara untuk Kabupaten Bantul berada pada level dekat dengan nilai rata-rata DIY. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan penopang utama perekonomian di DIY. Sementara kinerja ekonomi Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masih di bawah rata-rata DIY dan jarak dengan rata-rata DIY juga masih relatif besar.

Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2016 masih menempati urutan keempat besarnya nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian. Sementara lapangan usaha pertanian yang diusahakan di lahan pertanian pegunungan berbatu relatif lebih sulit untuk memacu produktivitas komoditas pertaniannya, perlakuannya tidak seperti di lahan pertanian subur. Kota Yogyakarta dengan luas wilayah dan juga jumlah penduduk terkecil mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar (urutan kedua). Sebagai ibu kota DIY, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih maju, sehingga semua aktivitas ekonomi tersedia, kecuali pertanian dan penggalian.

Tabel 4.7. Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2016^{*}) (juta rupiah)**

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	1.658.813	3.010.874	3.787.293	2.986.139	46.845
Pertambangan dan Penggalian	115.602	128.516	195.600	153.377	1.087
Industri Pengolahan	1.014.200	3.175.266	1.405.322	4.983.491	3.954.959
Pengadaan Listrik, Gas	6.824	26.436	12.444	38.681	57.415
Pengadaan Air	11.196	17.044	24.682	18.493	43.863
Konstruksi	710.844	1.943.455	1.407.758	3.960.104	2.265.492
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.131.565	1.770.132	1.381.432	2.887.700	2.130.472
Pengangkutan & Pergudangan	669.411	1.002.784	755.287	2.691.432	1.155.211
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	324.991	2.442.216	883.857	3.803.368	3.863.756
Informasi dan Komunikasi	413.772	1.519.508	1.051.970	2.961.885	2.999.250
Jasa Keuangan	271.629	590.450	346.868	1.205.542	1.943.984
Real Estat	281.442	1.376.057	528.959	2.923.612	2.664.981
Jasa Perusahaan	23.425	100.785	64.966	618.776	311.413
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	760.655	1.571.240	1.405.268	2.520.299	2.972.108
Jasa Pendidikan	491.523	1.449.028	928.759	3.576.688	2.689.907
Jasa Kesehatan	119.451	387.703	299.359	868.505	1.085.553
Jasa Lainnya	307.111	413.475	502.231	842.094	774.487
PDRB	8.230.734	21.161.936	15.001.433	37.084.735	28.959.896

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Komposisi struktur ekonomi masing-masing daerah menurut kategori menarik untuk dicermati karena dapat mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi antar kabupaten/kota. Struktur dan kontribusi kategori PDRB menurut lapangan usaha kabupaten/kota dapat dilihat di Tabel 4.6 -4.9. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Produk komoditas-komoditas pertanian unggulan DIY berasal dari tiga kabupaten ini, seperti: padi, pisang, cabai, bawang merah, kelapa, kakao, dan lain-lain. Sementara di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Bantul, Sleman, dan Yogyakarta selain merupakan daerah pusat bisnis dari supermarket, *hipermart*, rumah pertokoan, hotel, dan bisnis hiburan, juga menjadi sentra industri yang sebagian besar adalah industri kecil menengah. Sebagian besar industri besar-sedang yang jumlahnya lebih dari 300 perusahaan lokasinya berada di daerah ini, di samping industri kecil yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Tabel 4.8. Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2012, 2014, 2016 (persen)

Kabupaten/kota	Sektor Dominan	Kontribusi		
		2012	2014	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Pertanian	21,22	20,44	19,96
	2. Perdagangan	13,33	13,16	13,61
	3. Industri Pengolahan	11,70	12,36	12,20
Bantul	1. Industri Pengolahan	15,12	15,50	15,17
	2. Pertanian	15,38	14,46	14,39
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,32	11,38	11,67
Gunungkidul	1. Pertanian	26,92	25,09	25,28
	2. Konstruksi	9,52	9,54	9,40
	3. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,82	9,29	9,38
Sleman	1. Industri Pengolahan	13,85	13,95	13,45
	2. Konstruksi	11,24	10,89	10,69
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,70	9,98	10,27
Yogyakarta	1. Industri Pengolahan	13,76	14,21	13,68
	2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,92	12,88	13,36
	3. Informasi dan Komunikasi	12,59	10,83	10,37

Keterangan: **) Angka sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Pencapaian PDRB yang tinggi idealnya disertai pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Bila tidak maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Walaupun indikator pemerataan pendapatan yang akurat sangat sulit diperoleh, namun indeks gini dan PDRB per kapita dapat digunakan untuk melihat pendekatan seberapa besar tingkat pemerataan distribusi pendapatan daerah kepada penduduknya. Konsep dan makna angka PDRB per kapita telah dijelaskan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan indeks gini akan dibahas lebih jauh di Bab 6.

Berdasarkan hitungan nilai PDRB per kapita antar kabupaten/kota di DIY diperoleh gambaran kesenjangan angka PDRB per kapita antar daerah. Sampai dengan tahun 2016 Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu 69,22 juta rupiah (Tabel 4.9). Tingginya angka PDRB per Kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai total PDRB-nya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya relatif sedikit. Sementara itu Sleman yang mempunyai nilai total PDRB tertinggi, angka PDRB per kapita Sleman jauh di bawah Kota Yogyakarta karena penduduk Sleman cukup besar yaitu hampir tiga kali lipat penduduk Kulon Progo. PDRB per kapita Kabupaten Sleman besarnya 1,6 kali lipat PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo. Sementara bila dibandingkan dengan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul maka PDRB per kapita Kabupaten Sleman sebesar 1,5 kali lipat PDRB per kapita kedua kabupaten tersebut.

Tabel 4.9. Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2012 - 2016 (rupiah)

Kabupaten/Kota/	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	14.840.706	16.096.061	17.307.864	18.611.318	19.949.109
Bantul	15.525.020	17.040.684	18.430.369	19.891.904	21.275.441
Gunungkidul	15.226.212	16.467.422	17.741.562	19.291.212	20.737.011
Sleman	22.793.222	24.782.819	26.775.411	29.005.756	31.377.250
Yogyakarta	51.652.831	55.969.623	60.501.060	64.919.752	69.218.903
DIY	21.744.880	23.623.920	25.526.402	27.573.470	29.589.170

Keterangan: **) Angka sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

G. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi

Peran ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa terhadap ekonomi nasional cukup besar. Pada Tabel 4.10 terlihat bahwa provinsi-provinsi yang menduduki peringkat 4 besar adalah provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta (17,2 persen), Jawa Timur (14,65 persen), Jawa Barat (13,06 persen), dan Jawa Tengah (8,63 persen). Secara keseluruhan Pulau Jawa mempunyai andil dalam pembentukan PDB sebesar 58,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan dan jasa. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih banyak didominasi oleh aktivitas industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Selanjutnya, sebagai pemegang kontribusi ekonomi terbesar ke 5 diduduki oleh Provinsi Riau (5,39 persen). Beberapa provinsi kontribusi ekonominya bergerak melaju di bawah Riau, yaitu Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

Komposisi peringkat lima besar kontribusi PDRB terhadap PDB tidak ada perubahan dibanding tahun 2015. Namun besaran kontribusi dari lima provinsi tersebut terlihat ada sedikit pergeseran. Persentase sumbangan DKI naik 0,13 poin, Jawa Timur naik 0,12 poin, Jawa Barat turun 0,02 poin, Jawa Tengah turun 0,05 poin dan Riau turun 0,21 poin. Kontribusi Sumatera Utara naik 0,05 poin, dan sebaliknya dengan Kalimantan Timur turun sangat signifikan sebesar 0,31 poin. Kecenderungan menurunnya kontribusi beberapa provinsi tersebut diakibatkan meningkatnya aktivitas ekonomi di beberapa provinsi lain sebagai pertanda adanya pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia. Di samping itu adanya penurunan produksi migas menjadi salah satu penyebab turunnya share provinsi Riau dan Kalimantan Timur.

Tabel 4.10. Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2016

PROPINSI	2016				
	ADHB (Juta Rp)	ADHK (Juta Rp)	Pertum- buhan (%)	Kontribusi (%)	
				Thd Pulau	Thd 33 Prov
Sumatera	2.789.056.643,88	2.045.251.334,6	4,29	100,00	22,03
01. Aceh	137.277.419,64	116.386.730,6	3,31	4,92	1,08
02. Sumatra Utara	628.394.156,32	463.775.464,9	5,18	22,53	4,96
03. Sumatra Barat	195.682.525,01	148.110.750,5	5,26	7,02	1,55
04. Riau	682.351.091,85	458.998.092,7	2,23	24,47	5,39
05. Jambi	171.711.448,64	130.499.632,1	4,37	6,16	1,36
06. Sumatra Selatan	355.419.170,96	266.815.411,7	5,03	12,74	2,81
07. Bengkulu	55.402.507,51	40.082.870,8	5,30	1,99	0,44
08. Lampung	281.113.138,68	209.807.185,7	5,15	10,08	2,22
09. Kep. Bangka Belitung	65.125.286,62	47.852.691,8	4,11	2,34	0,51
10. Kepulauan Riau	216.579.898,65	162.922.503,8	5,03	7,77	1,71
Jawa	7.403.208.190,93	5.544.826.099,9	5,59	100,00	58,49
11. DKI Jakarta	2.177.119.883,78	1.539.376.654,4	5,85	29,41	17,20
12. Jawa Barat	1.652.589.443,18	1.275.546.477,2	5,67	22,32	13,06
13. Jawa Tengah	1.092.030.920,28	849.383.564,6	5,28	14,75	8,63
14. DI Yogyakarta	110.098.340,80	87.687.926,6	5,05	1,49	0,87
15. Jawa Timur	1.855.042.702,44	1.405.236.111,0	5,55	25,06	14,65
16. Banten	516.326.900,45	387.595.366,1	5,26	6,97	4,08
Bali dan Nusa Tenggara	395.795.678,22	291.516.430,6	5,89	100,00	3,13
17. Bali	195.376.307,98	137.192.524,6	6,24	49,4	1,54
18. Nusa Tenggara Barat	116.246.732,99	94.548.205,9	5,82	29,4	0,92
19. Nusa Tenggara Timur	84.172.637,26	59.775.700,1	5,18	21,3	0,66
Kalimantan	994.111.046,07	807.963.704,6	2,01	100,00	7,85
20. Kalimantan Barat	161.491.917,64	118.184.631,6	5,22	16,24	1,28
21. Kalimantan Tengah	112.441.204,71	83.909.489,4	6,36	11,31	0,89
22. Kalimantan Selatan	146.325.615,23	115.727.546,8	4,38	14,72	1,16
23. Kalimantan Timur	507.073.762,02	438.977.044,5	-0,38	51,01	4,01
24. Kalimantan Utara	66.778.546,48	51.164.992,3	3,75	6,72	0,53
Sulawesi	764.760.802,98	563.977.125,8	7,42	100,00	6,04
25. Sulawesi Utara	100.537.360,84	74.771.065,9	6,17	13,1	0,79
26. Sulawesi Tengah	120.232.866,52	91.070.553,9	9,98	15,7	0,95
27. Sulawesi Selatan	379.209.481,75	269.338.548,6	7,41	49,6	3,00
28. Sulawesi Tenggara	96.982.959,52	77.739.545,6	6,51	12,7	0,77
29. Gorontalo	31.823.646,81	23.507.152,7	6,52	4,2	0,25
30. Sulawesi Barat	35.974.487,54	27.550.259,1	6,03	4,7	0,28
Maluku dan Papua	311.233.726,71	245.035.149,7	7,45	100,00	2,46
31. Maluku	37.062.642,66	26.291.193,8	5,76	11,91	0,29
32. Maluku Utara	29.165.227,90	21.556.321,8	5,77	9,37	0,23
33. Papua Barat	66.635.513,21	54.711.282,2	4,52	21,41	0,53
34. Papua	178.370.342,93	142.476.351,9	9,21	57,31	1,41

Kontribusi PDRB D.I. Yogyakarta terhadap PDB nasional maupun terhadap PDRB Pulau Jawa mengalami penurunan. Kontribusi DIY 2016 di Pulau Jawa turun 0,04 poin yaitu menjadi 1,27 persen dan peringkatnya terendah di antara enam provinsi. Kontribusi terhadap 33 provinsi lainnya masih tetap yaitu sebesar 0,87 persen. Masih stabilnya kontribusi D.I. Yogyakarta tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi D.I.

Yogyakarta meskipun lumayan tinggi namun masih lebih rendah dari laju daerah yang mempunyai sumber daya alam seperti tambang.

Di tingkat regional Kawasan Jawa, Bali dan Nusa tenggara (JABALNUSRA), posisi PDRB D.I. Yogyakarta berada di atas NTT, tetapi sedikit di bawah NTB atau berada pada peringkat ke-8 di antara sejumlah 9 provinsi di kawasan Jabalnusra.

BAB 5

PDRB MENURUT PENGELUARAN

A. Struktur PDRB Pengeluaran

B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

BAB V

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

PDRB dapat dilihat dari 3 sisi yaitu dari sisi lapangan usaha atau produksi, dari sisi pengeluaran dan dari sisi pendapatan. Bab sebelumnya telah membahas mengenai PDRB dari sisi lapangan usaha atau produksi dan pada bab ini akan dibahas mengenai PDRB dari sisi pengeluaran (*expenditure*). PDRB menurut pengeluaran menjelaskan alokasi pengeluaran nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor produksi dari masing-masing pelaku ekonomi dalam bentuk barang konsumsi akhir (*final goods*). Komponen yang dihitung dalam PDRB menurut pengeluaran meliputi pengeluaran untuk konsumsi akhir baik rumah tangga, pemerintah maupun lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), ekspor netto yang merupakan ekspor dikurangi impor, serta perubahan inventori.

Untuk mengkaji sisi pengeluaran PDRB, akan dibahas terlebih dahulu mengenai konsep dan peranan pelaku ekonomi dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam sistem perekonomian sebagai satu kesatuan, pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok/institusi (Nellis dan Parker, 2003), yaitu:

1. Rumah tangga (termasuk lembaga nirlaba);
2. Pemerintah (*government*);
3. Korporasi (*firm*);
4. Jasa keuangan (*financial services*);
5. Kelompok luar daerah/luar negeri (*rest of the world/ROW*).

Masing-masing institusi tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi yang dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan perilakunya dalam sistem perekonomian.

Pada tingkat paling dasar, Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain. rumah tangga menyediakan sumber daya yang merupakan faktor produksi yang dibutuhkan oleh korporasi. Faktor produksi tersebut berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang akan dipergunakan oleh korporasi untuk memproduksi barang dan jasa. Sebagai imbalan atas penyediaan faktor produksi, rumah tangga akan menerima pembayaran dari korporasi berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan (*profit* dan *dividen*).

Selanjutnya, korporasi berperan untuk memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Barang dan jasa tersebut akan dikonsumsi lagi oleh rumah tangga, pemerintah, dan korporasi lain. Selain itu, produk dari korporasi tersebut juga dapat dipasarkan ke luar daerah maupun luar negeri. Pendapatan yang diperoleh korporasi tersebut kemudian akan dikembalikan lagi kepada rumah tangga dalam bentuk balas jasa atas faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Disamping mempekerjakan dan memberi balas jasa atas faktor produksi, korporasi juga memainkan peran vital dalam pembentukan investasi berupa pengadaan mesin dan peralatan, tanah dan bangunan, serta kapasitas produksi lainnya.

Pelaku ekonomi selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah berperan dalam menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti: melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan dan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur kebijakan perekonomian negara, dan lainnya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun demikian, pemerintah juga memberikan balas jasa berupa upah dan gaji kepada pegawainya yang merupakan bagian dari kelompok rumah tangga. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah juga akan memanfaatkan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Selain peran-peran tersebut pemerintah juga akan melakukan pembentukan modal dengan cara membangun infrastruktur jalan baru, jembatan, bangunan untuk sarana umum seperti: rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Pada akhirnya, pemerintah memungut pajak dari individu dan perusahaan untuk mendanai konsumsi pemerintah, termasuk pembayaran transfer kepada penduduk yang memerlukan berupa subsidi baik langsung maupun tidak langsung.

Meskipun jasa keuangan juga merupakan pelaku ekonomi namun kegiatan institusi ini biasanya dikelompokkan terpisah dari korporasi. Hal ini karena jasa keuangan tidak memproduksi output secara fisik tetapi berperan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Peranan kelompok ini adalah menyediakan layanan untuk menjembatani kepentingan antara penyedia dana/penabung (kreditur) dan peminjam (debitor). Penyedia dana tersebut bisa berasal dari rumah tangga, korporasi, pihak asing, dan badan-badan lainnya yang melayani publik. Sebagai pihak penyelenggara dan penyedia dana, institusi jasa keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun kelompok luar daerah/luar negeri memberikan sumbangan langsung dalam hal kegiatan transaksi ekspor dan impor, baik untuk transaksi dengan daerah lain maupun dengan pihak luar negeri. Meningkatnya ketergantungan antardaerah/negara karena dampak globalisasi (pasar bebas) menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan arus investasi yang masuk. Arus modal ini akan sangat berperan dalam menutup kekurangan

tabungan domestik yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun untuk mencukupi belanja konsumsi yang diperlukan penduduk.

A. Struktur PDRB Pengeluaran

1. Konsumsi Rumah Tangga

Perekonomian D.I. Yogyakarta sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2016, nilai konsumsi rumah tangga tercatat sebesar Rp 74,430 triliun dari total nilai PDRB DIY sebesar Rp110,098 triliun atau mencapai sekitar 67,6 persen. Dengan demikian terjadi penurunan porsi konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai sebesar 67,7 persen. Porsi konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi dalam pengeluaran PDRB disatu sisi menguntungkan karena permintaan domestik biasanya lebih stabil, sementara di sisi lain karena bersifat konsumtif dalam jangka panjang tidak akan menggerakkan investasi sebagai penggerak ekonomi yang ideal. (Tabel 5.1 dan Gambar 5.1).

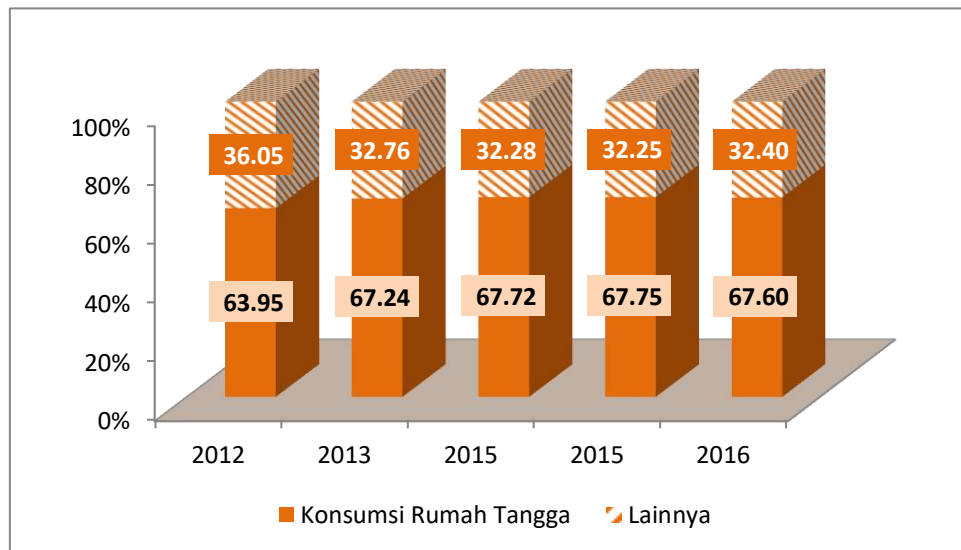
Tabel 5.1. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di DI Yogyakarta, 2012–2016 (juta rupiah)

Jenis Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	49.403.401	57.101.887	62.875.141	68.730.528	74.429.796
a. Makanan dan Minuman	20.500.299	24.497.671	26.694.388	28.969.375	31.378.592
b. Bukan Makanan	28.903.102	32.604.216	36.180.753	39.761.153	43.051.204
2. Pengeluaran konsumsi LNPR	2.096.682	2.457.182	2.948.427	3.171.193	3.220.070
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	11.982.950	13.629.834	15.347.428	17.214.154	18.441.762
4. Pembentukan modal tetap bruto	21.148.871	24.250.704	27.744.794	30.798.881	33.428.978
5. Perubahan Inventori	969.334	967.150	980.197	1.151.797	1.295.788
6. Ekspor Luar Negeri	3.268.160	4.224.512	5.465.423	6.266.265	6.495.282
7. Impor Luar Negeri	1.984.896	2.514.540	4.085.245	5.066.145	5.922.732
8. Net Ekspor Antardaerah	-9.636.641	-15.192.186	-18.433.682	-20.819.021	-21.290.602
P D R B	77.247.861	84.924.543	92.842.484	101.447.650	110.098.341

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara

Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY, 2012-2016



Dirinci menurut jenis barang yang dikonsumsi rumahtangga, selama periode 2012-2016 persentase konsumsi non makanan selalu lebih besar dibandingkan konsumsi makanan. Pada tahun 2016, porsi antara konsumsi makanan dan non makanan mencapai 28,50 persen dan 39,10 persen terhadap total PDRB tahun 2016 (Tabel 5.2). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 porsi konsumsi makan dan non makanan mengalami penurunan dibanding 5 tahun terakhir yang selalu memperlihatkan peningkatan. Dari tabel 5.2 terlihat bahwa sebagian besar komponen pengeluaran sumbangannya terhadap PDRB cenderung menurun, kecuali perubahan inventori, impor luar negeri dan net ekspor antar daerah. Artinya, penurunan konsumsi rumahtangga DIY beralih menjadi ekspor keluar daerah atau ke provinsi lain.

Tabel 5.2. Struktur PDRB menurut Pengeluaran di DIY, 2012 – 2016 (persen)

Jenis Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	63,95	67,24	67,72	67,75	67,60
a. Makanan dan Minuman	26,32	28,85	28,75	28,56	28,50
b. Bukan Makanan	37,89	38,39	38,97	39,19	39,10
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	2,71	2,89	3,18	3,13	2,92
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	15,53	16,05	16,53	16,97	16,75
4. Pembentukan modal tetap bruto	27,34	28,56	29,88	30,36	30,36
5. Perubahan Inventori	0,76	1,14	1,06	1,14	1,18
6. Ekspor Luar Negeri	4,64	4,97	5,89	6,18	5,90
7. Impor Luar Negeri	2,61	2,96	4,40	4,99	5,38
8. Net Ekspor Antardaerah	(12,58)	(17,89)	(19,85)	(20,52)	(19,34)
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

Kecenderungan meningkatnya impor luar negeri disatu sisi mengurangi cadangan devisa yang tersedia, namun disisi lain peningkatan impor berupa barang modal dapat meningkatkan produksi karena merupakan investasi. Net ekspor antar daerah juga meningkat yang disebabkan karena tingginya peningkatan ekspor barang dan jasa ke provinsi lain. Kondisi ini dapat mensubstitusi turunnya ekspor luar negeri akibat kondisi perekonomian global yang belum kondusif. Peningkatan ekspor antar daerah telah menjadi solusi menggerakkan ekonomi DIY pada saat ekspor luar negeri melemah, ini menjadi peluang baru bagi lapangan usaha khususnya usaha skala menengah kebawah yang belum bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Oleh karena itu kondisi ini semestinya menjadi cambuk bagi pelaku usaha produksi lokal untuk meningkatnya daya saing produknya.

2. Konsumsi Pemerintah

Dalam tatanan kehidupan bernegara, lembaga eksekutif pemerintah bukan hanya sebagai penyusun regulasi atau pembuat kebijakan untuk mengatur kehidupan bernegara namun juga sebagai pelaksana kegiatan ekonomi melalui instrumen belanja pemerintah. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat dibutuhkan baik sebagai penyelenggara pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun dalam bentuk intervensi program lainnya yang diperuntukkan membantu penduduk yang berpenghasilan rendah. Kegiatan-kegiatan tersebut selain membutuhkan anggaran yang tertuang dalam RAPBN(D), juga memerlukan biaya operasional yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau disingkat Konsumsi Pemerintah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB DIY atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp18,44 triliun pada tahun 2016 atau memberikan andil sebesar 16,75 persen terhadap PDRB. Selama periode 2012-2015, kontribusi konsumsi pemerintah terus meningkat meskipun kecenderungannya relatif datar, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 16,75 persen (Tabel 5.2). Indikasi ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian DIY cukup stabil, baik melalui kebijakan perencanaan maupun dalam implementasi tahapan pembangunan tahun demi tahun.

3. Investasi

Penanaman modal atau investasi diperlukan agar kesinambungan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Investasi baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun domestik digunakan untuk membiayai aktivitas kegiatan produksi barang dan jasa pada seluruh sektor ekonomi. Adanya kegiatan investasi baru akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat memberi peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan investasi selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peluang kerja yang diciptakan.

Dalam buku *A System of National Account (SNA)* yang diterbitkan oleh PBB (*United Nations*), dijelaskan bahwa realisasi investasi di suatu daerah/wilayah pada tahun tertentu sama dengan penjumlahan nilai pembentukan modal tetap (domestik) bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu secara kumulatif, sedangkan inventori (stok) menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, dapat berbentuk barang setengah jadi, atau bahkan input yang belum digunakan, dan barang jadi yang belum terjual. Untuk selanjutnya, jika disebut investasi fisik maka sudah merupakan gabungan/penjumlahan antara PMTB dan perubahan inventori.

Pada tahun 2016 nilai investasi fisik (PMTB) di DIY mencapai Rp33,43 triliun atau naik sekitar Rp2,6 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp30,80 triliun. Peningkatan tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang naik sekitar Rp3,1 triliun. Selama lima tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di DIY cukup pesat yang didorong oleh tingginya perkembangan lapangan usaha perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, keuangan, industri, informasi dan komunikasi serta jasa-jasa. Pertumbuhan komponen PMTB tahun 2016 sebesar 5,97 persen, peningkatan yang cukup tinggi dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh sebesar 4,3 persen, bahkan pertumbuhan ini merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Struktur PDRB menurut Pengeluaran tahun 2012 memperlihatkan bahwa sumbangan investasi fisik terhadap PDRB tercatat sebesar 27,34 persen naik menjadi 30,36 persen atau naik sekitar 3 poin di tahun 2016 (Tabel 5.3). Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat efisiensi penanaman modal di suatu daerah/wilayah, ukuran yang biasa digunakan adalah ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini merupakan rasio antara nilai investasi dengan pertambahan output dalam periode tertentu. Dalam tulisan ini, indikator ICOR yang dihitung adalah konsep ICOR dengan *time-lag* 0, artinya bahwa investasi yang ditanam pada tahun tertentu akan menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga. Untuk memudahkan perhitungan karena keterbatasan data yang tersedia, maka sebagai pendekatan ICOR digunakan ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*).

Dilihat dari angka ICVAR DIY dalam periode tahun 2012–2016, dapat dimaknai bahwa produktivitas dari investasi yang ditanamkan belum menunjukkan kecenderungan membaik. Jika pada tahun 2012 setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 5,48 persen, di tahun 2016 pertumbuhan kebutuhan investasi yang diperlukan lebih tinggi yaitu menjadi 5,85 persen. Angka ini dimaknai bahwa untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi satu persen pertumbuhan investasi yang diperlukan menjadi sebesar 5,85 persen. Pembahasan lebih rinci tentang ICOR dapat dilihat pada publikasi Analisis ICOR DIY.

Tabel 5.3. Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2012–2016

Uraian	2012	2013	2014	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PMTDB (juta rupiah)	21.148.871	24.250.704	27.744.794	30.798.881	33.428.978
(persen)	27,38	28,56	29,88	30,36	30,36
2. Perubahan Inventori (juta rupiah)	969.334	967.150	980.197	1.151.797	1.295.788
(persen)	1,25	1,14	1,06	1,14	1,18
3. PMTDB + Perubahan Inventori (juta rp)	22.118.205	25.217.854	28.724.991	31.950.678	34.724.766
(persen)	28,63	29,70	30,94	31,50	31,54
4. ICOR, Investasi = PMTDB (lag 0)	5,26	5,14	5,46	5,66	5,61
5. ICOR, Investasi = PMTDB + Perubahan Inventori (lag 0)	5,48	5,36	5,70	5,91	5,85

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, data diolah

Keterangan : Angka dalam kurung adalah *share* terhadap PDRB

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

4. Ekspor dan Impor

Salah satu misi pembangunan dalam RPJMD DIY 2012-2017 adalah mewujudkan pendidikan berkualitas dan mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. Hal ini mendorong peluang tumbuhkembangnya industri kerajinan khas DIY baik industri makanan/minuman maupun industri barang dan jasa lain. Sebagian produk industri tersebut menjadi komoditas ekspor. Sebaliknya, oleh karena Yogyakarta menjadi destinasi utama kegiatan wisata dan pendidikan, dampak kegiatan ekonomi yang timbul adalah DIY menjadi pusat pemasaran bagi produk-produk dari daerah lain.

Besaran absolut nilai ekspor luar negeri Provinsi DIY tahun 2016 tercatat sebesar 6,5 triliun rupiah. Pada periode 2012-2016 DIY mengalami surplus perdagangan luar negeri dengan nilai tertinggi dicapai pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,71 triliun rupiah. Di tahun 2016 surplus perdagangan luar negeri DIY hanya sebesar 573 milyar rupiah.

Transaksi perdagangan yang terjadi antara wisatawan dan pedagang dapat berpeluang membentuk jaringan pemasaran produk-produk domestik ke daerah-daerah lain. Produk sektor industri merupakan pangsa transaksi komoditas yang cukup dominan dalam kegiatan ekspor antarprovinsi, sedangkan jasa hotel, restoran, jasa angkutan, dan jasa informasi dan komunikasi yang dinikmati oleh wisatawan merupakan bentuk transaksi ekspor jasa.

Selama kurun waktu 2012-2016 nilai komponen net ekspor antarprovinsi DIY bernilai negatif. Artinya, nilai impor barang dan jasa yang dilakukan DIY melebihi nilai ekspor barang dan jasa. Hal ini menunjukkan ketergantungan DIY akan pasokan barang dan jasa dari luar provinsi, baik produk pertanian maupun hasil industri pengolahan lainnya.

B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

Kebijakan pertumbuhan ekonomi merupakan aspek terpenting dalam setiap perumusan kebijakan makro yang disusun oleh pemerintah, selain upaya untuk menekan laju inflasi, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, maupun menjaga stabilitas nilai tukar mata uang serta defisit neraca pembayaran (Nellis dan Parker, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Sebagai bagian dari sisi komponen pengeluaran PDRB konsumsi rumah tangga tahun 2016 mencatat pertumbuhan sebesar 4,82 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,74 persen. Menurut jenis pengeluaran, kelompok makanan pada tahun 2016 tumbuh sebesar 3,77 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,80 persen. Sementara itu pertumbuhan kelompok non makanan sebesar 5,47 persen lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,32 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk dan membaiknya pendapatan rumah tangga. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut pengeluaran yang lebih besar baik untuk konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan. Demikian pula membaiknya pendapatan rumah tangga akan mendorong permintaan yang lebih tinggi untuk barang dan jasa yang lebih berkualitas.

Tabel 5.4. Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY, 2012–2016 (persen)

Jenis Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	6,44	4,85	4,94	4,74	4,82
a. Makanan dan Minuman	5,31	2,36	2,71	3,70	3,70
b. Bukan Makanan	7,22	6,52	6,62	5,61	5,61
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	8,90	10,42	10,58	2,90	-1,13
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	5,91	5,90	4,35	5,50	2,11
4. Pembentukan modal tetap bruto	5,28	5,12	5,78	4,34	5,97
5. Perubahan Inventori	-1,02	3,44	11,78	4,73	7,24
6. Ekspor Luar Negeri	19,65	0,68	20,80	3,23	-0,35
7. Impor Luar Negeri	26,27	17,87	44,03	15,49	20,48
8. Net Ekspor Antardaerah	16,36	-4,42	1,42	-5,39	-16,10
P D R B	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

BAB 6

POTENSI DAN KUALITAS INDIKATOR PERTUMBUHAN PDRB

- A. Perkembangan Indikator Utama Ekonomi D.I.
Yogyakarta
- B. Posisi Dan Kualitas Pertumbuhan Kabupaten/Kota
- C. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan
- D. Kemiskinan Dan Ketimpangan
- E. Disparitas Antar Kabupaten/Kota

BAB VI

POTENSI DAN KUALITAS INDIKATOR PERTUMBUHAN PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk merepresentasikan fenomena ekonomi makro suatu negara maupun wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bermakna perkembangan kesejahteraan suatu negara atau wilayah, yang tercermin pada peningkatan output per kapita sehingga mendorong atau memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, atau dalam bahasa lain meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama perencanaan pembangunan. Namun perlu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup bila ternyata belum mampu menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, serta berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, kualitas pertumbuhan ekonomi harus diperhatikan, yaitu: laju pertumbuhan yang diiringi dengan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran.

A. Perkembangan Indikator Utama Ekonomi D.I. Yogyakarta

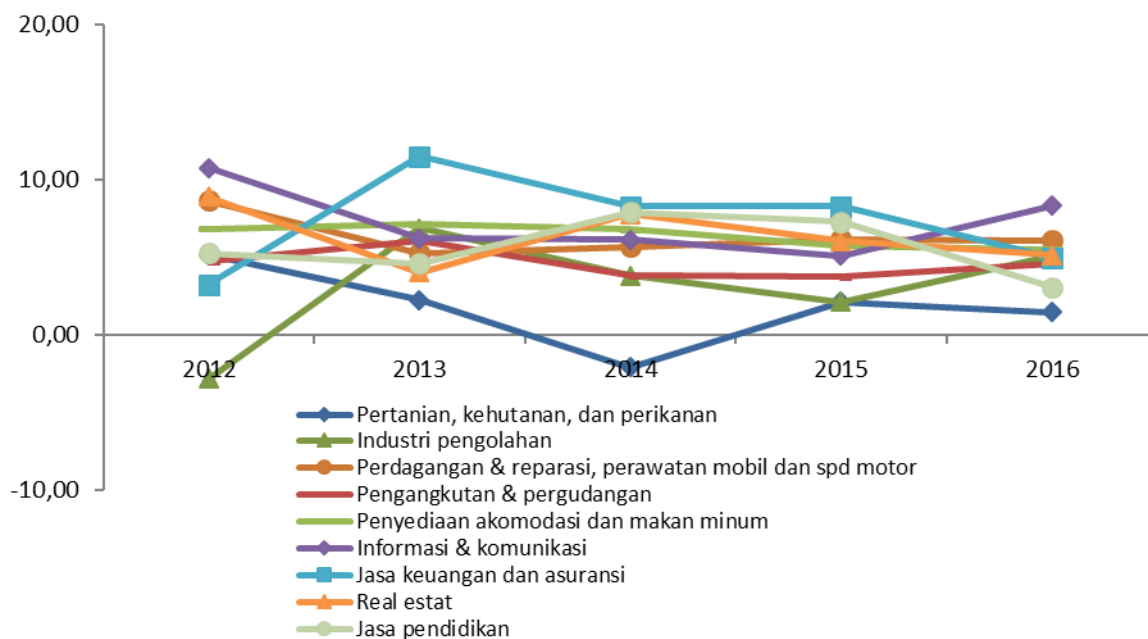
1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Tren Pertumbuhan Kategori

Selama kurun waktu 2011-2015 pertumbuhan ekonomi sedang tidak pada kondisi yang menggembirakan, baik pada di tingkat nasional maupun lingkup D.I. Yogyakarta. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi masih mencapai 5,24 persen per tahun, tetapi arah perkembangan pertumbuhan sampai dengan tahun 2015 masih menurun (Analisis PDRB D.I. Yogyakarta 2011-2015, BSD-BPS D.I. Yogyakarta: 2016).

Pada kurun waktu 2012-2016, arah kecenderungan pertumbuhan menurut kategori sampai dengan tahun 2014 tampak masih terjadi fluktuasi yang relatif tinggi dan bahkan pertanian mengalami kontraksi pada tahun 2014. Kondisi ekonomi mulai ke arah pertumbuhan yang kondusif sejak tahun 2015, ini ditunjukkan oleh perkembangan semua lapangan usaha yang tumbuh positif. Hal ini mengindikasikan bahwa *recovery* ekonomi mulai menunjukkan hasilnya meskipun belum sepenuhnya membaik. Hal ini terlihat pada lapangan usaha yang meskipun tumbuh positif namun arah pertumbuhannya masih melambat, yaitu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori jasa keuangan dan asuransi, dan kategori jasa pendidikan.

Gambar 6.1. Pertumbuhan Beberapa Kategori, 2012-2016 (persen)



Kondisi ekonomi D.I. Yogyakarta dari sudut pandang pertumbuhan produksi lapangan usaha atau kategori ekonomi cukup membanggakan. Pada tahun 2016 landasan ekonomi D.I. Yogyakarta cukup mantap, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB D.I. Yogyakarta, antara lain yaitu pertanian, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, dan pengangkutan dan pergudangan. Dilihat tren pertumbuhan, tampaknya kategori untuk kelompok usaha perdagangan mempunyai prospek semakin membaik. Sementara yang perlu menjadi perhatian dari pergerakan laju pertumbuhan kategorial adalah di kategori jasa keuangan dan asuransi. Setelah menjadi kategori usaha dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2013, di tahun-tahun selanjutnya lapangan usaha ini masih tertahan pertumbuhannya bahkan pada tahun 2016 lebih lambat dibanding pertumbuhan di dua tahun sebelumnya.

b. Tren Pertumbuhan Konsumsi

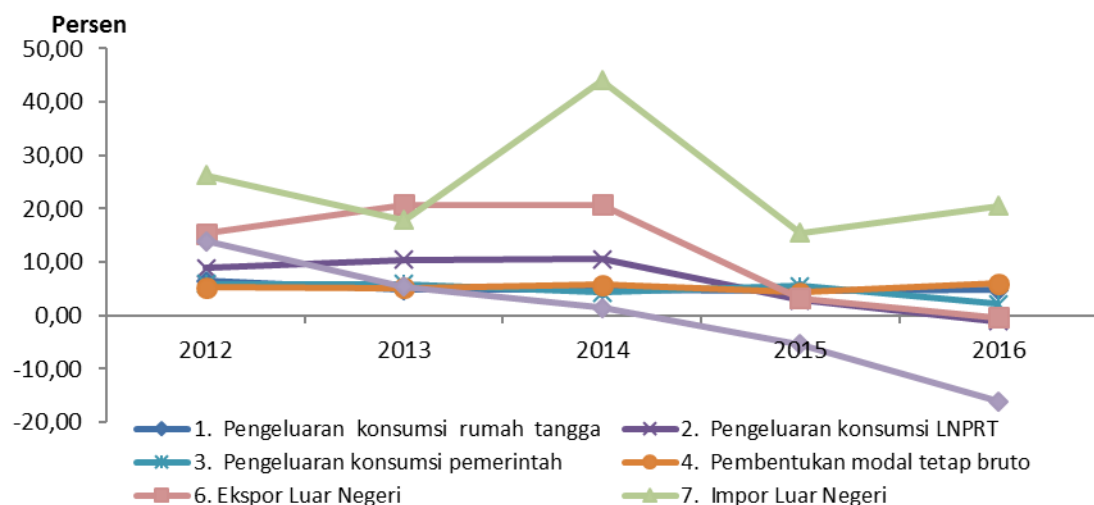
Pertumbuhan ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran dibangun oleh 9 (sembilan) komponen utama, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan net ekspor antardaerah. Menurut Eachern (2000: 149) untuk memahami pendekatan PDRB sisi pengeluaran, agregat sembilan komponen tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: konsumsi, investasi, pengeluaran/pembelian pemerintah, dan ekspor netto. Oleh karena itu dalam pembahasan ini pengamatan tren pertumbuhan PDRB sisi pengeluaran difokuskan pada empat komponen tersebut.

Tren pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran selama periode 2012-2016 terlihat masih menunjukkan arah perkembangan yang belum baik. Dalam kurun waktu ini pertumbuhan masih dikendalikan oleh kegiatan impor luar negeri. Oleh karena merupakan faktor pengurang dalam PDRB maka hal ini mencerminkan kondisi masih tingginya ketergantungan konsumsi barang dan jasa yang merupakan suplai dari luar negeri. Ekspor luar negeri yang diharapkan menjadi andalan perdagangan D.I. Yogyakarta ternyata belum mampu mengimbangi kebutuhan arus masuk barang dan jasa dari luar negeri. Bahkan, pada tahun 2016 ekspor luar negeri D.I. Yogyakarta tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Demikian pula kinerja ekspor antardaerah D.I. Yogyakarta dari tahun ke tahun tren pertumbuhannya melambat, hingga di dua tahun terakhir tercatat mengalami kontraksi yang serius yaitu sebesar 5,3 persen dan 16,1 persen.

Dengan demikian, dari sisi pengeluaran faktor yang memacu laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta adalah pertumbuhan pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Meskipun pertumbuhannya tidak tinggi namun relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2012-2016 pada kisaran angka 4,5-5,3 persen per tahun.

Tren pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran juga mencatat bahwa D.I. Yogyakarta ternyata masih menjadi ladang pemasaran produk luar provinsi baik dari hasil produk pertanian maupun industri pengolahan. Hal ini menyangkut kebutuhan komoditas dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lain yang harus disuplai dari luar provinsi karena produksi lokal tidak mencukupi. Sementara dari industri pengolahan penyebab tingginya impor ditengarai dari bahan baku industri kerajinan D.I. Yogyakarta datang dari luar provinsi bahkan harus impor dari luar negeri, seperti kerajinan perak.

Gambar 6.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2012-2016 (persen)



2. Pengurangan Angka Pengangguran

Pengangguran tidak semata masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Pengangguran juga bukan masalah individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan berbagai tindakan kriminal dan gejolak sosial, kemiskinan, dan bahkan lebih luas merambah *chaos* politik bagi pemerintahan.

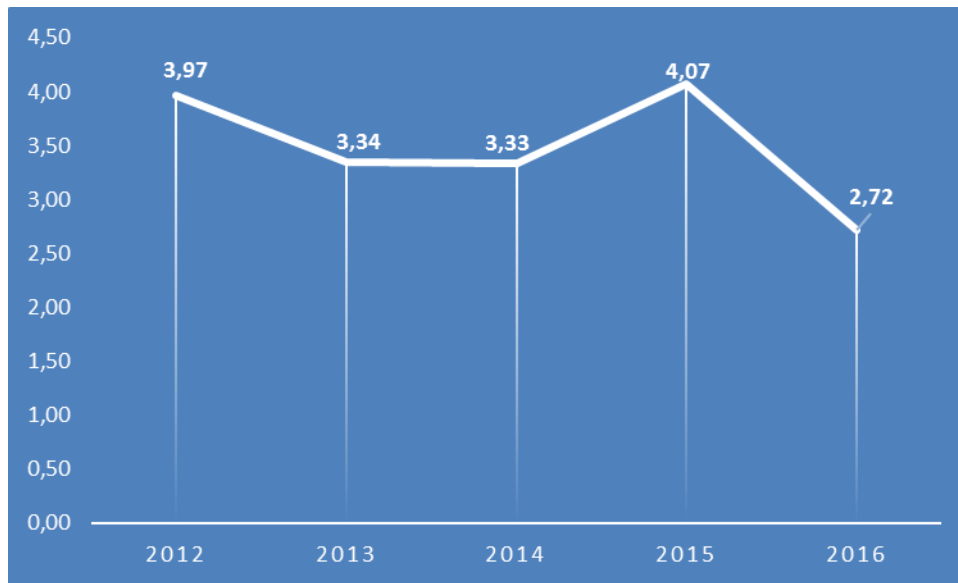
Setiap manusia membutuhkan pangan, sandang, dan papan untuk bertahan hidup. Manusia juga butuh biaya untuk interaksi sosial dengan lingkungannya agar diterima di masyarakat. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan hidup bila tidak bekerja, karena Tuhan juga mewajibkan manusia untuk mencari nafkah untuk kehidupan dirinya. Demikian pula berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar semua penduduknya bekerja. Melalui bekerja berarti seseorang memiliki produksi. Oleh karena itu seberapa pun hasil yang didapat dari bekerja akan lebih baik dari pada tidak memiliki produksi sama sekali.

Pengangguran muncul antara lain disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerja. Penyebab lain adalah kompetensi kerja tidak sesuai dengan pasar kerja yang tersedia. Kurang efektifnya akses informasi pasar kerja bagi para pencari kerja juga mendukung meningkatnya jumlah pengangguran.

Fenomena lain dari masalah pengangguran adalah berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan antara lain perusahaan menutup/mengurangi aktivitas produksi akibat internal perusahaan maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor, dan sebagainya.

Pada tahun 2015 di D.I. Yogyakarta terdapat sekitar 80,2 ribu orang yang menganggur dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bukan karena sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Mereka yang menganggur ini adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran 2015 yang sebesar 4,07 persen tersebut menjadi tertinggi sepanjang kurun waktu lima tahun terakhir. Seiring dengan membaiknya kondisi politik nasional dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah D.I. Yogyakarta dalam mengatasi pengangguran, pada tahun 2016 angka pengangguran mampu ditekan berkurang sebanyak 23,2 ribu orang hingga menjadi 57 ribu orang, atau tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 2,72 persen. Dilihat laju penurunan selama lima tahun terakhir jumlah pengangguran telah berkurang rata-rata 7,27 persen per tahun.

Gambar 6.3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) D.I. Yogyakarta, 2012-2016 (persen)



3. Pengurangan Kemiskinan

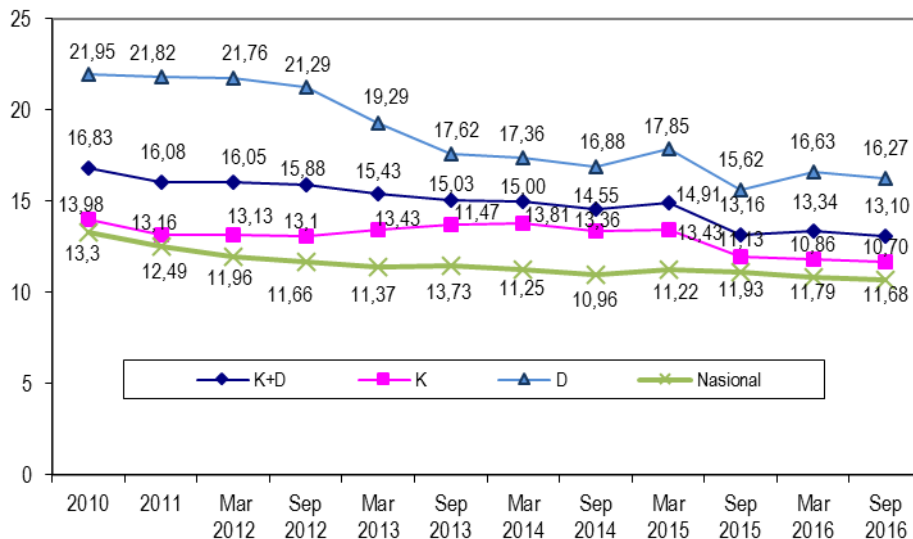
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunai usaha (sektor swasta), dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melakukan pananggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah (TNP2K).

Tingkat kemiskinan di D.I. Yogyakarta pada periode 2010 sampai dengan September 2016 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83 persen, turun menjadi 13,10 persen pada September 2016. Penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan terlihat lebih cepat meskipun selisih persentasenya dibanding wilayah perkotaan masih lebih besar. Selama kurun waktu 2010-2016 jumlah penduduk miskin D.I. Yogyakarta mampu ditekan dengan tingkat penurunan rata-rata 2,73 persen per tahun.

Dibanding tingkat kemiskinan nasional, D.I. Yogyakarta memang masih lebih tinggi, tetapi gap persentasenya terlihat semakin kecil. Hal ini juga mengindikasikan bahwa akselerasi penurunan tingkat kemiskinan di D.I. Yogyakarta lebih cepat. Dibanding provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa tingkat kemiskinan D.I. Yogyakarta masih tergolong tinggi jauh di atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Posisi D.I. Yogyakarta tertinggi kedua

setelah Jawa Tengah yang pada September 2016 sebesar 13,19 persen. Pada semester pertama (kondisi Maret 2016) tingkat kemiskinan D.I. Yogyakarta masih yang tertinggi di Pulau Jawa.

Gambar 6.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin D.I. Yogyakarta dan Nasional, 2012-2016 (persen)



B. Posisi dan Kualitas Pertumbuhan Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi disebut berkualitas bila hasil pertumbuhan mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Sebaran Pertumbuhan

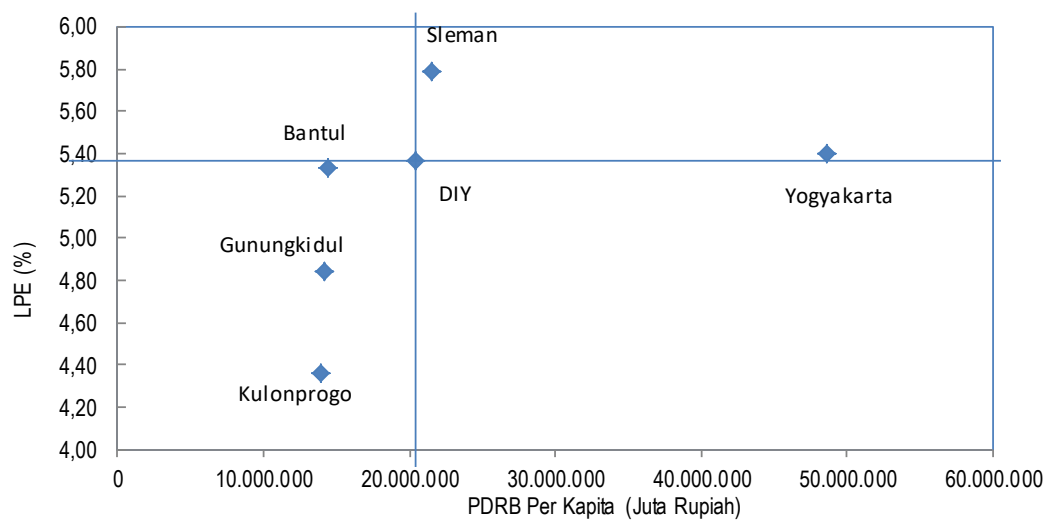
Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah pada periode 2012–2016 dapat dilihat dari posisi masing-masing kabupaten/kota terhadap D.I. Yogyakarta pada **bidang pencaran (*scattered plot*)** yang semula diperkenalkan oleh Klassen dengan sebutan **Tipologi Klassen**. Berdasar pada metode Tipologi Klassen ini, laju pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita kabupaten/kota dipetakan dan hasilnya seperti yang terlihat pada Gambar 6.5 dan Gambar 6.6.

Pada tahun 2012, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjadi daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo berada pada kuadran IV yang merupakan daerah tertinggal dalam lingkup perbandingan lokal DIY. Meskipun Sleman berada di kuadran II bersama Kota Yogyakarta sebagai daerah yang maju

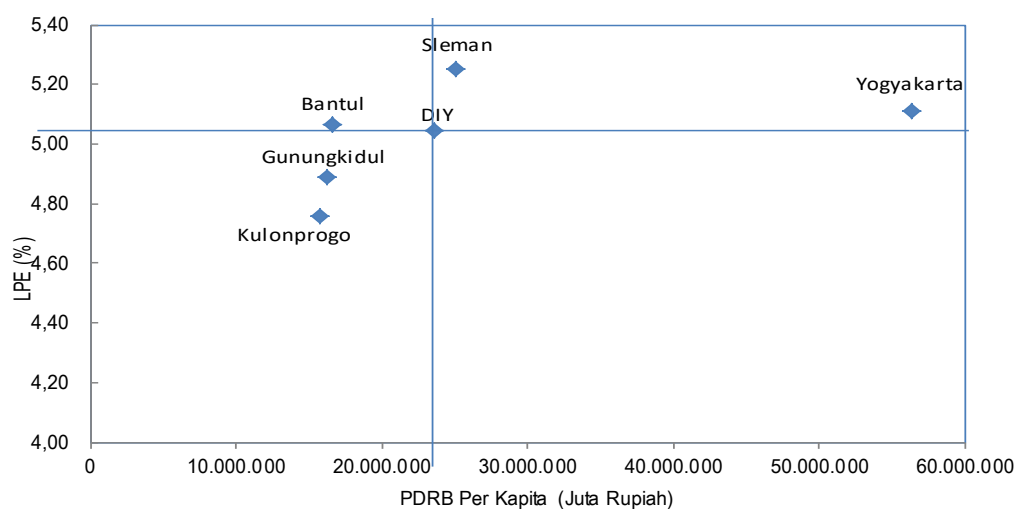
dan cepat tumbuh, namun posisi Sleman masih rentan karena di ambang batas bawah (Gambar 6.5).

Pada tahun 2016 Bantul naik masuk pada kuadran I yaitu menjadi daerah yang berkembang cepat karena laju pertumbuhannya mampu melampaui rata-rata provinsi meskipun PDRB per kapitanya masih di bawah rata-rata provinsi. Sementara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta posisinya tetap di Kuadran II yaitu daerah yang maju dan cepat tumbuh. Posisi Gunungkidul dan Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun stagnan pada kategori daerah tertinggal namun level pertumbuhan ekonominya bergerak ke atas mendekati rata-rata provinsi (Gambar 6.6).

Gambar 6.5. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2012



Gambar 6.6. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2016

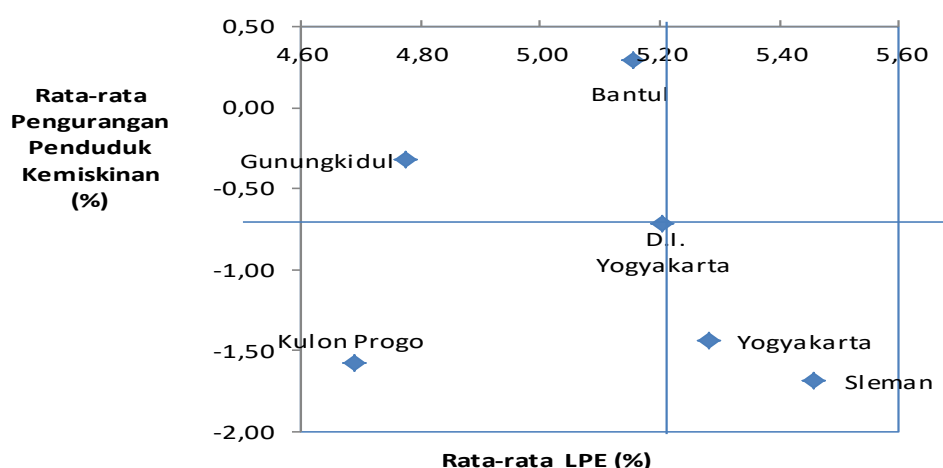


Skema Tipologi Klassen menurut kabupaten/kota wilayah DIY di atas menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Terkait dengan permasalahan tersebut perencanaan pembangunan perlu dirumuskan dengan memfokuskan program pembangunan yang mampu menggerakkan skala ekonomi di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo untuk mengurangi jurang kesenjangan ekonomi dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pergerakan dari tahun 2012 ke 2016 tersebut seharusnya menjadi indikasi bahwa jurang kesenjangan pendapatan di D.I. Yogyakarta dapat ditekan, karena perekonomian di Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul dapat bergerak tumbuh lebih cepat sehingga mendekati rata-rata provinsi. Hanya saja di PDRB per kapita masih terdapat ketimpangan yang lebar terutama dengan Kota Yogyakarta.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6.7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dengan penjelasan sebagai berikut. **Pertama**, Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul terletak di kuadran II, merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi DIY (*low-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang.

Gambar 6.7. Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta, 2012-2015



Kedua, Kabupaten Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terletak di kuadran IV, merupakan kota dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*high-growth, less pro-poor*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberikan dampak

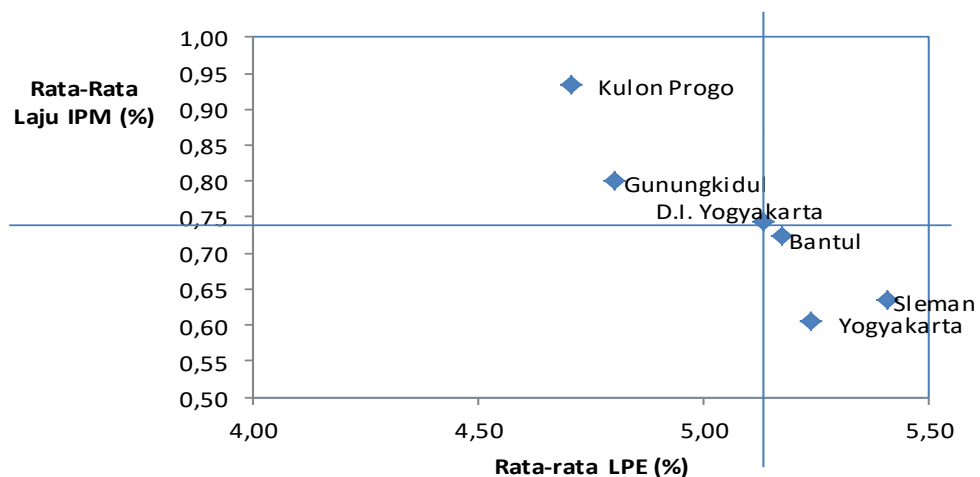
penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu diperlukan juga program dan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Ketiga, Kulon Progo hingga tahun 2015 ini masih menjadi daerah di D.I. Yogyakarta yang rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan tingkat pengurangan kemiskinannya juga di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*).

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6.8 menunjukkan distribusi kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama kurun waktu 2012-2016 dengan penjelasan sebagai berikut. **Pertama**, Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul terletak di kuadran II, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi (*low-growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Gambar 6.8. Plot Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta, 2012-2016



Kedua, Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta berada di kuadran IV, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan

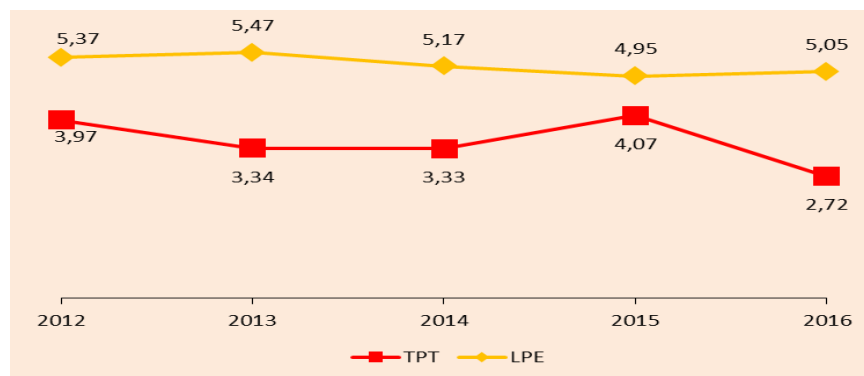
ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Pada tahun 2016, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak dirancang untuk data estimasi kabupaten/kota. Oleh karena itu data tingkat pengangguran terbuka tidak tersedia sampai dengan level kabupaten/kota. Untuk itu dalam bahasan ini akan dilihat hubungan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka pengangguran di level provinsi.

Gambar 6.9 memperlihatkan hubungan pergerakan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) D.I. Yogyakarta untuk tahun 2012 hingga 2016. Ada kecenderungan yang dapat dijelaskan bahwa bila laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka persentase tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, bila pertumbuhan ekonomi melambat maka akan diiringi meningkatnya persentase tingkat pengangguran.

Gambar 6.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di D.I. Yogyakarta, 2012-2016 (persen)



Tabel 6.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Penurunan Pengangguran di D.I. Yogyakarta, 2012-2016 (persen)

Rincian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan/ Penurunan	Elastisitas Pertumbuhan Pengangguran (EPP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,16	
Laju Pertumbuhan Jumlah Pengangguran	3,81	-17,19	5,52	19,03	-28,92	-7,27	-1,41

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Sisi lain untuk melihat hubungan pergerakan pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran adalah menggunakan elastisitas dari laju penurunan pengangguran terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Tabel 6.1 menunjukkan laju dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta dan laju pertumbuhan dan rata-rata laju pertumbuhan tingkat

pengangguran. Berdasarkan dua indikator ini maka dihitung elastisitas pengurangan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi.

EPP dihitung berdasarkan rata-rata penurunan jumlah pengangguran dan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 2012-2016. Arti EPP dalam Tabel 6.1 tersebut adalah pada setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen tingkat pengangguran berkurang sebesar 1,41 persen (*decreasing return to scale*), atau bersifat elastis. Pertumbuhan ekonomi di DIY dalam kurun waktu tersebut mampu mempengaruhi penurunan angka pengangguran. Pada tahun 2012 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 77,15 ribu orang. Setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen pada periode 2012-2016 akan mengurangi jumlah pengangguran rata-rata sebanyak 1.087 orang, atau bisa juga bermakna setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menarik kesempatan kerja sebanyak 1.087 orang penganggur. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang dipacu secara efektif mampu menekan jumlah pengangguran di D.I. Yogyakarta.

5. Potensi Sektoral Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah membutuhkan hasil analisis ekonomi dengan menggunakan data dasar PDRB yang bermanfaat untuk membuat prioritas kebijakan agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini terkait dengan kebijakan anggaran, yaitu penentuan prioritas kebijakan tentang pengeluaran daerah sehingga optimalisasi anggaran untuk pembangunan dapat diwujudkan. Penentuan prioritas kebijakan dapat diwujudkan salah satunya dengan menentukan sektor-sektor prioritas atau unggulan. Di sisi lain, prioritas kebijakan juga dapat dilakukan dengan menentukan prioritas wilayah pelaksanaan.

Untuk menentukan sektor, subsektor, komoditas, atau wilayah pelaksanaan dapat digunakan beberapa alat analisis. Salah satu alat analisis yang relatif sering digunakan dan mudah dipahami adalah alat analisis Tipologi Klassen. Dalam pembahasan berikut analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi provinsi, serta membandingkan pangsa suatu sektor (kategori) dengan nilai rata-ratanya provinsi.

Analisis Tipologi Klassen berikut diaplikasikan untuk memadukan alat analisis hasil bagi lokasi atau *Location Quotient* (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sektoral maupun daerah. Analisis ditujukan untuk melihat posisi 17 kategori PDRB terhadap perekonomian D.I. Yogyakarta selama periode 2012-2016. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data PDRB atas dasar harga konstan 2010 D.I. Yogyakarta dan juga kabupaten/kota menurut lapangan usaha tahun 2012-2016.

Laju pertumbuhan PDRB masing-masing kategori dan pangsa (distribusi persentase) masing-masing kategori terhadap PDRB kabupaten/kota tahun 2012-2016 dihitung

kemudian dicari rata-ratanya. Setelah itu laju pertumbuhan PDRB masing-masing kategori dan pangsa masing-masing kategori terhadap PDRB kabupaten/kota dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan masing-masing kategori PDRB dan rata-rata pangsa masing-masing kategori PDRB menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 di level provinsi.

Data PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 secara lengkap disajikan di Tabel Lampiran. Dapat dilihat bahwa selama tahun 2012-2016 terdapat kategori-kategori yang secara kontinyu memberikan kontribusi cukup besar bagi perekonomian kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Kategori-kategori tersebut adalah pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel 6.2 menyajikan rata-rata pangsa dan pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota dan jumlah kabupaten/kota untuk merepresentasikan kondisi provinsi pada periode 2012-2016.

Tabel 6.2. Pangsa dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota dan D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)

Kategori	Kategori/Lapangan Usaha	Kulon Progo		Bantul		Gunung-kidul		Sleman		Yogyakarta	
		RPS	RPT	RPS	RPT	RPS	RPT	RPS	RPT	RPS	RPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,92	1,56	13,15	1,04	23,74	1,66	7,91	0,67	0,17	0,47
B	Pertambangan dan Penggalian	1,52	2,91	0,68	1,24	1,49	1,87	0,44	2,62	0,00	0,56
C	Industri Pengolahan	12,25	5,80	14,85	4,43	9,35	4,78	13,59	2,80	13,61	4,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	7,35	0,16	7,92	0,10	6,41	0,13	7,51	0,24	7,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	1,60	0,09	2,50	0,16	3,05	0,05	2,66	0,15	2,76
F	Konstruksi	8,47	4,76	9,77	5,40	9,30	4,58	11,12	5,30	7,83	4,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	13,36	5,82	8,32	6,29	9,17	6,43	7,48	6,16	6,93	5,40
H	Transportasi dan Pergudangan	8,57	2,64	5,03	4,22	5,29	3,59	6,25	6,92	3,95	3,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,65	5,65	10,37	6,73	5,57	8,00	9,57	6,40	11,54	6,19
J	Informasi dan Komunikasi	6,27	6,53	9,78	6,84	8,86	5,78	10,00	8,20	13,71	5,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,87	10,13	2,58	9,04	2,05	9,96	2,80	8,31	5,96	7,74
L	Real Estate	3,57	5,05	6,63	6,43	3,46	6,50	8,07	6,50	9,26	5,24
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	5,25	0,55	5,60	0,50	5,50	1,90	6,34	1,23	4,95
O	Administrasi Pemerintahan	8,13	5,55	6,81	5,44	8,82	5,21	6,03	5,67	9,00	5,22
P	Jasa Pendidikan	6,31	5,62	7,21	5,96	6,52	7,03	9,99	6,13	9,82	5,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	6,54	1,89	6,88	2,10	7,59	2,33	7,40	3,84	6,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,04	5,98	2,14	6,61	3,52	6,93	2,33	6,12	2,76	5,40

Berdasarkan Tabel 6.2 selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan Tipologi Klassen. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6.3. Penjelasan Tabel 6.3 sebagai berikut. **Pertama**, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori pertambangan dan penggalian, dan kategori administrasi pemerintahan dan pertahanan menjadi sektor yang maju dan tumbuh pesat untuk Kabupaten Kulon Progo. Seharusnya kategori-kategori usaha inilah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Seyogyanya analisis lebih lanjut memang menganalisis hingga ke tingkat subsektor, komoditas, atau jenis usaha, namun lebih akurat

bila analisis ini dilakukan oleh instansi teknis supaya terintegrasi dengan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang disusun. Bantul mempunyai lapangan usaha yang maju dan tumbuh pesat, yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Di Gunungkidul kategori yang maju dan tumbuh pesat adalah pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, dan jasa lainnya. Kabupaten Sleman mempunyai kategori yang maju dan tumbuh pesat, yaitu konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estat, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Sementara Kota Yogyakarta, potensinya pada industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Dengan demikian Sleman merupakan kabupaten yang paling potensial karena mempunyai jumlah kategori yang paling banyak terkategori maju dan tumbuh pesat.

Tabel 6.3. Identifikasi Kategori Potensial Perekonomian Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian D.I. Yogyakarta, 2012-2016 (persen)

Kategori	Uraian	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya-karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	I	II	II	IV	IV
B	Pertambangan dan Penggalian	I	II	II	IV	IV
C	Industri Pengolahan	III	I	III	II	I
D	Pengadaan Listrik dan Gas	III	I	IV	IV	I
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	II	IV	I	III	I
F	Konstruksi	IV	I	IV	I	IV
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	II	I	I	III	IV
H	Transportasi dan Pergudangan	II	IV	IV	I	IV
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	IV	I	III	I	II
J	Informasi dan Komunikasi	III	II	III	IV	II
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	III	II	III	III	II
L	Real Estate	IV	II	III	I	II
M,N	Jasa Perusahaan	IV	IV	IV	I	II
O	Administrasi Pemerintahan	I	IV	II	III	II
P	Jasa Pendidikan	IV	IV	III	I	II
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	IV	IV	III	III	II
R,S,T,U	Jasa lainnya	II	II	I	IV	II

Keterangan: I Kuadaran I = Maju dan tumbuh pesat
 II Kuadaran II = Sektor maju tapi tertekan
 III Kuadaran III = Potensial untuk berkembang
 IV Kuadaran IV = Relatif tertinggal.

Di antara semua kategori, industri pengolahan mempunyai kontribusi yang cukup besar di semua kabupaten/kota. Selain menjadi lapangan yang maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, industri pengolahan juga potensial berkembang di

Kulon Progo dan Gunungkidul. Sementara posisi di Kota Yogyakarta, kategori ini termasuk kategori yang maju meskipun tertekan.

C. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk adalah subyek terpenting dalam pembangunan pembangunan setiap sektor dalam sebuah negara atau wilayah, mulai dari sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga ke sektor politik. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan masalah pekerjaan baik masalah pekerjaan itu sendiri, tenaga kerjanya, upah, hingga masalah yang ada pada sektor.

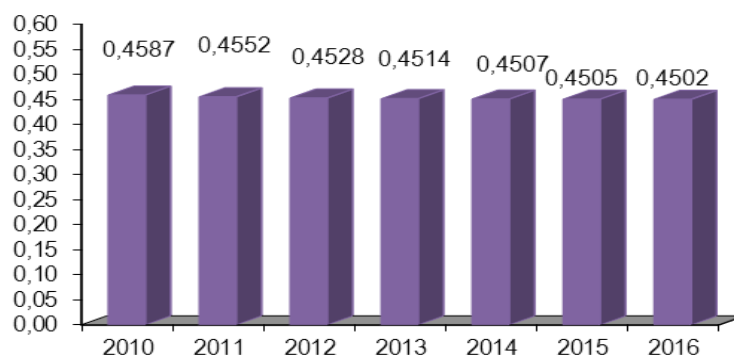
Permasalahan yang selalu dihadapi dalam pembangunan terkait kependudukan, antara lain: tingginya angka kelahiran atau kematian, eksodus migrasi, persebaran yang tidak merata, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, rendahnya tingkat pendidikan, pemukiman kumuh, rendahnya tingkat kesehatan, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang muncul di ketenagakerjaan diantaranya adalah pengangguran, upah minimum, dan minimnya lapangan atau kesempatan kerja.

Sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan ekonomi permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan, perumusan program, dan implikasi pembangunan. Oleh karena itu dalam pembahasan berikut mengurai permasalahan-permasalahan penting yang dapat menjadi penyebab berbagai simpul permasalahan yang mempengaruhi hasil akhir pembangunan yang diukur dengan PDRB.

1. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio/DR*)

Hasil penghitungan angka DR menjelaskan bahwa setiap 100 orang penduduk DIY yang produktif secara ekonomis (umur 15-64 tahun) harus menanggung sejumlah penduduk nonproduktif yaitu kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas. Meskipun hingga 2016, angka beban tanggungan penduduk DIY belum berkurang secara nyata, namun perubahan tersebut mempunyai arti ekonomi yang luas. Pada tahun 2016 angka DR sebesar 45,02 sedikit lebih rendah dibanding angka DR tahun 2012 yang sebesar

Gambar 6.10. Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY, 2010-2016



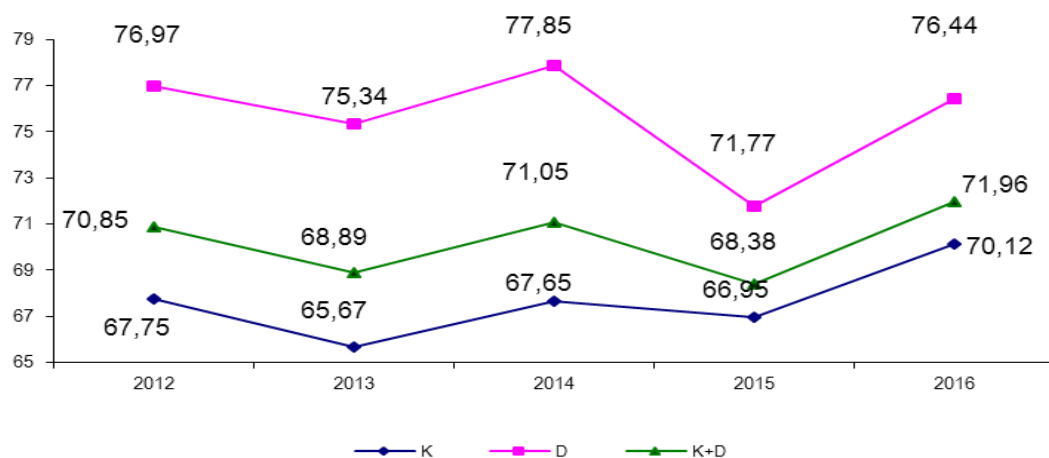
45,28. Penurunan angka DR yang hanya sekitar 0,26 poin tersebut mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir beban tanggungan penduduk usia produktif secara jumlah hanya berkurang sedikit. Kondisi ini dalam sudut pandang ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk karena bila rata-rata pendapatan penduduk usia produktif tidak naik atau kenaikannya hanya menyesuaikan inflasi harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari maka bisa dikatakan tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi penduduk D.I. Yogyakarta.

Angka ketergantungan DIY masuk dalam kelompok tinggi, karena lebih dari 41. Rasio beban tanggungan penduduk DIY yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif harus dibagikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/tidak produktif. Meskipun penurunan angka DR tersebut relatif kecil namun bila dikalkulasi secara ekonomi anggaran pembangunan yang bisa lebih dioptimalkan cukup besar.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi. Hal ini berarti secara langsung tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tenaga kerja yang berkualitas adalah tenaga kerja yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, dan juga dari pengalaman. Tenaga kerja seperti inilah merupakan modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

Gambar 6.11. Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah, 2012-2016 (persen)



TPAK mencerminkan ketersediaan angkatan kerja di antara penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Ketersediaan angkatan kerja menunjukkan kemampuan penduduk dalam beraktivitas secara ekonomi, karena mencakup jumlah penduduk yang bekerja dan

penduduk yang berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Sebagai pembanding adalah penduduk usia kerja atau berumur 15 tahun ke atas.

Disparitas angka TPAK antara perkotaan dan perdesaan relatif lebar dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Namun setelah itu selama dua tahun terakhir taraf kesenjangan TPAK berkurang. Dilihat pada klasifikasi daerah perkotaan dan perdesaan, TPAK daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan. Namun demikian level TPAK di tahun 2015 ternyata menurun, artinya proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja berkurang.

TPAK DIY tahun 2016 tercatat sebesar 71,96 persen, naik 1,58 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, terjadi peningkatan porsi penduduk yang terserap pada lapangan kerja dan yang siap masuk ke bursa kerja. Hal ini juga berarti meningkatnya jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja atau memperoleh kesempatan kerja.

TPAK daerah perdesaan lebih tinggi dibanding dengan TPAK daerah perkotaan dan kesenjangannya telah semakin berkurang. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena kondisi komposisi kependudukan di daerah perkotaan yaitu besarnya jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas tetapi sebagian besar masuk dalam golongan bukan angkatan kerja karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan yang merasa sudah cukup dan tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi, serta lain-lain yang tidak melakukan kegiatan apapun yang bernilai ekonomi. Sementara keadaan di desa oleh karena keadaan yang menuntut harus mencukupi kebutuhan hidup dengan mengerjakan lahan pertanian yang umumnya dibantu oleh anggota keluarga atau famili lain sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Pekerja keluarga yang dari anggota rumah tangga dalam konsep ketenagakerjaan kegiatan utama berdasarkan waktu terbanyak yang digunakan biasanya sebagai ibu rumah tangga, atau anak-anak yang sudah dewasa tetapi masih sekolah. Komposisi kependudukan di perdesaan juga mempengaruhi angka TPAK karena penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikannya cenderung lebih banyak merantau ke kota sehingga proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas di perdesaan lebih rendah.

3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

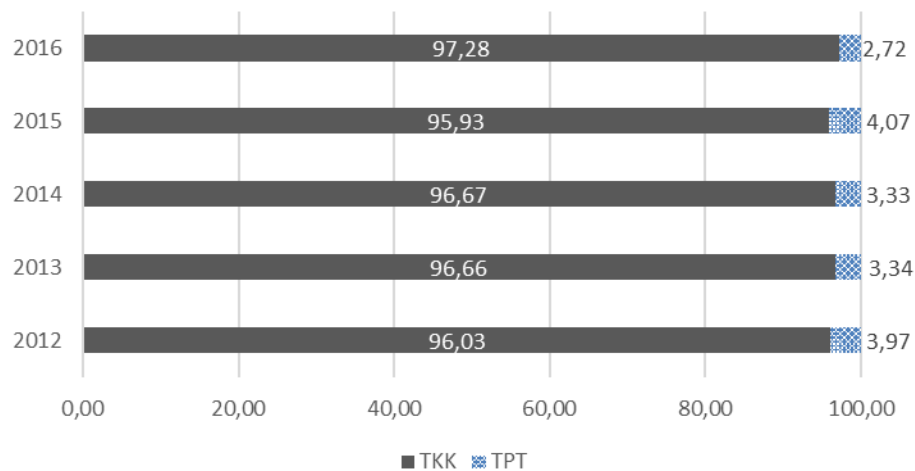
Indikator ketenagakerjaan lebih spesifik bisa dilihat dari angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK bermakna menjelaskan tentang keterlibatan penduduk dalam kegiatan perekonomian karena TKK merupakan bagian angkatan kerja yang benar-benar bekerja untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan. Oleh karena itu TKK tersebut juga dapat dilihat menurut lapangan usahanya.

Sekelompok penduduk lain yang merupakan bagian dari angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja. Kategori mereka yang tidak bekerja adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah mendapatkan pekerjaan tetapi

belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Keempat kategori yang masih bagian dari angkatan kerja disebut sebagai penganggur dan indikator pengukurannya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Jumlah penduduk usia bekerja atau usia 15 tahun ke atas di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2016 mencapai 2,92 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 1,20 persen dibanding keadaan pada Agustus 2015 yang sebanyak 2,88 juta orang atau bertambah 34,67 ribu orang. Bertambahnya penduduk usia bekerja tersebut juga diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja, yaitu bertambah sebanyak 128 ribu orang dari 1,97 juta orang menjadi 2,1 juta orang atau terjadi peningkatan sebesar 6,49 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2016 juga mengalami peningkatan sebanyak 7,73 persen dibanding keadaan pada Agustus 2015, yaitu dari 1,89 juta orang menjadi 2,04 juta orang, atau bertambah sekitar 151 ribu orang.

Gambar 6.12. TTK dan TPT Penduduk DIY, 2011-2015 (persen)



Profil ketenagakerjaan dapat juga diamati mengenai penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sampai dengan Agustus 2016, sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja adalah perdagangan sebesar 28,89 persen, pertanian sebesar 23,27 persen, dan jasa-jasa sebesar 20,75 persen (BPS, Sakernas Agustus 2016).

Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2016 seiring dengan meningkatnya tingkat kesempatan kerja (TKK) dan menurunnya tingkat penganggur terbuka (TPT). Angka TPT D.I. Yogyakarta dalam setahun terakhir menurun cukup signifikan dari 4,07 persen menjadi 2,72 persen. Selama kurun waktu 2012 hingga 2016 perkembangan TPT terlihat cenderung menurun meskipun di tahun 2015 sedikit naik.

Masih terkait pengangguran di D.I. Yogyakarta, TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Dilihat menurut spasial klasifikasi wilayah

perdesaan dan perkotaan, tahun 2016 TPT perdesaan dan perkotaan masing-masing sebesar 2,79 persen dan 2,55 persen. Di daerah perdesaan karena didominasi oleh lapangan usaha pertanian, penyerapan tenaga kerja relatif tinggi, dan fenomena lain adalah penduduk desa yang telah selesai sekolah dan merasa cukup pendidikannya sebagian besar migrasi ke perkotaan untuk mencari kerja.

Bila dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tingkat pengangguran cenderung tinggi untuk mereka yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas), dan cenderung rendah untuk mereka yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah). Pada tahun 2016 TPT untuk kelompok yang berpendidikan SLTA sebesar 1,39 persen, yang berpendidikan sarjana (DI/DII/DIII/Sarjana) sebesar 0,45 persen, yang berpendidikan SLTP sebesar 0,52 persen, dan yang berpendidikan SD sebanyak 0,16 persen, dan yang tidak tamat SD sebanyak 0,19 persen. TPT di perkotaan sebesar 1,93 persen, lebih tinggi dibanding perdesaan yang sebesar 0,79 persen. Demikian pula menurut jenis kelamin pengangguran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, yaitu masing-masing sebesar 2,06 persen dan 0,66 persen (Tabel 6.4).

Tabel 6.4. TPT menurut Pendidikan, Daerah dan Jenis Kelamin, 2016 *)

Pendidikan	Kota	Desa	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Di bawah SD	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
2. SD	0,09	0,07	0,07	0,09	0,16
2. SMP	0,16	0,37	0,44	0,08	0,52
3. SMA	1,04	0,35	1,12	0,28	1,39
5. D I/II/III/Sarjana	0,45	0,00	0,23	0,22	0,45
Total	1,93	0,79	2,06	0,66	2,72

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Keterangan: * Kondisi Agustus 2016

4. Elastisitas Kesempatan Kerja

Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) merupakan angka yang menunjukkan besarnya persentase jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diminta terhadap besarnya persentase perubahan jumlah output atau pertumbuhan pada setiap sektor. Analisis EKK dapat menggunakan metoda *Ordinary Least Square* (OLS) atau dapat juga menggunakan rasio antara rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

Melalui EKK, diperoleh indikasi secara makro bahwa kesempatan kerja suatu sektor atau lapangan usaha bersifat elastis atau inelastis. Kesempatan kerja bersifat *elastis*, bila setiap perubahan output sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan kesempatan kerja lebih besar dari 1 persen (*increasing return to scale*). Kesempatan kerja bersifat

inelastis, bila setiap perubahan output sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan kesempatan kerja kurang dari 1 persen (*decreasing return to scale*), dan kesempatan kerja bersifat *unitary*, artinya persentase perubahan output sama besarnya dengan persentase perubahan kesempatan kerja (*constan return to scale*).

Pada tahun 2012 jumlah tingkat kesempatan kerja yang tercipta mencapai 96,03 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 97,28 persen. Penghitungan EKK dalam analisis ini menggunakan metoda rasio antara rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan mengambil periode kajian tahun 2012-2016. Secara umum, pada periode pengamatan kesempatan kerja di semua kategori usaha bersifat *inelastis*. Setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen tingkat kesempatan kerja kurang dari 1 persen (*decreasing return to scale*), yaitu hanya 0,06. EKK yang *inelastis* ini juga bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY dalam kurun waktu tersebut lebih bersifat padat modal (*capital Intensive*) dan kurang bisa menyerap peluang kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi mungkin lebih berbasis pada industri dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga kesempatan kerja yang tersedia semakin sedikit. Angka EKK pada periode 2012-2016 juga lebih rendah dibanding dengan hasil penghitungan periode kajian 2011-2015 yang sebesar 0,10.

Tabel 6.6. Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY, 2012-2016 (persen)

Sektor	Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	Elastisitas Kesempatan Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
				2012	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	-4,05	0,92	-4,42	27,82	23,27
2. Pertambangan & Penggalian	13,12	1,63	8,04	0,64	1,04
3. Industri Pengolahan	-3,47	4,46	-0,78	14,97	12,83
4. Listrik, Gas & Air Bersih	-0,36	7,25	-0,05	0,22	0,21
5. Konstruksi	-1,03	2,52	-0,41	6,92	6,55
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	4,52	5,06	0,89	24,52	28,89
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,32	5,81	0,57	3,27	3,68
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	-2,07	4,56	-0,45	3,06	2,78
9. Jasa-jasa	3,13	6,30	0,50	18,58	20,75
Total	0,32	5,16	0,06	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SAKERNAS bulan Agustus

Meskipun sendi-sendi perekonomian 2016 telah mulai tumbuh lebih cepat namun belum banyak memberikan kesempatan kerja. Sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB semakin menurun ternyata mempengaruhi kesempatan kerja sektor pertanian menjadi *inelastis* bahkan bernilai minus. Sementara hasil EKK *inelastis* negatif lainnya juga dialami kategori industri pengolahan, listrik, gas, dan air, konstruksi, dan keuangan, real estat, dan jasa perusahaan lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang minus di kategori-kategori tersebut. Sektor pertambangan dan

penggalan mempunyai EKK yang tinggi yaitu 8,04 terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi. Kesempatan kerja lapangan usaha pertambangan dan penggalan bersifat *elastisi*, artinya setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan meningkatkan perubahan kesempatan kerja mencapai 8 persen (*increasing return to scale*) (Tabel 6.6). Berbeda dengan periode analisis 2011-2015, EKK bernilai *elastis* terjadi di lapangan usaha pertambangan dan penggalan dan jasa-jasa.

Jumlah tenaga kerja di lapangan usaha pertambangan dan penggalan hanya sekitar 1,04 persen dari total tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisis EKK, maka dalam periode 2012-2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen mampu memberi kesempatan kerja sebanyak 963 orang pekerja per tahun. Besarnya kesempatan kerja yang tercipta akan berbeda bila EKK *elastis* pada lapangan usaha yang mempunyai kontribusi besar.

5. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja menghasilkan produk (Pangestu, 1997:41). Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya keterkaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Menurut J. Ravianto, (1986:3), tingkat produktivitas tenaga kerja diukur menggunakan pendekatan perbandingan antara nilai tambah dengan sumber daya yang terpakai.

Tabel 6.7. Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2012–2016

Sektor	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ Org./ Th.)		Rata-rata Pertumbuhan 2012 – 2016 (%)		Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas TK 2012-2016 (%)
	2012	2016	Ekonomi	Kesempatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	16,63	24,10	0,92	-4,05	9,72
2. Pertambangan & Penggalan	38,99	28,02	1,63	13,12	-7,93
3. Industri Pengolahan	36,63	55,50	4,46	-3,47	10,95
4. Listrik, Gas & Air Bersih	42,65	59,07	7,25	-0,36	8,48
5. Konstruksi	56,87	76,85	2,52	-1,03	7,82
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	29,73	34,90	5,06	4,52	4,08
7. Pengangkutan & Komunikasi	189,75	202,48	5,81	3,32	1,64
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	156,80	233,79	4,56	-2,07	10,50
9. Jasa-jasa	46,70	56,39	6,30	3,13	4,82
Total	41,36	53,91	5,16	0,32	6,85

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Selama periode 2012-2016, lima lapangan usaha mengalami rata-rata pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) di atas 7 persen per tahun, yaitu: industri pengolahan sebesar 11 persen, keuangan, real estat, dan jasa perusahaan 10,5 persen, pertanian 9,7 persen, listrik, gas, dan air 8,5 persen, dan konstruksi 7,8 persen (Tabel 6.7). Secara umum,

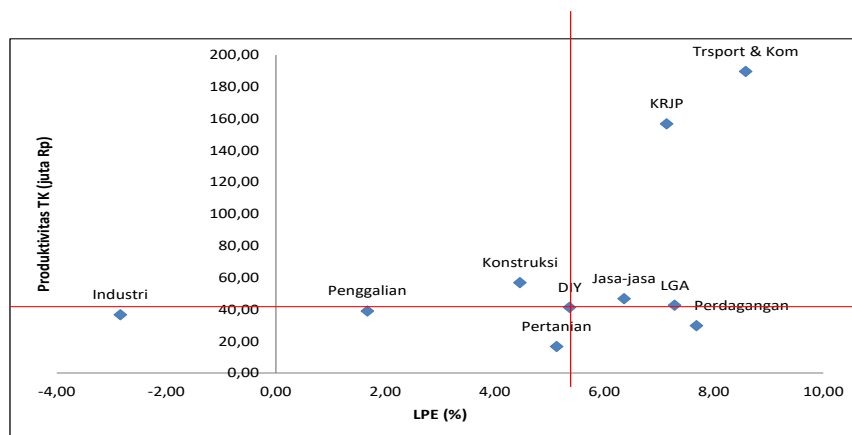
produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu lima tahun terakhir mampu tumbuh sebesar 6,85 persen per tahun. Meskipun rata-rata pertumbuhan produktivitas ini lebih rendah dibanding periode 2011-2015 yang mencapai 8,6 persen per tahun, namun masih tergolong cukup kondusif untuk mendorong geliat perekonomian di D.I. Yogyakarta. Hal ini seiring dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,16 persen per tahun.

Dikaji dari sisi produktivitas, bisa dilihat bahwa di awal periode 2012 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp41,4 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp105,7 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau Rp123,6 ribu per orang per hari untuk 6 hari kerja seminggu. Produktivitas tenaga kerja tahun 2016 naik mencapai Rp53,6 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp146,9 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau sekitar Rp171,8 ribu per orang per hari bila dihitung untuk 6 hari kerja seminggu.

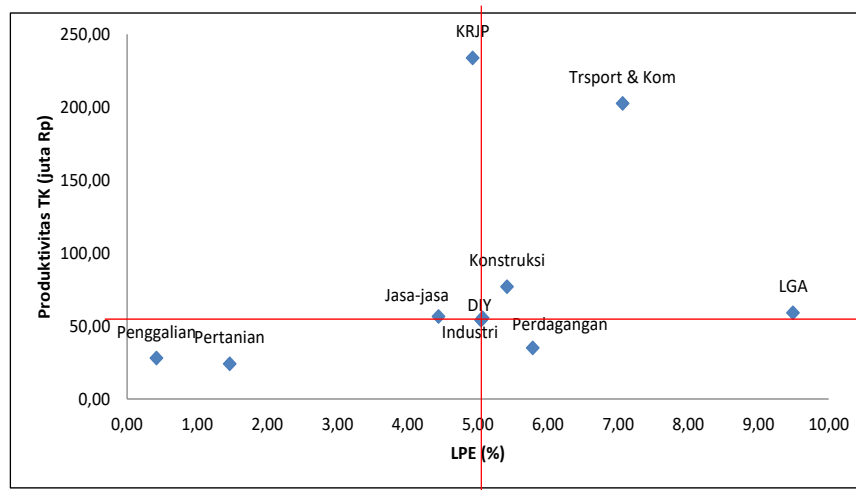
Dilihat secara sektoral, produktivitas tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan yang masing-masing memiliki produktivitas di atas Rp150 juta per pekerja setahun. Dua sektor tersebut nilai produktivitasnya jauh di atas sektor-sektor yang lain dan secara konsisten memimpin baik di awal maupun di akhir periode kajian.

Gambar 6.13 dan 6.14 merupakan hasil analisis Tipologi Klassen dengan mengambil periode kajian tahun 2012 dan 2016. Selama jeda waktu lima tahun telah terjadi perubahan capaian pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. Kondisi pertumbuhan ekonomi level makro yang mengalami perlambatan dari tahun 2014 hingga 2015 dan kemudian mulai bergerak naik di tahun 2016 berdampak pada kinerja produktivitas sektor-sektor berbeda-beda. Pada periode 2012-2016 ini lapangan usaha listrik, gas, dan air bersih, lapangan usaha transportasi dan komunikasi, dan lapangan usaha jasa-jasa masih mampu tumbuh di atas rata-rata. Sementara enam lapangan usaha lain tumbuh di bawah rata-rata.

Gambar 6.13. Plot Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY Tahun 2012



Gambar 6.14. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2016



Dilihat dari dimensi pencapaian produktivitas, secara rata-rata terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sektor listrik, gas, dan air bersih yang rata-rata pertumbuhannya paling tinggi, mempunyai rata-rata produktivitas yang juga di atas rata-rata. Sektor industri pengolahan yang rata-rata pertumbuhannya 4,5 persen dan di bawah rata-rata produktivitas total ternyata masih menghasilkan produktivitas tertinggi yaitu 11 persen.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen untuk indikator produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sektoral, lapangan usaha listrik, gas, dan air bersih dan lapangan usaha transportasi dan komunikasi secara konsisten di tahun 2012 dan 2016 masih bertahan di kategori “sektor yang produktif dan cepat tumbuh”. Sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan dan penggalian di periode awal dan akhir penelitian tetap berada di kategori “sektor tertinggal”. Sektor konstruksi bergerak meningkat, dari posisi “sektor yang maju tetapi tertekan” menjadi “maju dan tumbuh pesat”. Sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan turun dari posisi “maju dan tumbuh pesat” menjadi hanya di kategori “sektor yang maju tetapi tertekan”. Sementara lapangan usaha perdagangan yang kontribusinya terhadap PDRB cukup besar menjadi sektor yang selama periode tersebut tetap berada pada kategori “sektor yang masih dapat berkembang pesat” (kuadran III).

Berdasar plot tersebut tampak bahwa dari 17 kategori atau lapangan usaha yang dikelompokkan menjadi 9 sektor, 5 sektor dapat disebut sebagai sektor yang dapat diandalkan dari sisi produktivitas karena pencapaian produktivitas maupun pertumbuhannya berada di sekitar atau bahkan di atas rata-rata. Sektor-sektor tersebut adalah listrik, gas, dan air, konstruksi, transportasi dan komunikasi, keuangan, dan sektor jasa-jasa. Hal ini memberikan indikasi bahwa arah penguatan ekonomi D.I.Yogyakarta

bertumpu pada kelompok sektor sekunder dan tersier. Sementara sektor industri pengolahan dan perdagangan karena pangsa distribusinya cukup besar masih perlu dipacu kinerja ekonominya. Inovasi produksi, perluasan kualitas dan kuantitas pemasaran, dan promosi perlu diintensifkan lagi untuk mendatangkan pemodal besar sehingga tertarik mengembangkan usahanya di D.I. Yogyakarta.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali DIY, karena menyangkut berbagai aspek lain seperti kesenjangan pendapatan penduduk, sosial, pengangguran, kriminalitas, kebodohan, dan ketimpangan. Meskipun dari sisi perkembangan ekonomi bisa diklaim mengalami banyak kemajuan, namun realitanya berbagai ketimpangan terjadi di tengah masyarakat sebagai pelaku dan juga sebagai obyek pembangunan.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan, namun kemiskinan juga berarti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi kemiskinan melahirkan kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut, didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Dikategorikan kemiskinan relatif, bila seseorang yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seseorang atau sekelompok orang disebut hampir miskin, bila sebelumnya berkecukupan menjadi hampir miskin karena kondisi usahanya yang merosot.

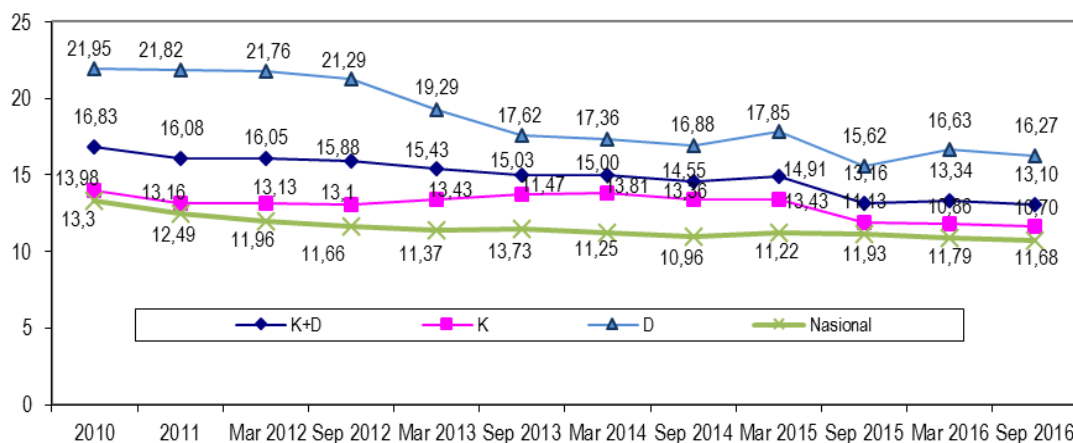
Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. Pertama, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kedua, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Ketiga, kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Dalam bahasan ini hanya akan dibahas tentang kemiskinan yang angkanya dirilis oleh BPS dan digunakan secara resmi oleh pemerintah. Secara umum konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemiskinan absolut.

1. Kemiskinan

Perhitungan kemiskinan yang dilakukan BPS dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), data dasar mengacu pada data Susenas. Pada September 2016 persentase penduduk miskin DIY dibanding September 2014 hanya sedikit sekali sebesar 0,06 poin, yaitu dari 13,16 persen menjadi 13,10 persen. Jumlah penduduk miskin DIY pada September 2016 sebanyak 488,83 jiwa. Rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin selama tujuh tahun terakhir(2010-2016) adalah 2,73 persen per tahun.

Gambar 6.15. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2010 - 2016



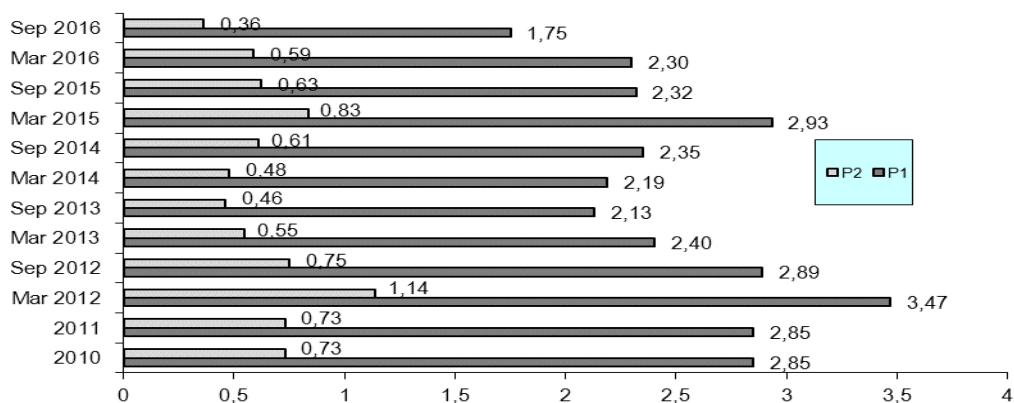
Posisi persentase penduduk miskin DIY masih lebih tinggi dibanding persentase penduduk miskin di tingkat nasional. Namun demikian dilihat kecenderungannya semakin menurun dan mendekati angka nasional. Pada kondisi September 2016 persentase penduduk miskin Indonesia sebanyak 10,70 persen (Gambar 6.15).

Masyarakat perkotaan dan pedesaan mempunyai pola hidup yang berbeda, baik dari mata pencaharian, tingkat konsumsi, maupun dari dimensi kehidupan sosialnya. Umumnya daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan ekonomi dan juga pemerintahan sehingga jenis lapangan pekerjaan lebih beragam. Sementara daerah pedesaan biasanya dihuni oleh petani sehingga kesempatan kerja yang tersedia sebagian besar adalah lapangan pekerjaan pertanian sedangkan pilihan jenis pekerjaan lainnya sangat terbatas. Hal ini yang mendasari perlu untuk melihat perbedaan tingkat kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sampai dengan kondisi September 2016, persentase penduduk miskin di pedesaan masih jauh lebih tinggi dibanding dengan di perkotaan. Namun dilihat tren laju penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih cepat. Ini bisa

menjadi indikasi bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan berhasil memacu pengurangan kemiskinan terutama di pedesaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan tahun 2011 sebesar 21,82 persen turun menjadi 16,27 persen pada September 2016. Sementara di perkotaan persentase penduduk miskin turun dari 13,16 persen pada tahun 2011 menjadi 11,68 persen pada September 2016. Lebih jauh dilihat rata-rata penurunan sejak tahun 2010 hingga 2016, di perkotaan turun sebesar 0,39 persen per tahun, sedangkan di perdesaan turun sebesar 5,83 persen per tahun. Selama kurun waktu 2010 hingga 2013 kesenjangan persentase kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan tampak semakin mengecil, sementara di periode 2013 hingga 2015 kesenjangan tersebut relatif stabil. Namun demikian selepas 2015 tampaknya gap kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan mengarah melebar karena persentase kemiskinan di perkotaan cenderung menurun sedangkan di perdesaan cenderung meningkat. Hal ini perlu ada antisipasi dari pemerintah agar mengintensifkan lagi program-program penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Garis kemiskinan (GK) yang digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan peningkatan sebesar 34,82 persen, yaitu dari Rp224.258,- per kapita per bulan pada tahun 2010 menjadi Rp360.169,- per kapita per bulan pada September 2016. Kenaikan garis kemiskinan antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan harga (inflasi) komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat, pola konsumsi masyarakat, dan perubahan komoditas barang atau jasa yang dikonsumsi.

Gambar 6.16. Indeks Kedalaman (P_1) dan Indeks Keparahan (P_2) Kemiskinan di DIY, 2010 – 2016



Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu ukuran lain seperti **indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1)** dan **indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2)**. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P_2) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan

dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran P_1 dan P_2 dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

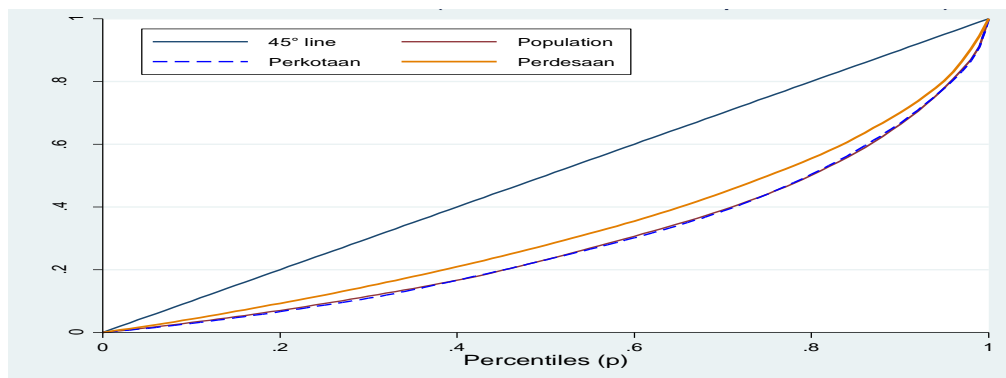
Perkembangan angka Indeks kedalaman (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) selama periode 2010-2016 menunjukkan arah penurunan. Artinya, kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan di DIY semakin berkurang, dari 2,85 persen menjadi 1,75 persen. Demikian pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin kecil, dari 0,73 persen menjadi 0,36 persen. Melalui dua ukuran ini (P_1 dan P_2) bisa dilihat keberhasilan dari program-program percepatan pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

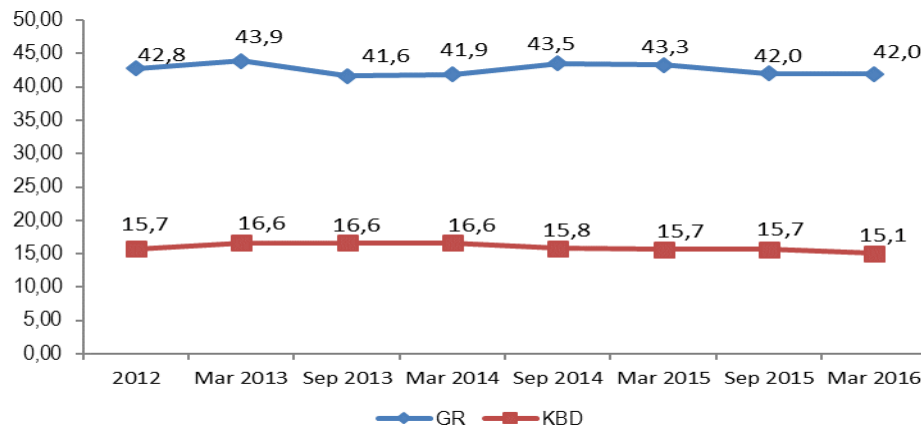
Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan yang disampaikan para pakar, namun pada kajian ini hanya menggunakan Kurva Lorenz, Rasio Gini, dan Kriteria Bank Dunia yang paling lazim digunakan. Ketiga ukuran ini cukup menjelaskan besaran nilai sehingga tingkat perubahan dari tahun ke tahun dapat diamati.

Pada Gambar 6.17 terlihat bahwa dari data Susenas September 2016 Kurva Lorenz masih jauh dari garis diagonal, ini mencerminkan distribusi pendapatan di DIY masih timpang atau belum merata. Demikian pula dengan Gambar 6.18 menjelaskan bahwa pemerataan pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini selama periode 2012-2016 perkembangannya juga masih belum memperlihatkan kecenderungan menggembirakan. Ketimpangan pendapatan yang diterima antarpenduduk meskipun masih dalam kategori moderat tetapi posisinya masih dekat dengan batas kategori timpang.

Gambar 6.17. Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas September 2016



Gambar 6.18. Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY, 2012–2016 (persen)



Indikator lain untuk mendeteksi tingkat distribusi pendapatan adalah ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD). Hasil hitungan ukuran ketimpangan KBD menjelaskan kondisi yang serupa. Persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah semakin menurun dari 16,5 persen pada tahun 2012 menjadi 15,7 persen pada tahun 2016. Demikian pula 40 persen penduduk berpendapatan menengah porsi distribusi pendapatannya ditengarai semakin berkurang. Sebaliknya, pada golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi nampaknya mendapatkan porsi distribusi pendapatan yang semakin lebih besar dan hingga pada kondisi 2015 porsinya mencapai separoh dari total pendapatan.

Fenomena kenaikan Rasio Gini dan penurunan persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di DIY masih **timpang**, meskipun berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh H.T Oshima, ketimpangan pendapatan penduduk DIY masih dalam skala ketimpangan moderat (pada kisaran 30-50 persen). Berdasarkan skala ukuran kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan penduduk DIY juga masuk di skala moderat (*range* 12-17 persen).

Selama periode 2012–2016, pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah berkurang sebesar 0,41 poin, dan pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan menengah juga bertambah sekitar 1,2 poin. Jadi besarnya persentase pendapatan yang diterima oleh 80 persen penduduk golongan menengah ke bawah naik sebesar 0,79 poin, dari 50,21 persen di tahun 2012 menjadi 51 persen di kondisi September 2016 (Tabel 6.8).

Tabel 6.8. Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2012 – 2016

Indikator	2012	2013	Mar 2014	Mar 2015	Mar 2016	Sep 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40% penduduk pendapatan terendah	15,74	16,62	15,81	15,67	15,08	15,33
40% penduduk pendapatan menengah	34,47	33,56	33,75	34,05	37,13	35,67
20% penduduk pendapatan tertinggi	49,78	49,83	50,44	50,28	47,79	49,00
Rasio Gini (%)	0,43	0,44	0,42	0,43	0,42	0,42

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SUSENAS

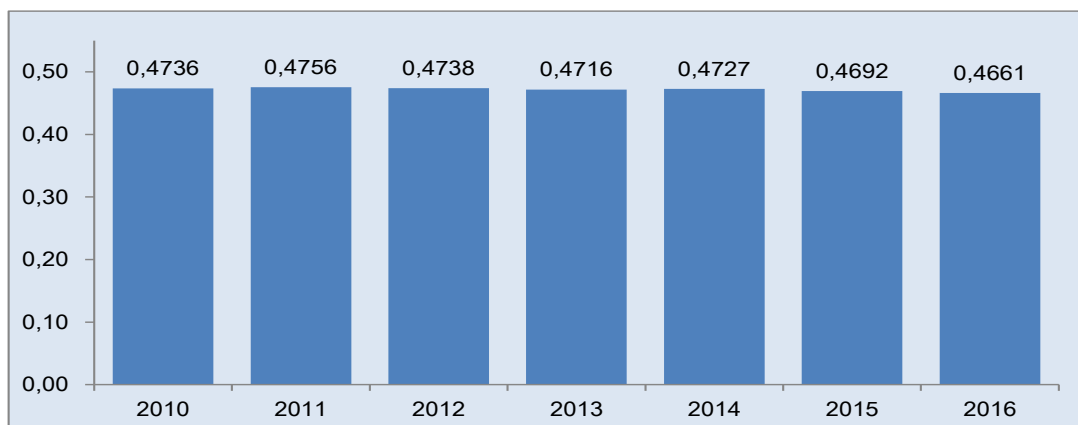
E. Disparitas antar Kabupaten/Kota

Disparitas pendapatan antarindividu penduduk seperti yang dijelaskan dengan Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia cukup populer digunakan sebagai salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain indikator disparitas pendapatan antar individu, disparitas antar wilayah juga perlu dicermati, sebagai indikator ketimpangan antar kabupaten/kota.

1. Indeks Ketimpangan Regional

Berdasarkan data PDRB per kapita kabupaten/kota dan provinsi serta data jumlah penduduk dapat diukur indikator ketimpangan antarwilayah dalam provinsi. Indikator tersebut disebut Indeks Williamson, yang dimaknai sebagai tingkat ketimpangan antarkabupaten/kota. Ketimpangan yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2012-2016 menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 47,38 persen pada tahun 2012 menjadi 46,58 persen pada tahun 2016 (Gambar 6.18). Penurunan ini menunjukkan bahwa antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY meskipun levelnya ketimpangan perekonomiannya moderat yang mendekati batas atas namun arahnya semakin membaik. Hal ini juga terindikasikan dari analisis Tipologi Klassen yang menunjukkan adanya pengurangan kesenjangan antar kabupaten/kota di DIY.

Gambar 6.19. Indeks Williamson DIY, 2012-2016



2. Disparitas Sektoral (*Shift Share Analysis*)

Berdasarkan kategori lapangan usaha ekonomi suatu daerah mempunyai ciri khas yang unik antara yang satu dengan yang lainnya. Besaran kinerja hasil output sektor ekonomi daerah tersebut membuat perbedaan skala ekonomi antardaerah dan bila perbedaan tersebut mencolok timpang maka menimbulkan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan yang signifikan dari pendapatan masing-masing sektor ekonomi. Kesenjangan output antarkategori dalam perekonomian dikenal dengan istilah disparitas sektoral dan dikaji dengan analisis pergeseran (*shift share analysis*). Analisis *shift share* juga berguna untuk mengkaji pergeseran serta peranan perekonomian di suatu daerah. Model ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah tertentu dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi. Di samping itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam hubungannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang lebih tinggi.

Implementasi analisis *shift share* perekonomian dalam provinsi, disparitas sektoral dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dampak pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di sekitarnya, dampak pertumbuhan ekonomi provinsi acuannya, dan juga karena kemampuan pelaku ekonomi dalam kabupaten/kota itu sendiri. Berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi, maka dipengaruhi oleh peran kabupaten/kota terhadap provinsi dan juga hubungan antarsektor atau kategori. Suatu kabupaten/kota atau sektor di kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tinggi, belum tentu memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan provinsi acuannya, karena tergantung pada perannya terhadap provinsi juga.

a. Pangsa Regional (PR)

Hasil analisis *shift share* untuk suatu periode yang dipilih memungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan. Dalam buku ini, analisis *shift share* digunakan untuk mengkaji struktur perekonomian beserta perubahannya selama periode 2012-2016. Hasil perhitungan nilai PR selama periode 2012-2016, Kabupaten Sleman memiliki nilai PR yang tertinggi. Hal ini berarti Kabupaten Sleman menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta selama kurun waktu 2012-2016, atau dengan kata lain Kabupaten Sleman merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta. Kondisi ini masih mirip dengan hasil analisis pada periode kajian sebelumnya. Pangsa terbesar berikutnya dicapai oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Dengan mencermati nilai pangsa masing-masing sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Sleman maka nilai PR tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan. Nilai PR sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta juga merupakan yang tertinggi. Di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul nilai PR sektor industri pengolahan

berada pada urutan kedua setelah sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan di seluruh kabupaten/kota D.I. Yogyakarta dapat menjadi *leading sector* untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6.9. Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2012–2016

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	726.827	1.297.038	1.674.849	1.372.726	24.711
2. Pertambangan & Penggalian	52.862	64.078	98.257	70.029	556
3. Industri Pengolahan	454.922	1.382.493	617.773	2.231.672	1.788.558
4. Pengadaan Listrik, Gas	3.245	12.426	5.621	18.153	27.118
5. Pengadaan Air	5.506	7.969	11.247	8.270	20.488
6. Konstruksi	292.831	822.111	572.473	1.678.669	978.809
7. Perdagangan, Reparasi Mobil & Spd Motor	442.261	669.236	538.241	1.112.578	853.932
8. Pengangkutan & Pergudangan	335.164	446.041	347.306	897.525	539.894
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	124.971	828.615	324.242	1.405.175	1.350.377
10. Informasi dan Komunikasi	198.468	744.770	468.346	1.379.148	1.554.909
11. Jasa Keuangan	88.176	188.846	105.310	388.307	660.953
12. Real Estat	121.311	535.253	202.913	1.186.422	1.114.912
13. Jasa Perusahaan	11.333	45.022	28.503	278.122	144.692
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	274.459	563.045	527.646	910.064	1.081.890
15. Jasa Pendidikan	209.144	582.780	376.416	1.480.182	1.165.588
16. Jasa Kesehatan	48.550	147.046	114.271	330.705	441.607
17. Jasa-jasa	146.538	175.368	203.801	346.675	338.374
PDRB	3.536.569	8.512.137	6.217.215	15.094.420	12.087.368

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

b. Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)

Analisis pergeseran dalam analisis *shift share* ditujukan untuk meneliti struktur ekonomi dan perubahannya sebagai indikator kegiatan ekonomi dalam periode 2012-2016. Komponen analisis pergeseran (*Shift Analysis*) terdiri dari nilai *Proportional Shift* (PS) dan *Different Shift* (DS). Hasil perhitungan dari data PDRB provinsi dan kabupaten/kota, nilai PS dengan arah positif tertinggi di D.I. Yogyakarta dimiliki oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, kategori industri pengolahan dan kategori informasi dan komunikasi memiliki nilai PS dengan arah negatif terbesar. Nilai PS positif urutan terbesar berikutnya setelah akomodasi dan makan minum adalah kategori jasa keuangan dan kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Secara eksplisit hal ini mengindikasikan bahwa dalam periode 2012-2016 struktur ekonomi D.I. Yogyakarta secara makro bertumpu pada kelompok sektor tersier yang sifat output dari aktivitasnya berupa jasa. Pangsa pertanian dalam perekonomian D.I. Yogyakarta semakin menurun digeser kategori usaha lain yang semakin menguat dan menjadi mata pencaharian utama penduduk terutama di wilayah perkotaan.

Hasil penghitungan nilai PS pada level kabupaten/kota menunjukkan bahwa nilai PS yang tertinggi selama periode 2012-2016 dicapai oleh Kota Yogyakarta sama seperti periode kajian sebelumnya. Nilai PS sebesar 441.367 lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Sementara, keempat kabupaten lain justru memiliki nilai PS dengan arah negatif dan nilai negatif terbesar ada di Kabupaten Gunungkidul. Penyebab nilai PS negatif untuk masing-masing kabupaten berbeda, namun pada dasarnya dipengaruhi oleh besarnya nilai negatif PS pada tiga kategori, yaitu: pertanian, industri pengolahan, dan informasi dan komunikasi

Pendorong tingginya nilai PS di Kota Yogyakarta adalah kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori jasa keuangan, dan jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Tiga kategori tersebut di keempat kabupaten lain juga bernilai positif, namun tidak mampu mendorong nilai agregat PS. Di level D.I. Yogyakarta ketiga kategori tersebut tumbuh tinggi, sehingga menjadi sektor yang memicu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6.10 juga menjelaskan bahwa hasil penghitungan PS negatif terbesar di Kulon Progo dan Gunungkidul adalah kategori pertanian, sedangkan untuk Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta adalah kategori informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, nilai PS negatif terbesar di tingkat D.I. Yogyakarta adalah kategori informasi dan komunikasi.

Tabel 6.10. *Proportional Shift (PS)* menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2012–2016

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	-122.920	-219.353	-283.248	-232.153	-4.179
2. Pertambangan & Penggalian	-18.333	-22.223	-34.076	-24.286	-193
3. Industri Pengolahan	-84.134	-255.681	-114.252	-412.731	-330.780
4. Pengadaan Listrik, Gas	-950	-3.639	-1.646	-5.316	-7.942
5. Pengadaan Air	-1.525	-2.208	-3.116	-2.291	-5.676
6. Konstruksi	-16.221	-45.540	-31.711	-92.988	-54.220
7. Perdagangan, Reparasi Mobil & Spd Motor	65.318	98.840	79.493	164.317	126.118
8. Pengangkutan & Pergudangan	7.378	9.819	7.646	19.758	11.885
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	47.861	317.342	124.178	538.152	517.166
10. Informasi dan Komunikasi	-72.331	-271.430	-170.688	-502.628	-566.684
11. Jasa Keuangan	54.788	117.338	65.434	241.271	410.678
12. Real Estat	4.449	19.631	7.442	43.514	40.891
13. Jasa Perusahaan	-2.473	-9.826	-6.221	-60.700	-31.579
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	85.826	176.070	165.000	284.586	338.318
15. Jasa Pendidikan	-5.827	-16.236	-10.487	-41.237	-32.473
16. Jasa Kesehatan	6.204	18.790	14.602	42.259	56.430
17. Jasa-jasa	-11.431	-13.680	-15.897	-27.042	-26.395
PDRB	-64.321	-101.984	-207.548	-67.514	441.367

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Kondisi perkembangan output kategori pertanian dan industri pengolahan secara umum masih sama seperti tahun sebelumnya. Kategori pertanian terlihat semakin melambat pertumbuhannya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, terutama di Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Sleman. Kategori industri pengolahan juga mengalami hal yang sama, meskipun perlambatannya tidak secepat kategori pertanian. Hal ini yang menjadikan salah satu penyebab bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta erat kaitannya dengan melambatnya pertumbuhan kategori pertanian dan industri pengolahan.

Tabel 6.11. *Different Shift (DS)* menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2012–2016

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	20.521	87.308	12.128	-111.101	-8.855
2. Pertambangan & Penggalian	5.842	-4.533	-8.415	7.173	-67
3. Industri Pengolahan	-4.010	80.958	22.617	-51.358	-48.207
4. Pengadaan Listrik, Gas	-88	-35	469	9	-354
5. Pengadaan Air	-621	-59	544	244	-108
6. Konstruksi	17.492	-3.104	52.280	-14.576	-52.091
7. Perdagangan, Reparasi Mobil & Spd Motor	-5.417	49.632	-2.302	22.938	-64.851
8. Pengangkutan & Pergudangan	-150.121	-87.861	-93.933	496.835	-164.920
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-25.693	117.015	-26.008	-139.735	74.421
10. Informasi dan Komunikasi	5.184	-13.752	87.785	122.628	-201.846
11. Jasa Keuangan	3.177	15.508	26.252	23.345	-68.283
12. Real Estat	-16.962	59.428	29.827	5.219	-77.512
13. Jasa Perusahaan	-1.564	1.516	2.121	5.545	-7.618
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	9.772	30.828	-38.297	30.490	-32.793
15. Jasa Pendidikan	-9.438	53.100	27.133	31.221	-102.016
16. Jasa Kesehatan	-4.397	12.597	7.860	24.898	-40.958
17. Jasa-jasa	-36.542	2.212	24.288	29.091	-19.049
PDRB	-192.867	400.759	124.350	482.866	-815.107

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Hasil perhitungan nilai *Different Shift (DS)* menunjukkan bahwa tiga kabupaten memiliki nilai DS dengan arah positif, yakni Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Sementara, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta memiliki nilai DS dengan arah negatif. Nilai DS tertinggi selama periode 2012-2016 dicapai oleh Kabupaten Sleman. Nilai positif tertinggi berikutnya yaitu Kabupaten Bantul, dan Gunungkidul. Hasil penghitungan nilai DS ini menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman memiliki daya saing regional yang lebih kuat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Keunggulan daya saing perekonomian regional Sleman terutama ditopang oleh kategori-kategori pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, dan jasa pendidikan. Jasa pendidikan masuk menjadi sektor yang

unggul daya saingnya pada periode kajian ini menggantikan daya saing sektor pertanian yang unggul pada periode sebelumnya. Daya saing regional Bantul terutama ditopang oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dan pertanian, dan industri pengolahan. Sementara itu, daya saing di Kabupaten Gunungkidul terutama ditopang oleh kategori informasi dan komunikasi dan konstruksi.

Nilai pergeseran netto positif (*upward different shift*) tertinggi diperoleh Kabupaten Sleman (415.352) karena delapan kategori bernilai positif, terutama pengangkutan dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa pemerintahan. Artinya, Kabupaten Sleman merupakan lokasi yang sangat menguntungkan (*locational advantage*) bagi perkembangan lapangan usaha tersebut dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sebaliknya, Kota Yogyakarta memiliki nilai pergeseran netto negatif (*downward different shift*) tertinggi, yakni sebesar negatif 373.740. Hal ini dimungkinkan karena Kota Yogyakarta yang merupakan pusat perkotaan sudah mulai jenuh perkembangannya dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Lapangan usaha informasi dan komunikasi bernilai negatif terbesar di Kota Yogyakarta karena pertumbuhan lapangan usaha ini sudah melewati tren meningkat, sementara di kabupaten-kabupaten lain masih berkembang dan tumbuh.

Tabel 6.12. Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2012-2016

Kab/Kota	Perub. PDRB	Pangsa Regional	Nilai Pergeseran		Komponen Pergeseran		
			Netto	%	PS	DS	PS+DS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kulon Progo	3.279.381	3.536.569	-257.188	-7,84	-64.321	-192.867	-257.188
Bantul	8.810.911	8.512.137	298.775	3,39	-101.984	400.759	298.775
Gunungkidul	6.134.017	6.217.215	-83.198	-1,36	-207.548	124.350	-83.198
Sleman	15.509.771	15.094.420	415.352	2,68	-67.514	482.866	415.352
Yogyakarta	11.713.628	12.087.368	-373.740	-3,19	441.367	-815.107	-373.740

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6.12 juga tampak bahwa hanya Kota Yogyakarta memiliki nilai PS positif. Spesialisasi Kota Yogyakarta terletak pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, dan jasa pemerintahan karena sebagai ibukota provinsi memiliki pertumbuhan yang tinggi di tingkat D.I. Yogyakarta. Dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta mempunyai struktur ekonomi yang menguntungkan (*favourable economic structure*) untuk kategori-kategori tersebut.

Berdasarkan nilai PS dan DS selama periode 2012-2016, kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dikelompokkan dalam tiga kategori seperti yang disajikan pada Tabel 6.13. Hasil ini mirip dengan analisis pada periode sebelumnya yang juga terdiri dari tiga kelompok. Pada kelompok pertama (Kuadran II), yang merepresentasikan daerah yang maju pesat

dengan ditandai oleh nilai PS dan DS bertanda positif, ternyata tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok ini.

Kelompok kedua, mencakup daerah yang memiliki nilai DS bertanda positif dan nilai PS bertanda negatif atau disebut daerah yang sedang berkembang. Kelompok ini terdiri dari tiga kabupaten, yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Sementara, kelompok ketiga merepresentasikan daerah yang perekonomiannya cenderung berpotensi yang ditandai oleh nilai PS positif dan nilai DS negatif. Kota Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang termasuk dalam kelompok ini, dan kategori ini sama dengan analisis pada periode 2011-2015. Kelompok IV, merepresentasikan daerah dengan daya saing lemah disandang oleh Kabupaten Kulon Progo.

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan suatu situasi pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, heterogenitas karakteristik suatu wilayah menjadi pemicu ketimpangan antardaerah atau antarsektor di suatu wilayah. Masalah ketimpangan ekonomi antardaerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi. Ardani (1992) mengemukakan bahwa ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Tabel 6.13. Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2012-2016

Kategori	Komponen Pertumbuhan		
	DS	PS	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab/Kota yang pertumbuhan ekonominya pesat (I):			
-	-	-	-
Kab/Kota sedang berkembang (II):			
1. Kabupaten Sleman	482.866	-67.514	5,50
2. Kabupaten Bantul	400.759	-101.984	5,18
3. Kabupaten Gunungkidul	124.350	-207.548	4,79
Kab/Kota yang cenderung berpotensi (III):			
1. Kota Yogyakarta	-815.107	441.367	5,26
Kab/Kota mempunyai daya saing lemah (IV):			
2. Kulon Progo	-192.867	-64.321	4,52

Sumber : PDRB D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota (data diolah)

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar 110,10 triliun rupiah, bertambah sekitar 8,65 triliun rupiah dibanding tahun 2015 yang sebesar 101,45 triliun rupiah. Sementara bila dibandingkan tahun 2012 bertambah sebanyak 32,85 triliun rupiah.
2. Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2016 sebesar 87,69 triliun rupiah, bertambah sebanyak 4,21 triliun rupiah dari 83,47 triliun rupiah di tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada nilai PDRB atas harga konstan, menunjukkan bahwa tahun 2016 ekonomi D.I. Yogyakarta tumbuh 5,05 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 4,95 persen.
3. Selama kurun waktu 2012-2016, ekonomi D.I. Yogyakarta tumbuh rata-rata 5,16 persen per tahun. Kategori yang rata-rata pertumbuhannya tinggi (di atas 6 persen) adalah: jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, jasa kesehatan, informasi dan komunikasi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum.
4. Pada tahun 2016, kategori industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pada distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 13,21 persen. Kategori pertanian dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan porsi distribusi terbesar berikutnya masing-masing 10,41 persen dan 10,22 persen. Perekonomian D.I. Yogyakarta juga ditopang oleh lapangan usaha konstruksi, jasa pendidikan, jasa pemerintahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, dan real estat, dengan kontribusi masing-masing antara 7 sampai 9 persen.
5. Kategori perdagangan, kategori angkutan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, dan kategori jasa-jasa lainnya yang dikelompokkan dalam sektor tersier memegang kontribusi dua pertiga (66,27 persen) dari total PDRB tahun 2016. Sementara sektor sekunder pangsa distribusinya sebesar 22,79 persen. Kontribusi sektor sekunder dan tersier ditengarai semakin meningkat seiring dengan kondisi kontribusi sektor primer yang semakin menurun. Ini mengindikasikan kegiatan ekonomi di DIY sudah moderen dan memerlukan SDM berpendidikan tinggi, dan teknologi informasi yang baik.
6. Tahun 2016 menjadi tonggak titik balik *recovery economy* karena dua tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi melambat sebagai dampak krisis global yang

juga melanda Indonesia. Penguatan ekonomi 2016 didukung oleh pertumbuhan positif semua lapangan usaha.

7. Peran sektoral dalam menggerakkan perekonomian 2016, ditunjukkan oleh andil pertumbuhannya. Penyumbang terbesar pertumbuhan adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi, yaitu 0,89 persen. Andil pertumbuhan terbesar urutan berikutnya adalah industri pengolahan, yakni 0,65 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 0,52 persen, konstruksi dan perdagangan masing-masing sebesar 0,51 persen.
8. Lima kabupaten/kota yang ada di D.I. Yogyakarta selama periode 2012-2016 rata-rata pertumbuhannya pada kisaran 4,71 persen sampai 5,43 persen, dengan posisi terendah Kulon Progo dan tertinggi Sleman.
9. PDRB per kapita riil tahun 2016 sebesar Rp23.566.322, meningkat sebanyak Rp3,38 juta dibanding tahun 2012. Selama lima tahun tersebut PDRB per kapita riil tumbuh rata-rata 3,95 persen per tahun, dengan kisaran pertumbuhan tiap tahunnya antara 3,75 persen hingga 4,23 persen.
10. Inflasi IHK dan inflasi PDRB tidak mempunyai korelasi statistik yang nyata sehingga kenaikan harga konsumen di pasar tidak memberikan dampak yang nyata pada perubahan nilai tambah di tingkat produsen, atau sebaliknya.
11. Berdasarkan indeks perkembangan sektoral atas dasar harga konstan, lima kategori yang menunjukkan perkembangan lebih cepat, yaitu: kategori jasa keuangan, kategori informasi dan komunikasi, kategori listrik dan gas, kategori jasa kesehatan, dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Indeks perkembangan atas harga konstan 2010 kategori-kategori tersebut masing-masing mencapai di atas 144.
12. Gabungan luas wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta hanya sebesar 19 persen dari luas wilayah D.I. Yogyakarta, namun secara ekonomi kedua wilayah tersebut menguasai 60 persen dari total PDRB DIY. Sementara Gunungkidul dan Kulon Progo yang luas wilayahnya meliputi 65 persen dari wilayah D.I. Yogyakarta hanya memperoleh bagian sekitar 21,2 persen dari total PDRB D.I. Yogyakarta.
13. Berdasarkan distribusi persentase PDRB di masing-masing kabupaten/kota, dapat dideteksi kategori yang memberikan pangsa terbesar dalam struktur PDRB. Di Kabupaten Kulon Progo adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Di Kabupaten Bantul yang dominan adalah industri pengolahan, pertanian, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Di Gunungkidul kontribusi tiga besarnya adalah pertanian, konstruksi, dan jasa pemerintahan. Di Sleman yang menjadi *leading sector* adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara di Kota Yogyakarta tiga kategori dengan kontribusi

persentase terbesar adalah industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan informasi dan komunikasi.

14. Kesenjangan PDRB per kapita riil Kota Yogyakarta dengan empat kabupaten lainnya terlihat mencolok. Perbandingan PDRB per kapita antara Kota Yogyakarta dengan Kulon Progo yang paling rendah di antara tiga kabupaten lain mencapai lebih dari 3,5 kali lipatnya. Sementara Kota Yogyakarta bila dibandingkan dengan Sleman yang PDRB per kapitanya paling tinggi di antara tiga kabupaten lain sebesar 2,2 kali lipat.
15. Kontribusi PDRB D.I. Yogyakarta terhadap jumlah PDRB 33 provinsi sangat kecil yaitu hanya 0,87 persen. Demikian pula kontribusinya terhadap jumlah PDRB Pulau Jawa juga terendah yaitu hanya 1,49 persen. Di kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), D.I. Yogyakarta bersama Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan tiga provinsi yang kontribusinya terhadap total PDRB 34 provinsi di bawah 1 persen.
16. Struktur PDRB menurut Pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 67,60 persen. Artinya, tingkat konsumsi masyarakat sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi atau pembentukan PDRB. Pengaruh terbesar berikutnya adalah investasi, baik pemerintah maupun swasta, yang ditunjukkan oleh kontribusi komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yaitu 30,36 persen. Komponen pengeluaran pemerintah menjadi penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi 16,75 persen.
17. Pada tahun 2012 setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen dibutuhkan pertumbuhan investasi sebesar 5,48 persen, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan investasi yang diperlukan lebih tinggi yaitu 5,85 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong semakin tingginya iklim investasi, namun di sisi lain juga bermakna bahwa semakin kurang efisiennya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
18. Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran di tahun 2016 tampak semakin membaik, meskipun belum sekuat kondisi 2012 hingga 2013. Hanya saja untuk komponen konsumsi lembaga swasta nonprofit rumah tangga, ekspor luar negeri, dan net ekspor antardaerah masih mengalami kontraksi. Nampaknya sebagai kota tujuan utama wisata di Indonesia, ciri khas roda perekonomian D.I. Yogyakarta adalah cocok untuk sebagai ladang pemasaran, baik produk komoditas-komoditas pertanian maupun barang-barang industri pengolahan.
19. Secara umum dalam periode 2012 hingga 2016 pertumbuhan ekonomi DIY berada pada tren yang meningkat lagi mulai tahun 2015. Semua lapangan usaha tumbuh

positif, meskipun pertumbuhannya masih lambat dan tren perkembangannya belum semua ke arah meningkat.

20. Analisis Tipologi Klassen yang diaplikasikan untuk memetakan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita menghasilkan dua kelompok besar pertumbuhan. Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul masuk dalam kelompok daerah yang sedang berkembang (Kuadran II). Kota Yogyakarta merosot dari kuadran I ke kuadran III yaitu menjadi hanya daerah yang cenderung berpotensi. Kabupaten Kulon Progo tetap berada pada kelompok daerah tertinggal (Kuadran IV). Dibanding dengan periode 2011-2015, Bantul turun peringkat dari kuadran I ke kuadran II.
21. Tahun 2012 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp41,36 juta per orang per tahun, di tahun 2016 meningkat menjadi Rp53,91 juta per orang per tahun. Dengan demikian, selama kurun waktu 2012 hingga 2016 rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sebesar 6,85 persen per tahun. Secara sektoral pertumbuhan produktivitas tertinggi ada pada lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha keuangan, real estat, dan jasa perusahaan, dan lapangan usaha pertanian.
22. Pada periode 2012-2016, pertumbuhan kesempatan kerja tidak elastis/*inelastis* dengan pertumbuhan ekonomi, karena perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) hanya 0,06 persen per tahun. Secara sektoral hanya lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang bersifat elastis, atau angka EKK di atas 1 persen.
23. Produktivitas sektor-sektor cukup tinggi namun pertumbuhan kesempatan kerja rendah sehingga semua lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian, mempunyai angka elastisitas kesempatan kerja yang *inelastis*. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan perkembangan produksi sektor-sektor bersifat padat modal.
24. Analisis Tipologi Klassen untuk produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi menempatkan tiga sektor yang dapat diandalkan karena prestasi pencapaian produktivitas dan pertumbuhan ekonominya, yaitu sektor konstruksi, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor listrik, gas, dan air bersih.
25. Kemiskinan di DIY dibandingkan provinsi-provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur masih tergolong tinggi (tertinggi di Pulau Jawa).
26. Permasalahan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan juga masih terlihat tinggi di level kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Namun demikian program pembangunan untuk pengentasan kemiskinan dan untuk mengatasi jurang kesenjangan nampak menghasilkan kinerja yang membanggakan. Hal ini terukur dari tren menurunnya

persentase penduduk miskin dan juga menurunnya kesenjangan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Rata-rata jumlah penduduk miskin selama tujuh tahun terakhir (2010-2016) juga menurun 2,73 persen per tahun. Persentase penduduk miskin tahun 2010 sebesar 16,83 persen turun menjadi 13,16 persen di Maret 2016 dan turun lagi menjadi 13,10 persen di September 2016.

27. Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi kendala yang agak serius karena posisi angka Gini Rasio (GR) masih di level 0,42. Artinya, angka gini rasio yang ditargetkan pemerintah di bawah 0,42 di akhir periode RPJMD 2012-2017 nampaknya berat untuk bisa terrealisasi. Ketimpangan juga masih menganga dilihat dari distribusi pendapatan antara yang kaya dan miskin, karena 40 persen penduduk berpendapatan terendah dan 40 penduduk berpendapatan menengah, atau bila digolongkan menjadi 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah, hanya memperoleh 51 persen dari total distribusi pendapatan. Sementara itu, golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi memperoleh 49 persen dari total distribusi pendapatan.
28. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota yang diukur dengan Indeks Williamson kecenderungannya ke arah kondisi yang lebih baik meskipun penurunan angka ketimpangannya relatif kecil. Kategori pertumbuhan berdasarkan analisis *Shift Share* data PDRB kabupaten/kota menyimpulkan tidak ada kabupaten/kota yang pertumbuhannya pesat (kuadran I). Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul masuk kelompok daerah yang sedang berkembang (kuadran II). Kota Yogyakarta hanya menempati daerah yang cenderung berpotensi (kuadran III), dan Kabupaten Kulon Progo masih merupakan daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV).

B. Rekomendasi

1. Perlu ada kebijakan pembangunan yang mampu memperluas kesempatan kerja bagi SDM yang berpendidikan tinggi. Hal ini akan berdampak juga pada kemajuan pembangunan manusia karena akan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di D.I. Yogyakarta sehingga IPM juga meningkat.
2. Kesenjangan distribusi pendapatan antarwilayah dan antarpenduduk sudah semakin memprihatinkan. Permasalahan ini akan teratasi bila upaya memperluas sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kulon Progo dan Gunungkidul.
3. Untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja, pemerintah pusat dan daerah perlu mengambil kebijakan yang bisa mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, real estat, dan jasa perusahaan.

4. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah pemerintah daerah mampu menyediakan kebutuhan SDM yang berpendidikan tinggi untuk mendukung kegiatan sektor tersier, menyediakan kebutuhan IT untuk perusahaan serta publik, serta sarana dan prasarannya. (lihat analisis lapangan usaha/sektoral).
5. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah agar kesenjangan kabupaten/kota tereliminir. Kebijakan-kebijakan yang mendukung penurunan kesenjangan daerah harus terus dilakukan mengingat daerah-daerah dengan potensi ekonomi tinggi seperti Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul masih mungkin mengejar ketertinggalan ekonominya dari Kabupaten/kota lainnya di D.I. Yogyakarta (lihat analisis Tipologi Klassen).
6. Kependudukan dan ketenagakerjaan perlu memperoleh perhatian khusus mengingat persoalan kependudukan dan ketenagakerjaan menjadi masalah besar di masa sekarang dan mendatang baik secara ekonomi maupun sosial. Untuk kajian lebih lanjut dan bila data tersedia dibutuhkan analisis elastisitas kesempatan kerja per lapangan usaha per kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta dan juga produktivitas tenaga kerja per lapangan usaha dan per kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
7. Untuk memberikan solusi yang lebih efektif dalam penurunan jumlah penduduk miskin maka pemerintah daerah perlu mengkaji lebih mendalam tentang kemiskinan di DIY per kabupaten/kota. Hal ini untuk mengetahui penyebab serta lokasi jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
8. Perlu adanya data ICOR per kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Agar kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kebutuhan dan efektifitas investasi dapat dilihat per kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.
9. Analisis Ekspor-Import antar provinsi perlu diperluas dan dipertajam untuk melihat *spillover effect* yang terjadi. Peranan Provinsi Jawa Tengah atau Kabupaten Klaten, Magelang, Purworejo serta kabupaten sekitar D.I. Yogyakarta lainnya perlu dianalisis untuk melihat seberapa penting dan besar dominasi mereka dalam perekonomian D.I. Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik RI, 2017, ***“Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha”***, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Bappeda dan BPS Provinsi DIY, 2016, ***“ICOR Sektoral Provinsi D.I. Yogyakarta 2011-2015”***, Kerjasama Bappeda dan BPS DIY.
- Bappeda dan BPS Provinsi DIY, 2016, ***“Analisis PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta 2011-2015”***, Kerjasama Bappeda dan BPS DIY.
- BPS Provinsi DIY, 2017, ***“Keadaan Angkatan Kerja Di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2016”***, Yogyakarta.
- Herrick Bruce dan Kendleberger Charles P, 1988, ***“Economic Development (diterjemahkan oleh Drs. Komarudin, Drs. A. Hasyuri Ali, Drs. G. Kartasapoetra)”***, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, ***“Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan”***, PT Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2013, ***“Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi”***, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, ***“Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang”***, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mubyarto, 2003, ***“Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila”*** Seminar Bulanan III, PUSTEP-UGM, Yogyakarta 1 April 2003.
- Nellis, Joseph G. dan David Parker, 2002, ***“The Essence of The Economy”***, Second Edition, Prentice Hall of India, New Delhi.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012, ***“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017”***, Yogyakarta.
- Simanjuntak, P.J, 2001, ***“Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”***, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sjafrizal, ***“Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat”***, Prisma, LP3ES No. 3.
- Todaro, Michael P, and Smith, Stephen C, 2015, ***“Economic Development 12th Edition”***, Addison Wesley, London.
- Thomas, V., Dailami M., Dhareshwar A., Kaufmann D., Kishor N., Lopez R., and Wang Yang, 2001, ***“The Quality of Growth”***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widodo, Suseno Triyanto Hg, 1990, ***“Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia”***, Kanisius, Yogyakarta.
- Prasetyo, Eko, 2008, ***“The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas”***. JEJAK, Volume 1, Nomor 1, September, 2008, ___.

LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1.
PDRB DIY Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2104	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,640,411.7	9,449,019.7	9,769,112.4	10,793,840.1	11,456,173.0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7,632,052.3	8,347,274.0	8,545,054.9	9,442,590.2	10,036,120.9
	a. Tanaman Pangan	3,268,290.6	3,318,116.3	3,277,477.0	3,808,409.6	4,134,843.7
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	257,490.7	284,221.0	262,539.4	287,655.4	298,985.8
	c. Perkebunan Semusim	43,897.5	46,720.3	51,806.1	53,795.0	55,701.7
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,101,951.8	2,563,417.3	2,601,564.0	2,735,787.8	2,815,065.7
	e. Perkebunan Tahunan	189,760.2	209,369.1	230,395.0	225,176.9	254,106.9
	f. Peternakan	1,616,347.0	1,757,555.4	1,930,499.3	2,136,761.6	2,265,239.7
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	154,314.4	167,874.7	190,774.1	195,003.9	212,177.4
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	707,783.8	750,207.7	816,386.5	902,903.4	955,185.0
	3 Perikanan	300,575.6	351,538.1	407,671.0	448,346.5	464,867.1
B	Pertambangan dan Penggalian	467,147.5	495,039.5	537,599.5	573,133.0	593,156.2
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	467,147.5	495,039.5	537,599.5	573,133.0	593,156.2
C	Industri Pengolahan	10,242,467.7	11,563,733.8	12,614,921.0	13,303,467.8	14,547,753.4
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	5,046,199.5	5,822,563.6	6,655,855.8	7,103,601.4	7,941,762.8
	3 Pengolahan Tembakau	700,417.4	817,470.4	732,370.8	742,297.4	794,422.8
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,028,655.1	1,207,632.4	1,339,987.1	1,458,642.5	1,602,087.3
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	300,615.0	341,306.5	351,932.3	378,490.2	404,318.7
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	186,772.9	200,182.6	201,488.0	204,404.5	205,278.4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	240,948.4	254,921.0	277,247.2	293,838.4	322,792.3
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	108,993.8	106,227.3	115,955.4	131,001.4	142,898.6
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	334,607.9	352,913.7	343,097.6	318,017.1	306,053.3
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	345,926.4	400,598.5	429,587.2	426,568.7	438,024.2
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	782,670.9	820,253.5	884,077.4	890,732.6	935,009.2
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	404,523.2	414,548.7	460,662.9	494,955.9	542,431.8
	14 Industri Alat Angkutan	3,570.8	3,597.0	3,332.5	3,104.5	3,052.6
	15 Industri Furnitur	495,185.1	532,612.8	523,488.8	538,313.4	573,131.6
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	263,381.5	288,905.8	295,838.0	319,499.7	336,489.5
D	Pengadaan Listrik, Gas	90,992.0	86,394.5	101,943.8	118,012.2	141,794.3
	1 Ketenagalistrikan	90,117.5	85,453.6	100,951.3	117,037.3	140,746.6
	2 Gas	874.5	940.9	992.5	974.9	1,047.7
E	Pengadaan Air	83,130.3	89,645.3	102,669.9	109,697.2	114,764.9
F	Konstruksi	7,350,632.3	8,060,750.5	8,722,682.2	9,499,916.9	10,286,733.8
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	6,413,318.6	6,938,421.0	7,681,034.9	8,342,646.2	9,332,037.8
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,020,529.8	1,163,092.2	1,292,028.2	1,401,769.5	1,569,787.6
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	5,392,788.8	5,775,328.8	6,389,006.7	6,940,876.7	7,762,250.2
H	Transportasi dan Pergudangan	4,256,792.3	4,783,126.5	5,313,232.9	5,765,069.5	6,253,137.4
	1 Angkutan Rel	57,363.0	62,282.2	84,542.3	102,044.4	111,181.6
	2 Angkutan Darat	2,722,687.8	2,975,031.0	3,265,119.4	3,486,346.9	3,627,080.5
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	594,682.9	777,432.2	886,134.0	992,290.7	1,206,916.6
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	882,058.6	968,381.1	1,077,437.1	1,184,387.5	1,307,958.7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,203,277.9	8,284,060.7	9,324,121.0	10,383,390.7	11,255,100.2
	1 Penyediaan Akomodasi	1,395,506.5	1,665,470.5	1,814,459.7	2,050,478.2	2,273,996.0
	2 Penyediaan Makan Minum	5,807,771.4	6,618,590.2	7,509,661.3	8,332,912.5	8,981,104.2
J	Informasi dan Komunikasi	7,331,839.4	7,572,218.9	7,897,507.2	8,244,241.8	8,957,494.4
K	Jasa Keuangan	2,696,113.0	3,170,932.7	3,602,560.5	4,028,358.1	4,342,146.0
	1 Bank	1,928,289.7	2,342,861.6	2,702,047.9	3,058,440.9	3,280,899.4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	244,378.3	255,538.0	286,504.7	305,491.8	329,446.1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	516,863.7	565,726.3	606,489.7	656,551.6	723,399.2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6,581.3	6,806.8	7,518.2	7,873.8	8,401.4
L	Real Estate	5,429,459.0	5,815,245.1	6,497,271.5	7,116,820.4	7,808,288.9
M,N	Jasa Perusahaan	836,060.2	855,439.4	956,390.6	1,048,359.3	1,115,193.5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,931,303.6	6,702,818.7	7,492,245.8	8,379,231.5	9,217,107.9
P	Jasa Pendidikan	6,364,491.8	6,816,002.1	7,600,854.9	8,598,743.9	9,088,420.8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,928,468.3	2,094,674.4	2,276,361.0	2,553,550.8	2,764,048.7
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,981,955.1	2,147,020.2	2,351,975.0	2,589,171.1	2,824,989.7
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	77,247,860.6	84,924,542.9	92,842,484.2	101,447,650.4	110,098,340.8

Lampiran Tabel 2.
PDRB DIY Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2104	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,500,728.2	7,670,026.2	7,508,980.3	7,667,601.7	7,779,801.3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6,588,236.9	6,741,414.9	6,539,528.2	6,666,702.6	6,766,494.7
	a. Tanaman Pangan	2,796,754.6	2,808,220.7	2,760,023.5	2,838,357.6	2,916,633.1
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	232,437.3	235,350.9	212,590.9	220,477.6	219,115.2
	c. Perkebunan Semusim	40,373.5	41,348.4	41,666.1	40,253.7	38,481.5
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,828,045.6	1,942,962.6	1,731,959.8	1,709,503.9	1,694,434.8
	e. Perkebunan Tahunan	158,001.3	166,790.4	167,480.0	160,968.8	163,005.1
	f. Peternakan	1,397,691.3	1,409,959.7	1,478,301.7	1,548,209.3	1,581,601.3
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	134,933.3	136,782.1	147,506.3	148,931.6	153,223.6
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	654,157.9	657,699.9	680,932.8	700,236.9	708,450.0
	3 Perikanan	258,333.4	270,911.3	288,519.3	300,662.1	304,856.6
B	Pertambangan dan Penggalian	443,626.9	461,013.8	470,734.6	471,323.2	473,298.7
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	443,626.9	461,013.8	470,734.6	471,323.2	473,298.7
C	Industri Pengolahan	9,435,888.0	10,084,213.3	10,469,748.6	10,693,035.7	11,234,803.5
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	4,701,531.3	5,141,145.2	5,550,764.0	5,724,930.3	6,111,908.0
	3 Pengolahan Tembakau	567,358.2	571,755.5	456,644.9	453,234.7	460,060.2
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	896,425.4	982,801.6	1,059,015.3	1,122,114.4	1,193,570.6
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	263,351.8	279,763.8	279,526.2	300,273.3	310,008.0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	184,474.5	193,358.3	190,616.0	186,553.1	183,513.3
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	234,555.6	238,009.9	248,636.7	253,685.7	268,713.7
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	117,627.1	117,513.9	125,873.3	135,404.1	144,381.0
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	311,558.1	310,988.6	292,300.2	265,704.0	246,688.5
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	322,467.1	353,713.2	359,128.1	335,701.7	336,586.0
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	734,753.7	769,924.8	788,641.2	777,412.5	801,506.7
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	377,954.7	375,320.8	403,331.4	430,750.2	450,695.5
	14 Industri Alat Angkutan	3,205.9	3,139.4	2,831.6	2,631.5	2,514.7
	15 Industri Furnitur	476,249.7	488,110.6	466,972.4	453,940.5	470,858.1
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	244,375.0	258,667.7	245,467.5	250,699.7	253,799.2
D	Pengadaan Listrik, Gas	110,269.8	116,969.2	124,960.1	127,701.3	145,910.1
	1 Ketenagalistrikan	109,542.9	116,199.0	124,160.4	126,892.6	145,088.0
	2 Gas	727.0	770.2	799.8	808.7	822.1
E	Pengadaan Air	78,992.2	79,739.9	82,855.4	85,260.2	87,268.2
F	Konstruksi	6,772,475.9	7,106,854.7	7,508,543.3	7,826,700.7	8,250,608.3
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	5,878,431.7	6,187,855.1	6,540,107.5	6,944,902.7	7,367,623.9
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	926,345.2	983,772.5	1,058,936.0	1,091,042.1	1,165,920.9
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	4,952,086.6	5,204,082.6	5,481,171.5	5,853,860.6	6,201,703.0
H	Transportasi dan Pergudangan	3,975,070.5	4,217,506.9	4,377,849.8	4,541,309.5	4,750,560.8
	1 Angkutan Rel	51,558.8	50,999.1	60,546.0	65,371.0	67,548.6
	2 Angkutan Darat	2,647,243.4	2,761,816.0	2,810,248.9	2,902,683.0	2,957,490.5
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	515,711.0	597,096.7	631,120.0	650,042.7	740,177.1
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	760,557.3	807,595.1	875,934.9	923,212.8	985,344.7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,480,399.2	6,942,541.1	7,414,021.0	7,842,132.3	8,274,501.4
	1 Penyediaan Akomodasi	1,188,626.5	1,289,746.6	1,353,394.3	1,450,425.0	1,568,773.7
	2 Penyediaan Makan Minum	5,291,772.7	5,652,794.5	6,060,626.6	6,391,707.2	6,705,727.6
J	Informasi dan Komunikasi	7,503,157.6	7,969,970.4	8,458,713.2	8,891,144.9	9,630,639.1
K	Jasa Keuangan	2,341,597.7	2,610,919.1	2,826,933.5	3,060,732.9	3,213,222.2
	1 Bank	1,652,024.1	1,898,021.7	2,086,228.9	2,273,369.4	2,378,617.2
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	220,367.8	224,469.4	237,670.3	247,199.4	258,464.2
	3 Jasa Keuangan Lainnya	463,429.6	482,676.8	496,979.2	533,921.7	569,704.7
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5,776.2	5,751.3	6,055.1	6,242.4	6,436.2
L	Real Estate	5,116,888.2	5,322,003.8	5,735,457.1	6,082,488.7	6,395,208.9
M,N	Jasa Perusahaan	831,517.1	858,734.2	924,041.7	991,563.8	1,025,558.0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,373,904.2	5,639,411.8	5,971,985.6	6,304,910.7	6,656,182.7
P	Jasa Pendidikan	6,148,737.3	6,430,385.5	6,938,845.3	7,444,276.5	7,672,850.0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,791,076.0	1,916,373.7	2,062,978.6	2,210,405.6	2,310,356.4
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,919,688.6	2,012,930.9	2,119,325.9	2,288,950.1	2,419,533.0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	71,702,449.2	75,627,449.6	79,536,081.8	83,474,440.5	87,687,926.6

Lampiran Tabel 3.
Laju Pertumbuhan PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	2104	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.13	2.26	-2.10	2.11	1.46
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.55	2.33	-3.00	1.94	1.50
	a. Tanaman Pangan	4.26	0.41	-1.70	2.84	2.76
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.80	1.25	-9.70	3.71	-0.62
	c. Perkebunan Semusim	4.59	2.41	0.80	-3.39	-4.40
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	12.32	6.29	-10.90	-1.30	-0.88
	e. Perkebunan Tahunan	1.78	5.56	0.40	-3.89	1.27
	f. Peternakan	1.65	0.88	4.80	4.73	2.16
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1.90	1.37	7.80	0.97	2.88
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.47	0.54	3.50	2.83	1.17
	3 Perikanan	6.81	4.87	6.50	4.21	1.40
B	Pertambangan dan Penggalian	1.67	3.92	2.10	0.13	0.42
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.67	3.92	2.10	0.13	0.42
C	Industri Pengolahan	-2.84	6.87	3.80	2.13	5.07
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-5.89	9.35	8.00	3.14	6.76
	3 Pengolahan Tembakau	-0.20	0.78	-20.10	-0.75	1.51
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.52	9.64	7.80	5.96	6.37
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4.49	6.23	-0.10	7.42	3.24
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	1.07	4.82	-1.40	-2.13	-1.63
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	-2.47	1.47	4.50	2.03	5.92
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.90	-0.10	7.10	7.57	6.63
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5.61	-0.18	-6.00	-9.10	-7.16
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	-0.95	9.69	1.50	-6.52	0.26
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	-2.66	4.79	2.40	-1.42	3.10
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1.68	-0.70	7.50	6.80	4.63
	14 Industri Alat Angkutan	4.30	-2.07	-9.80	-7.07	-4.44
	15 Industri Furnitur	-1.58	2.49	-4.30	-2.79	3.73
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	5.11	5.85	-5.10	2.13	1.24
D	Pengadaan Listrik, Gas	10.20	6.08	6.80	2.19	14.26
	1 Ketenagalistrikan	10.24	6.08	6.90	2.20	14.34
	2 Gas	5.10	5.95	3.80	1.11	1.66
E	Pengadaan Air	3.46	0.95	3.90	2.90	2.36
F	Konstruksi	4.46	4.94	5.70	4.24	5.42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	8.66	5.26	5.70	6.19	6.09
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	9.54	6.20	7.60	3.03	6.86
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	8.49	5.09	5.30	6.80	5.94
H	Transportasi dan Pergudangan	4.73	6.10	3.80	3.73	4.61
	1 Angkutan Rel	2.03	-1.09	18.70	7.97	3.33
	2 Angkutan Darat	1.63	4.33	1.80	3.29	1.89
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	17.96	15.78	5.70	3.00	13.87
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	8.17	6.18	8.50	5.40	6.73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.82	7.13	6.80	5.77	5.51
	1 Penyediaan Akomodasi	11.81	8.51	4.90	7.17	8.16
	2 Penyediaan Makan Minum	5.76	6.82	7.20	5.46	4.91
J	Informasi dan Komunikasi	10.74	6.22	6.10	5.11	8.32
K	Jasa Keuangan	3.23	11.50	8.30	8.27	4.98
	1 Bank	2.72	14.89	9.90	8.97	4.63
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	2.53	1.86	5.90	4.01	4.56
	3 Jasa Keuangan Lainnya	5.51	4.15	3.00	7.43	6.70
	4 Jasa Penunjang Keuangan	-0.44	-0.43	5.30	3.09	3.10
L	Real Estate	8.88	4.01	7.80	6.05	5.14
M,N	Jasa Perusahaan	7.99	3.27	7.60	7.31	3.43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7.49	4.94	5.90	5.57	5.57
P	Jasa Pendidikan	5.26	4.58	7.90	7.28	3.07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.18	7.00	7.70	7.15	4.52
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.28	4.86	5.30	8.00	5.70
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.37	5.47	5.20	4.95	5.05

Lampiran Tabel 4.
Distribusi Persentase PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku, 2012-2016 (persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	2104	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.19	11.13	10.50	10.60	10.41
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9.88	9.83	9.20	9.30	9.12
	a. Tanaman Pangan	4.23	3.91	3.50	3.80	3.76
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.33	0.33	0.30	0.30	0.27
	c. Perkebunan Semusim	0.06	0.06	0.10	0.10	0.05
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2.72	3.02	2.80	2.70	2.56
	e. Perkebunan Tahunan	0.25	0.25	0.20	0.20	0.23
	f. Peternakan	2.09	2.07	2.10	2.10	2.06
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.92	0.88	0.90	0.90	0.87
	3 Perikanan	0.39	0.41	0.40	0.40	0.42
B	Pertambangan dan Penggalian	0.60	0.58	0.60	0.60	0.54
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.60	0.58	0.60	0.60	0.54
C	Industri Pengolahan	13.26	13.62	13.60	13.10	13.21
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	6.53	6.86	7.20	7.00	7.21
	3 Pengolahan Tembakau	0.91	0.96	0.80	0.70	0.72
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.33	1.42	1.40	1.40	1.46
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.39	0.40	0.40	0.40	0.37
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	0.24	0.24	0.20	0.20	0.19
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.14	0.13	0.10	0.10	0.13
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.43	0.42	0.40	0.30	0.28
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.45	0.47	0.50	0.40	0.40
	11 Industri Logam Dasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	1.01	0.97	1.00	0.90	0.85
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.52	0.49	0.50	0.50	0.49
	14 Industri Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15 Industri Furnitur	0.64	0.63	0.60	0.50	0.52
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	0.34	0.34	0.30	0.30	0.31
D	Pengadaan Listrik, Gas	0.12	0.10	0.10	0.10	0.13
	1 Ketenagalistrikan	0.12	0.10	0.10	0.10	0.13
	2 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
F	Konstruksi	9.52	9.49	9.40	9.40	9.34
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	8.30	8.17	8.30	8.20	8.48
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1.32	1.37	1.40	1.40	1.43
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	6.98	6.80	6.90	6.80	7.05
H	Transportasi dan Pergudangan	5.51	5.63	5.70	5.70	5.68
	1 Angkutan Rel	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10
	2 Angkutan Darat	3.52	3.50	3.50	3.40	3.29
	3 Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 Angkutan Udara	0.77	0.92	1.00	1.00	1.10
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1.14	1.14	1.20	1.20	1.19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.32	9.75	10.00	10.20	10.22
	1 Penyediaan Akomodasi	1.81	1.96	2.00	2.00	2.07
	2 Penyediaan Makan Minum	7.52	7.79	8.10	8.20	8.16
J	Informasi dan Komunikasi	9.49	8.92	8.50	8.10	8.14
K	Jasa Keuangan	3.49	3.73	3.90	4.00	3.94
	1 Bank	2.50	2.76	2.90	3.00	2.98
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.67	0.67	0.70	0.60	0.66
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
L	Real Estate	7.03	6.85	7.00	7.00	7.09
M,N	Jasa Perusahaan	1.08	1.01	1.00	1.00	1.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7.68	7.89	8.10	8.30	8.37
P	Jasa Pendidikan	8.24	8.03	8.20	8.50	8.25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.50	2.47	2.50	2.50	2.51
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.57	2.53	2.50	2.60	2.57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Lampiran Tabel 5.
Andil Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2012-2016 (persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	2104	2015	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.55	-0.98	-0.21	0.20	0.13
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.50	-1.03	-0.27	0.16	0.12
	a. Tanaman Pangan	-0.04	0.10	-0.06	0.10	0.09
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-0.01	0.01	-0.03	0.01	0.00
	c. Perkebunan Semusim	-0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.40	-1.17	-0.28	-0.03	-0.02
	e. Perkebunan Tahunan	0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.00
	f. Peternakan	0.16	0.04	0.09	0.09	0.04
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.00	-0.02	0.01	0.00	0.01
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01
	3 Perikanan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
B	Pertambangan dan Penggalian	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	0.67	0.42	0.51	0.28	0.65
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	0.41	0.27	0.54	0.22	0.46
	3 Pengolahan Tembakau	0.13	-0.11	-0.15	0.00	0.01
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.03	0.08	0.10	0.08	0.09
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.03	0.02	0.00	0.03	0.01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	0.04	0.00	0.00	-0.01	0.00
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	-0.03	0.01	0.01	0.01	0.02
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.00	0.02	-0.02	-0.03	-0.02
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.05	0.02	0.01	-0.03	0.00
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	-0.04	0.07	0.02	-0.01	0.03
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-0.01	0.02	0.04	0.03	0.02
	14 Industri Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15 Industri Furnitur	0.03	0.01	-0.03	-0.02	0.02
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	0.03	0.01	-0.02	0.01	0.00
D	Pengadaan Listrik, Gas	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
	1 Ketenagalistrikan	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
	2 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Konstruksi	-0.47	-0.11	0.53	0.40	0.51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	1.37	0.47	0.47	0.51	0.51
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0.11	0.08	0.10	0.04	0.09
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	1.26	0.39	0.37	0.47	0.42
H	Transportasi dan Pergudangan	0.18	0.39	0.21	0.21	0.25
	1 Angkutan Rel	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	2 Angkutan Darat	0.03	0.20	0.06	0.12	0.07
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	0.09	0.09	0.04	0.02	0.11
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0.07	0.09	0.09	0.06	0.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.61	0.76	0.62	0.54	0.52
	1 Penyediaan Akomodasi	0.15	0.03	0.08	0.12	0.14
	2 Penyediaan Makan Minum	0.46	0.72	0.54	0.42	0.38
J	Informasi dan Komunikasi	1.10	0.63	0.65	0.54	0.89
K	Jasa Keuangan	0.08	0.49	0.29	0.29	0.18
	1 Bank	0.05	0.46	0.25	0.24	0.13
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.02	0.03	0.02	0.05	0.04
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	0.22	0.57	0.55	0.44	0.37
M,N	Jasa Perusahaan	0.03	0.13	0.09	0.08	0.04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0.06	0.82	0.44	0.42	0.42
P	Jasa Pendidikan	0.79	1.25	0.67	0.64	0.27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.14	0.41	0.19	0.19	0.12
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.02	0.18	0.14	0.21	0.16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.37	5.47	5.17	4.95	5.05

Lampiran Tabel 6.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY ADHB menurut Pengeluaran, (dalam juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l)	49,403,400.7	57,101,887.2	62,875,141.2	68,730,527.5	74,429,795.6
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	18,564,736.6	22,374,227.4	24,286,650.1	26,286,556.5	28,459,585.1
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1,935,562.2	2,123,443.9	2,407,737.9	2,682,818.5	2,919,007.1
1.c. Pakaian	2,625,261.6	2,788,341.1	2,982,995.7	3,324,854.3	3,687,042.3
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5,697,151.3	6,532,968.4	7,508,503.3	8,468,846.8	9,143,946.7
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan	2,425,902.3	2,849,447.7	3,087,039.9	3,411,482.7	3,679,768.2
1.f. Kesehatan	2,385,772.1	2,685,689.2	3,021,534.5	3,312,124.4	3,671,351.2
1.g. Transportasi/Angkutan	6,368,322.2	7,129,963.8	8,002,514.2	8,753,886.1	9,276,225.0
1.h. Komunikasi	2,669,793.4	3,036,970.0	3,201,567.5	3,360,001.3	3,540,534.2
1.i. Rekreasi dan Budaya	1,127,934.0	1,317,569.2	1,470,111.4	1,572,116.2	1,710,636.7
1.j. Pendidikan	2,985,200.8	3,405,955.4	3,717,178.6	4,047,223.6	4,473,538.8
1.k. Penginapan dan Hotel	1,569,333.8	1,705,259.9	1,916,779.6	2,073,547.1	2,254,386.0
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,048,430.4	1,152,051.2	1,272,528.5	1,437,070.0	1,613,774.2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,096,681.9	2,457,182.4	2,948,426.6	3,171,192.8	3,220,070.3
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	11,982,949.7	13,629,833.9	15,347,428.3	17,214,154.3	18,441,761.5
3.a. Konsumsi Kolektif	6,584,486.9	7,638,839.9	8,667,188.2	9,679,421.8	10,362,756.3
3.b. Konsumsi Individu	5,398,462.7	5,990,994.0	6,680,240.2	7,534,732.5	8,079,005.2
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	21,148,871.0	24,250,704.4	27,744,794.4	30,798,881.3	33,428,977.9
4.a. Bangunan	17,132,380.6	19,626,275.1	22,442,138.5	24,803,517.4	26,755,606.5
4.b. Non-Bangunan	4,016,490.4	4,624,429.3	5,302,655.9	5,995,363.9	6,673,371.4
5. Perubahan Inventori	969,334.4	967,149.9	980,197.0	1,151,796.8	1,295,788.0
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	3,268,160.4	4,224,511.5	5,465,423.2	6,266,264.5	6,495,281.8
6.a. Barang	2,524,851.9	3,101,443.9	4,162,171.4	4,764,412.0	4,728,509.7
6.b. Jasa	743,308.5	1,123,067.6	1,303,251.9	1,501,852.4	1,766,772.1
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	1,984,896.4	2,514,540.0	4,085,244.9	5,066,145.4	5,922,732.1
7.a. Barang	590,319.9	747,814.7	811,835.3	1,240,178.0	1,840,763.2
7.b. Jasa	1,394,576.5	1,766,725.3	3,273,409.6	3,825,967.5	4,081,968.9
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(9,636,641.1)	(15,192,186.4)	(18,433,681.6)	(20,819,021.3)	(21,290,602.1)
8.a. Ekspor	36,986,261.1	40,564,356.9	46,988,180.1	52,238,029.4	58,195,116.4
8.b. Impor	46,622,902.2	55,755,422.7	65,421,861.7	73,057,050.7	79,485,718.5
P D R B	77,247,860.6	84,924,542.9	92,842,484.2	101,447,650.4	110,098,340.8

Lampiran Tabel 7.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY ADHK menurut Pengeluaran, (dalam juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l)	43,559,244.3	45,670,009.0	47,923,893.3	50,193,386.0	52,614,164.2
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	15,897,574.1	16,246,721.2	16,669,147.0	17,270,489.9	17,894,700.4
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1,640,658.9	1,706,164.7	1,823,550.4	1,924,700.6	2,024,703.6
1.c. Pakaian	2,256,336.1	2,380,334.6	2,471,869.6	2,606,391.1	2,755,231.1
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5,052,926.6	5,343,712.1	5,742,145.1	6,085,963.5	6,434,591.0
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan	2,135,973.6	2,272,353.6	2,397,965.4	2,530,849.0	2,620,505.0
1.f. Kesehatan	2,140,263.6	2,259,602.2	2,396,395.6	2,519,983.4	2,652,280.1
1.g. Transportasi/Angkutan	5,885,482.0	6,268,521.4	6,642,174.6	6,978,323.5	7,405,226.6
1.h. Komunikasi	2,400,054.2	2,562,655.9	2,710,444.3	2,846,242.0	2,990,939.8
1.i. Rekreasi dan Budaya	987,483.7	1,063,311.6	1,148,652.4	1,206,458.1	1,263,916.4
1.j. Pendidikan	2,801,061.9	3,051,633.5	3,229,912.5	3,387,526.5	3,571,073.8
1.k. Penginapan dan Hotel	1,365,143.4	1,455,674.2	1,587,293.2	1,677,578.3	1,783,260.6
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	996,286.1	1,059,323.8	1,104,343.3	1,158,880.0	1,217,735.9
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,897,631.4	2,095,397.3	2,317,122.7	2,384,374.2	2,357,343.8
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	10,909,808.1	11,553,432.0	12,056,062.7	12,719,134.3	12,987,745.6
3.a. Konsumsi Kolektif	5,920,549.0	6,201,739.3	6,507,500.1	6,857,275.5	6,997,740.9
3.b. Konsumsi Individu	4,989,259.1	5,351,692.7	5,548,562.6	5,861,858.8	5,990,004.7
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	19,207,889.8	20,190,810.1	21,358,622.4	22,286,614.6	23,616,947.8
4.a. Bangunan	15,633,423.8	16,436,213.5	17,344,657.9	18,073,133.5	19,170,028.6
4.b. Non-Bangunan	3,574,466.0	3,754,596.7	4,013,964.6	4,213,481.1	4,446,919.2
5. Perubahan Inventori	804,880.2	832,539.6	930,599.3	974,645.0	1,045,164.3
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	2,933,953.9	3,541,640.2	4,278,247.9	4,416,252.1	4,400,889.0
6.a. Barang	2,256,358.3	2,594,947.9	3,246,508.6	3,349,434.2	3,192,594.1
6.b. Jasa	677,595.6	946,692.3	1,031,739.4	1,066,817.9	1,208,294.9
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	1,901,846.4	2,241,625.6	3,228,540.5	3,728,749.4	4,492,510.6
7.a. Barang	622,730.0	840,987.0	936,550.0	1,375,927.3	2,099,846.8
7.b. Jasa	1,279,116.4	1,400,638.6	2,291,990.5	2,352,822.1	2,392,663.7
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(5,709,112.2)	(6,014,753.1)	(6,099,926.1)	(5,771,216.2)	(4,841,817.5)
8.a. Ekspor	32,593,217.4	33,989,619.7	35,810,888.3	37,561,868.4	39,476,426.8
8.b. Impor	38,302,329.6	40,004,372.7	41,910,814.5	43,333,084.7	44,318,244.2
P D R B	71,702,449.2	75,627,449.6	79,536,081.8	83,474,440.5	87,687,926.6

Lampiran Tabel 8.
Laju Pertumbuhan PDRB DIY ADHK menurut Pengeluaran (persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l)	6.44	4.85	4.94	4.74	4.82
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	5.21	2.20	2.60	3.61	3.61
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	6.30	3.99	6.88	5.55	5.20
1.c. Pakaian	6.12	5.50	3.85	5.44	5.71
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	4.72	5.75	7.46	5.99	5.73
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan	11.86	6.38	5.53	5.54	3.54
1.f. Kesehatan	6.38	5.58	6.05	5.16	5.25
1.g. Transportasi/Angkutan	7.57	6.51	5.96	5.06	6.12
1.h. Komunikasi	6.49	6.77	5.77	5.01	5.08
1.i. Rekreasi dan Budaya	6.41	7.68	8.03	5.03	4.76
1.j. Pendidikan	9.09	8.95	5.84	4.88	5.42
1.k. Penginapan dan Hotel	7.46	6.63	9.04	5.69	6.30
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	10.12	6.33	4.25	4.94	5.08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.90	10.42	10.58	2.90	-1.13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	5.91	5.90	4.35	5.50	2.11
3.a. Konsumsi Kolektif	4.94	4.75	4.93	5.37	2.05
3.b. Konsumsi Individu	7.10	7.26	3.68	5.65	2.19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5.28	5.12	5.78	4.34	5.97
4.a. Bangunan	5.41	5.14	5.53	4.20	6.07
4.b. Non-Bangunan	4.70	5.04	6.91	4.97	5.54
5. Perubahan Inventori	-1.02	3.44	11.78	4.73	7.24
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	15.36	20.71	20.80	3.23	-0.35
6.a. Barang	13.57	15.01	25.11	3.17	-4.68
6.b. Jasa	21.76	39.71	8.98	3.40	13.26
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	26.27	17.87	44.03	15.49	20.48
7.a. Barang	106.01	35.05	11.36	46.91	52.61
7.b. Jasa	6.25	9.50	63.64	2.65	1.69
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	13.92	5.35	1.42	-5.39	-16.10
8.a. Ekspor	8.35	4.28	5.36	4.89	5.10
8.b. Impor	9.15	4.44	4.77	3.39	2.27
P D R B	5.37	5.47	5.17	4.95	5.05

Lampiran Tabel 9.
Distribusi Persentase PDRB DIY menurut Pengeluaran (persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l)	60.75	60.39	67.72	67.75	67.60
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	22.17	21.48	26.16	25.91	25.85
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2.29	2.26	2.59	2.64	2.65
1.c. Pakaian	3.15	3.15	3.21	3.28	3.35
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	7.05	7.07	8.09	8.35	8.31
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan	2.98	3.00	3.33	3.36	3.34
1.f. Kesehatan	2.98	2.99	3.25	3.26	3.33
1.g. Transportasi/Angkutan	8.21	8.29	8.62	8.63	8.43
1.h. Komunikasi	3.35	3.39	3.45	3.31	3.22
1.i. Rekreasi dan Budaya	1.38	1.41	1.58	1.55	1.55
1.j. Pendidikan	3.91	4.04	4.00	3.99	4.06
1.k. Penginapan dan Hotel	1.90	1.92	2.06	2.04	2.05
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.39	1.40	1.37	1.42	1.47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.65	2.77	3.18	3.13	2.92
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	15.22	15.28	16.53	16.97	16.75
3.a. Konsumsi Kolektif	8.26	8.20	9.34	9.54	9.41
3.b. Konsumsi Individu	6.96	7.08	7.20	7.43	7.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	26.79	26.70	29.88	30.36	30.36
4.a. Bangunan	21.80	21.73	24.17	24.45	24.30
4.b. Non-Bangunan	4.99	4.96	5.71	5.91	6.06
5. Perubahan Inventori	1.12	1.10	1.06	1.14	1.18
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	4.09	4.68	5.89	6.18	5.90
6.a. Barang	3.15	3.43	4.48	4.70	4.29
6.b. Jasa	0.95	1.25	1.40	1.48	1.60
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	2.65	2.96	4.40	4.99	5.38
7.a. Barang	0.87	1.11	0.87	1.22	1.67
7.b. Jasa	1.78	1.85	3.53	3.77	3.71
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-7.96	-7.95	-19.85	-20.52	-19.34
8.a. Ekspor	45.46	44.94	50.61	51.49	52.86
8.b. Impor	53.42	52.90	70.47	72.01	72.20
P D R B	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Lampiran Tabel 10.
Andil Pertumbuhan PDRB DIY menurut Pengeluaran (persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l)	3.87	2.94	2.98	2.85	2.90
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	1.16	0.49	0.56	0.76	0.75
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	0.14	0.09	0.16	0.13	0.12
1.c. Pakaian	0.19	0.17	0.12	0.17	0.18
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	0.33	0.41	0.53	0.43	0.42
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan	0.33	0.19	0.17	0.17	0.11
1.f. Kesehatan	0.19	0.17	0.18	0.16	0.16
1.g. Transportasi/Angkutan	0.61	0.53	0.49	0.42	0.51
1.h. Komunikasi	0.21	0.23	0.20	0.17	0.17
1.i. Rekreasi dan Budaya	0.09	0.11	0.11	0.07	0.07
1.j. Pendidikan	0.34	0.35	0.24	0.20	0.22
1.k. Penginapan dan Hotel	0.14	0.13	0.17	0.11	0.13
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	0.13	0.09	0.06	0.07	0.07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.23	0.28	0.29	0.08	-0.03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	0.90	0.90	0.66	0.83	0.32
3.a. Konsumsi Kolektif	0.41	0.39	0.40	0.44	0.17
3.b. Konsumsi Individu	0.49	0.51	0.26	0.39	0.15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1.41	1.37	1.54	1.17	1.59
4.a. Bangunan	1.18	1.12	1.20	0.92	1.31
4.b. Non-Bangunan	0.24	0.25	0.34	0.25	0.28
5. Perubahan Inventori	-0.01	0.04	0.13	0.06	0.08
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	0.57	0.85	0.97	0.17	-0.02
6.a. Barang	0.40	0.47	0.86	0.13	-0.19
6.b. Jasa	0.18	0.38	0.11	0.04	0.17
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	0.58	0.47	1.30	0.63	0.91
7.a. Barang	0.47	0.30	0.13	0.55	0.87
7.b. Jasa	0.11	0.17	1.18	0.08	0.05
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	-1.03	-0.43	-0.11	0.41	1.11
8.a. Ekspor	3.69	1.95	2.41	2.20	2.29
8.b. Impor	4.72	2.37	2.52	1.79	1.18
P D R B	5.37	5.47	5.17	4.95	5.05

Lampiran Tabel 11.
PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,255,673.4	1,373,635.0	1,442,659.9	1,566,769.2	1,658,813.4
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertar	997,965.8	1,101,150.5	1,150,866.9	1,244,931.6	1,322,988.8
	a. Tanaman Pangan	292,978.9	295,971.3	299,783.3	346,208.9	368,825.2
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	38,651.8	42,997.6	39,445.3	43,783.9	45,669.3
	c. Perkebunan Semusim	6,760.7	7,245.4	7,962.8	8,398.6	8,812.8
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	240,607.3	296,154.5	295,791.4	309,306.5	322,851.8
	e. Perkebunan Tahunan	121,996.8	135,209.1	148,733.5	145,798.7	163,209.8
	f. Peternakan	275,009.0	300,353.3	332,450.4	363,690.6	384,300.4
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	21,961.3	23,219.3	26,700.2	27,744.4	29,319.6
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	196,039.2	202,144.1	212,589.7	233,677.5	243,723.5
	3 Perikanan	61,668.3	70,340.4	79,203.3	88,160.2	92,101.1
B	Pertambangan dan Penggalian	93,035.5	98,940.2	101,818.1	109,892.1	115,601.8
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi			0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit			0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam			0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	93,035.5	98,940.2	101,818.1	109,892.1	115,601.8
C	Industri Pengolahan	692,120.2	780,587.0	871,865.3	925,813.9	1,014,200.3
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara			0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas			0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	528,257.0	601,198.1	689,086.5	733,110.9	805,169.1
	3 Pengolahan Tembakau	54,505.4	61,382.5	57,291.4	57,169.4	60,024.7
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	26,237.9	29,838.4	32,853.8	35,445.9	38,360.9
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	563.9	634.2	637.8	675.4	725.7
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	9,235.5	9,746.3	9,925.8	10,156.4	10,188.3
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	324.7	337.0	357.2	371.4	400.9
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	22,899.8	22,936.0	24,903.9	27,278.5	29,466.5
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	466.1	509.9	520.4	504.0	518.4
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	12,988.4	15,131.2	15,991.6	15,948.3	16,731.8
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	526.9	552.2	591.6	592.3	628.0
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4,145.1	4,169.1	5,269.0	7,529.0	12,999.0
	14 Industri Alat Angkutan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15 Industri Furnitur	7,909.4	8,148.1	8,236.0	8,582.3	9,128.0
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pen	24,060.1	26,004.0	26,200.4	28,450.1	29,858.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,394.8	4,193.6	4,859.8	5,658.5	6,824.1
	1 Ketenagalistrikan	4,359.2	4,155.3	4,819.0	5,617.7	6,780.4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	35.6	38.3	40.8	40.8	43.7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	8,337.3	9,007.7	10,007.7	10,522.2	11,195.5
F	Konstruksi	509,534.5	561,695.7	602,695.7	649,776.4	710,844.1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil da	788,515.2	843,413.4	928,413.4	1,008,690.0	1,131,565.1
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	33,147.8	37,421.7	42,421.7	46,424.9	50,703.8
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	755,367.4	805,991.7	885,991.7	962,265.2	1,080,861.3
H	Transportasi dan Pergudangan	510,229.0	547,288.4	593,001.4	636,391.4	669,410.9
	1 Angkutan Rel	2,486.4	2,721.7	3,521.7	4,230.6	4,687.2
	2 Angkutan Darat	412,751.7	442,087.0	479,000.0	510,912.7	531,810.4
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	94,990.9	102,479.7	110,479.7	121,248.0	132,913.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214,343.2	242,861.2	267,891.2	296,720.5	324,991.3
	1 Penyediaan Akomodasi	238.8	284.3	314.3	358.5	399.1
	2 Penyediaan Makan Minum	214,104.5	242,576.9	267,576.9	296,362.0	324,592.2
J	Informasi dan Komunikasi	323,840.2	342,993.8	364,480.9	382,516.6	413,772.1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	161,617.0	205,582.7	229,410.7	255,816.3	271,629.1
	1 Jasa Perantara Keuangan	144,297.0	186,778.4	208,458.3	233,275.5	247,384.8
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	5,889.5	6,123.9	6,933.7	7,409.8	7,909.3
	3 Jasa Keuangan Lainnya	11,258.2	12,507.0	13,825.3	14,927.9	16,125.2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	172.2	173.4	193.4	203.2	209.9
L	Real Estate	199,343.3	213,830.0	233,583.0	256,043.7	281,442.3
M,N	Jasa Perusahaan	17,727.8	18,108.0	20,295.8	22,111.9	23,424.7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	483,947.7	548,399.2	615,523.0	684,126.5	760,654.8
P	Jasa Pendidikan	344,812.2	369,065.8	409,065.8	461,610.9	491,522.7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,283.5	92,253.1	100,500.0	112,613.0	119,451.3
R,S,T,U	Jasa lainnya	222,819.3	237,738.9	260,500.0	286,474.8	307,111.2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,916,574.0	6,489,593.7	7,056,571.8	7,671,548.0	8,312,454.6

Lampiran Tabel 12.
PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,104,309.3	1,131,360.5	1,120,167.9	1,138,920.2	1,158,714.1
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertai	867,219.5	890,441.8	873,914.4	885,581.2	901,915.5
	a. Tanaman Pangan	254,679.7	256,059.4	257,605.0	263,894.2	271,404.1
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	33,747.3	34,536.2	31,205.3	32,967.2	32,712.3
	c. Perkebunan Semusim	6,212.2	6,375.7	6,412.6	6,266.3	6,244.7
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	207,294.5	221,791.2	195,447.9	194,626.8	195,276.7
	e. Perkebunan Tahunan	101,814.1	107,129.5	107,859.3	103,583.7	104,906.0
	f. Peternakan	243,663.3	244,469.2	253,614.0	261,909.5	268,556.0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	19,808.3	20,080.7	21,770.2	22,333.4	22,815.7
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	185,153.7	185,729.4	188,682.3	193,138.0	195,203.1
	3 Perikanan	51,936.1	55,189.3	57,571.2	60,201.0	61,595.5
B	Pertambangan dan Penggalian	86,177.6	90,140.2	91,487.5	91,992.8	93,577.0
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	86,177.6	90,140.2	91,487.5	91,992.8	93,577.0
C	Industri Pengolahan	648,522.9	696,306.9	755,840.4	782,466.7	823,838.2
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara			0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas			0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	499,632.7	543,290.3	608,868.5	631,880.2	664,967.9
	3 Pengolahan Tembakau	44,496.2	44,281.7	35,343.1	34,419.5	34,918.1
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	22,810.3	23,841.8	25,515.5	26,812.6	28,040.7
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	495.5	522.0	510.1	538.5	551.4
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	9,208.0	9,620.3	9,594.7	9,496.0	9,420.1
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	310.2	312.4	316.9	322.0	337.2
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	23,836.9	24,145.2	25,881.0	27,509.8	29,406.1
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	410.3	415.8	414.7	397.7	394.2
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	12,229.3	13,406.2	13,670.3	12,925.0	13,044.8
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	494.7	518.3	531.9	525.4	542.3
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	3,781.5	3,642.1	4,520.0	6,406.0	10,604.0
	14 Industri Alat Angkutan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15 Industri Furnitur	7,781.2	7,807.9	7,705.2	7,643.4	8,115.7
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pen	23,036.1	24,502.9	22,968.4	23,590.5	23,495.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,365.4	5,714.2	6,026.7	6,205.3	7,100.0
	1 Ketenagalistrikan	5,335.8	5,682.9	5,993.8	6,172.0	7,066.8
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	29.6	31.4	32.9	33.3	33.2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	8,154.9	8,241.5	8,341.5	8,523.6	8,740.0
F	Konstruksi	464,304.2	483,855.7	508,855.7	530,760.3	565,132.8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil da	718,882.8	757,217.7	796,717.7	848,655.9	901,270.6
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	30,564.4	32,486.6	34,986.6	36,088.0	38,564.6
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	688,318.4	724,731.1	761,731.1	812,567.9	862,706.0
H	Transportasi dan Pergudangan	486,869.9	502,391.6	512,691.3	531,194.2	545,330.8
	1 Angkutan Rel	2,259.7	2,251.9	2,551.7	2,751.0	2,866.9
	2 Angkutan Darat	401,531.6	411,835.4	416,835.4	430,048.0	438,142.0
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	83,078.6	88,304.3	93,304.3	98,395.1	104,321.9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194,959.4	209,359.4	219,373.9	231,152.4	244,855.3
	1 Penyediaan Akomodasi	207.7	224.4	238.9	254.9	269.4
	2 Penyediaan Makan Minum	194,751.7	209,135.0	219,135.0	230,897.5	244,585.9
J	Informasi dan Komunikasi	331,730.4	352,124.3	378,090.0	398,651.2	430,223.0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	139,057.4	157,992.0	175,745.1	189,970.4	198,342.1
	1 Jasa Perantara Keuangan	123,038.2	141,362.3	157,888.7	171,024.4	178,631.5
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	5,559.1	5,612.5	6,006.9	6,236.9	6,373.2
	3 Jasa Keuangan Lainnya	10,308.6	10,866.6	11,690.9	12,545.2	13,173.0
	4 Jasa Penunjang Keuangan	151.5	150.6	158.6	163.9	164.4
L	Real Estate	194,169.0	202,865.3	213,562.4	226,908.2	239,462.0
M,N	Jasa Perusahaan	17,618.1	18,328.7	19,560.5	20,889.2	21,612.5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	438,666.2	461,077.7	488,812.0	513,344.6	544,978.0
P	Jasa Pendidikan	339,595.6	353,043.9	378,043.9	405,420.5	421,214.2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79,975.6	84,986.0	91,000.0	97,499.8	103,017.3
R,S,T,U	Jasa lainnya	216,789.5	226,654.6	240,000.0	259,240.5	273,439.0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,475,148.2	5,741,660.3	6,004,316.4	6,281,795.8	6,580,847.0

Lampiran Tabel 13.
Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.41	2.45	-0.99	1.67	1.74
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertai	7.46	2.68	-1.86	1.34	1.84
	a. Tanaman Pangan	5.61	0.54	0.60	2.44	2.85
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1.32	2.34	-9.64	5.65	-0.77
	c. Perkebunan Semusim	4.57	2.63	0.58	-2.28	-0.34
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	19.31	6.99	-11.88	-0.42	0.33
	e. Perkebunan Tahunan	1.33	5.22	0.68	-3.96	1.28
	f. Peternakan	4.57	0.33	3.74	3.27	2.54
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	2.35	1.37	8.41	2.59	2.16
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-4.16	0.31	1.59	2.36	1.07
	3 Perikanan	9.34	6.26	4.32	4.57	2.32
B	Pertambangan dan Penggalian	3.70	4.60	1.49	0.55	1.72
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Biji Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	3.70	4.60	1.49	0.55	1.72
C	Industri Pengolahan	-4.09	7.37	8.55	3.52	5.29
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-5.58	8.74	12.07	3.78	5.24
	3 Pengolahan Tembakau	-1.12	-0.48	-20.19	-2.61	1.45
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-0.33	4.52	7.02	5.08	4.58
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3.29	5.35	-2.26	5.57	2.39
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	2.96	4.48	-0.27	-1.03	-0.80
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-1.00	0.69	1.45	1.63	4.70
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3.86	1.29	7.19	6.29	6.89
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6.97	1.32	-0.26	-4.10	-0.88
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	-0.49	9.62	1.97	-5.45	0.93
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	-2.66	4.79	2.62	-1.23	3.22
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.20	-3.69	24.11	41.73	65.53
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	-0.72	0.34	-1.32	-0.80	6.18
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pen	6.34	6.37	-6.26	2.71	-0.40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.10	6.50	5.47	2.96	14.42
	1 Ketenagalistrikan	10.13	6.50	5.47	2.97	14.50
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	5.10	5.95	4.78	1.44	-0.50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	4.14	1.06	1.21	2.18	2.54
F	Konstruksi	5.73	4.21	5.17	4.30	6.48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil da	8.77	5.33	5.22	6.52	6.20
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	8.77	6.29	7.70	3.15	6.86
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	8.77	5.29	5.11	6.67	6.17
H	Transportasi dan Pergudangan	1.00	3.19	2.05	3.61	2.66
	1 Angkutan Rel	2.23	-0.35	13.31	7.81	4.21
	2 Angkutan Darat	0.05	2.57	1.21	3.17	1.88
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	5.83	6.29	5.66	5.46	6.02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.20	7.39	4.78	5.37	5.93
	1 Penyediaan Akomodasi	6.30	8.05	6.46	6.70	5.66
	2 Penyediaan Makan Minum	5.20	7.39	4.78	5.37	5.93
J	Informasi dan Komunikasi	7.88	6.15	7.37	5.44	7.92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.56	13.62	11.24	8.09	4.41
	1 Jasa Perantara Keuangan	4.49	14.89	11.69	8.32	4.45
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	1.70	0.96	7.03	3.83	2.19
	3 Jasa Keuangan Lainnya	7.07	5.41	7.59	7.31	5.00
	4 Jasa Penunjang Keuangan	-0.68	-0.63	5.34	3.35	0.28
L	Real Estate	6.39	4.48	5.27	6.25	5.53
M,N	Jasa Perusahaan	3.90	4.03	6.72	6.79	3.46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	7.68	5.11	6.02	5.02	6.16
P	Jasa Pendidikan	6.46	3.96	7.08	7.24	3.90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.51	6.27	7.08	7.14	5.66
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1.02	4.55	5.89	8.02	5.48
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.37	4.87	4.57	4.62	4.76

Lampiran Tabel 14.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.22	21.17	20.44	20.42	19.96
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertai	16.87	16.97	16.31	16.23	15.92
	a. Tanaman Pangan	4.95	4.56	4.25	4.51	4.44
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.65	0.66	0.56	0.57	0.55
	c. Perkebunan Semusim	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4.07	4.56	4.19	4.03	3.88
	e. Perkebunan Tahunan	2.06	2.08	2.11	1.90	1.96
	f. Peternakan	4.65	4.63	4.71	4.74	4.62
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.37	0.36	0.38	0.36	0.35
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3.31	3.11	3.01	3.05	2.93
	3 Perikanan	1.04	1.08	1.12	1.15	1.11
B	Pertambangan dan Penggalian	1.57	1.52	1.44	1.43	1.39
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.57	1.52	1.44	1.43	1.39
C	Industri Pengolahan	11.70	12.03	12.36	12.07	12.20
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	8.93	9.26	9.77	9.56	9.69
	3 Pengolahan Tembakau	0.92	0.95	0.81	0.75	0.72
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.44	0.46	0.47	0.46	0.46
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.39	0.35	0.35	0.36	0.35
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.22	0.23	0.23	0.21	0.20
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.07	0.06	0.07	0.10	0.16
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pen	0.41	0.40	0.37	0.37	0.36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08
	1 Ketenagalistrikan	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
F	Konstruksi	8.61	8.66	8.54	8.47	8.55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil da	13.33	13.00	13.16	13.15	13.61
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasin	0.56	0.58	0.60	0.61	0.61
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	12.77	12.42	12.56	12.54	13.00
H	Transportasi dan Pergudangan	8.62	8.43	8.40	8.30	8.05
	1 Angkutan Rel	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06
	2 Angkutan Darat	6.98	6.81	6.79	6.66	6.40
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1.61	1.58	1.57	1.58	1.60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.62	3.74	3.80	3.87	3.91
	1 Penyediaan Akomodasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Penyediaan Makan Minum	3.62	3.74	3.79	3.86	3.90
J	Informasi dan Komunikasi	5.47	5.29	5.17	4.99	4.98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.73	3.17	3.25	3.33	3.27
	1 Jasa Perantara Keuangan	2.44	2.88	2.95	3.04	2.98
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	3.37	3.29	3.31	3.34	3.39
M,N	Jasa Perusahaan	0.30	0.28	0.29	0.29	0.28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	8.18	8.45	8.72	8.92	9.15
P	Jasa Pendidikan	5.83	5.69	5.80	6.02	5.91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.46	1.42	1.42	1.47	1.44
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.77	3.66	3.69	3.73	3.69
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Lampiran Tabel 15.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.08	0.49	-0.19	0.31	0.32
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertai	1.15	0.42	-0.29	0.19	0.26
	a. Tanaman Pangan	0.26	0.03	0.03	0.10	0.12
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.01	0.01	-0.06	0.03	0.00
	c. Perkebunan Semusim	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.64	0.26	-0.46	-0.01	0.01
	e. Perkebunan Tahunan	0.03	0.10	0.01	-0.07	0.02
	f. Peternakan	0.20	0.01	0.16	0.14	0.11
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-0.15	0.01	0.05	0.07	0.03
	3 Perikanan	0.08	0.06	0.04	0.04	0.02
B	Pertambangan dan Penggalian	0.06	0.07	0.02	0.01	0.03
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.06	0.07	0.02	0.01	0.03
C	Industri Pengolahan	-0.53	0.87	1.04	0.44	0.66
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-0.56	0.80	1.14	0.38	0.53
	3 Pengolahan Tembakau	-0.01	0.00	-0.16	-0.02	0.01
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.00
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.00	0.00	0.02	0.03	0.07
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pen	0.03	0.03	-0.03	0.01	0.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	1 Ketenagalistrikan	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Konstruksi	0.48	0.36	0.44	0.36	0.55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil da	1.10	0.70	0.69	0.87	0.84
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0.05	0.04	0.04	0.02	0.04
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.06	0.67	0.64	0.85	0.80
H	Transportasi dan Pergudangan	0.09	0.28	0.18	0.31	0.23
	1 Angkutan Rel	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	2 Angkutan Darat	0.00	0.19	0.09	0.22	0.13
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.18	0.26	0.17	0.20	0.22
	1 Penyediaan Akomodasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Penyediaan Makan Minum	0.18	0.26	0.17	0.20	0.22
J	Informasi dan Komunikasi	0.46	0.37	0.45	0.34	0.50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.12	0.35	0.31	0.24	0.13
	1 Jasa Perantara Keuangan	0.10	0.33	0.29	0.22	0.12
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	0.22	0.16	0.19	0.22	0.20
M,N	Jasa Perusahaan	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0.60	0.41	0.48	0.41	0.50
P	Jasa Pendidikan	0.39	0.25	0.44	0.46	0.25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.12	0.09	0.10	0.11	0.09
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0.04	0.18	0.23	0.32	0.23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4.37	4.87	4.57	4.62	4.76

Lampiran Tabel 16.
PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,231,134.9	2,476,292.0	2,556,405.7	2,821,402.7	3,010,874.3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	2,085,129.3	2,308,295.0	2,364,759.1	2,606,846.3	2,784,396.6
	a. Tanaman Pangan	872,806.2	887,616.1	880,686.8	1,015,633.9	1,102,402.7
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	75,261.8	83,381.1	74,955.5	82,348.6	86,147.9
	c. Perkebunan Semusim	15,215.7	16,447.1	18,530.6	19,430.6	19,257.7
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	692,119.2	846,612.1	872,685.0	918,208.4	960,150.4
	e. Perkebunan Tahunan	28,817.4	31,445.8	34,264.9	34,783.2	39,274.4
	f. Peternakan	361,702.6	400,582.6	434,663.1	486,568.4	525,229.1
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	39,206.2	42,210.1	48,973.1	49,873.1	51,934.4
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	70,168.8	75,048.2	82,083.0	92,480.3	98,041.1
	3 Perikanan	75,836.9	92,948.8	109,563.6	122,076.1	128,436.6
B	Pertambangan dan Penggalian	102,395.4	106,879.3	116,953.1	125,530.4	128,516.3
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	102,395.4	106,879.3	116,953.1	125,530.4	128,516.3
C	Industri Pengolahan	2,194,704.6	2,491,084.2	2,741,391.6	2,909,864.1	3,175,265.8
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara			0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas			0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1,009,309.5	1,159,273.9	1,363,459.8	1,472,594.8	1,631,223.0
	3 Pengolahan Tembakau	224,652.7	265,840.1	248,106.9	242,910.4	262,068.5
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	244,398.3	284,980.6	321,464.4	355,093.4	396,683.9
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	108,353.4	123,149.5	123,453.1	133,693.1	145,160.5
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	75,397.5	81,174.1	82,172.1	83,502.1	84,295.6
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	18,749.3	20,173.9	22,293.8	23,193.8	25,402.2
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	21,053.1	20,326.8	22,436.8	25,526.8	28,113.9
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	11,250.8	11,864.5	11,444.6	10,884.6	10,942.5
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	100,331.5	114,443.2	124,235.3	126,635.3	130,716.1
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	115,189.7	123,911.2	133,451.0	136,051.0	140,487.9
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	23,509.6	24,111.1	27,383.4	29,173.4	31,931.8
	14 Industri Alat Angkutan	2,935.8	2,966.9	2,764.9	2,579.9	2,541.8
	15 Industri Furnitur	192,649.9	208,403.2	206,725.6	211,725.6	225,553.5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	46,923.5	50,465.1	51,999.8	56,299.8	60,144.8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,327.8	15,918.6	18,773.7	21,882.0	26,436.0
	1 Ketenagalistrikan	17,108.7	15,679.6	18,518.0	21,630.0	26,163.1
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	219.1	239.0	255.7	252.0	272.9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	12,390.3	13,242.1	15,153.3	16,192.9	17,043.7
F	Konstruksi	1,380,110.4	1,511,936.7	1,654,150.4	1,803,228.3	1,943,455.3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,236,289.9	1,347,850.3	1,473,263.0	1,585,613.0	1,770,132.1
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasin	124,455.6	140,633.1	159,866.3	174,776.3	195,783.5
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1,111,834.3	1,207,217.2	1,313,396.7	1,410,836.7	1,574,348.6
H	Transportasi dan Pergudangan	721,088.8	789,917.8	874,460.7	940,530.7	1,002,783.6
	1 Angkutan Rel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Angkutan Darat	560,321.2	614,457.7	678,846.5	725,416.5	765,129.9
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	160,767.5	175,460.1	195,614.2	215,114.2	237,653.6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,497,407.9	1,770,326.1	2,011,871.2	2,239,275.5	2,442,216.4
	1 Penyediaan Akomodasi	179,931.1	213,246.2	232,437.7	263,342.0	291,863.8
	2 Penyediaan Makan Minum	1,317,476.9	1,557,079.9	1,779,433.4	1,975,933.4	2,150,352.6
J	Informasi dan Komunikasi	1,211,011.8	1,283,762.3	1,347,205.5	1,411,574.2	1,519,508.1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	359,213.7	416,541.8	483,499.1	545,349.2	590,450.0
	1 Jasa Perantara Keuangan	322,137.6	377,582.1	441,469.6	500,114.7	542,670.3
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	12,781.1	13,235.8	14,688.0	15,655.0	16,361.4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	23,946.2	25,366.4	26,952.2	29,172.2	30,994.1
	4 Jasa Penunjang Keuangan	348.8	357.5	389.4	407.4	424.2
L	Real Estate	921,204.4	1,008,900.1	1,141,508.8	1,262,118.4	1,376,057.5
M,N	Jasa Perusahaan	75,197.6	77,173.6	86,886.8	94,901.6	100,784.6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,008,946.9	1,147,990.0	1,285,862.9	1,432,619.2	1,571,240.3
P	Jasa Pendidikan	985,459.7	1,073,246.7	1,208,172.6	1,372,466.0	1,449,027.9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	263,004.0	290,728.6	316,399.2	354,915.3	387,702.9
R,S,T,U	Jasa lainnya	293,944.3	316,964.9	350,967.2	387,739.7	413,475.5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	14,510,832.4	16,138,755.1	17,682,924.9	19,325,203.3	20,924,970.3

Lampiran Tabel 17.
PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,913,122.8	1,964,025.9	1,912,487.9	1,952,982.7	1,982,709.1
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,782,033.0	1,827,697.4	1,767,746.1	1,801,653.8	1,828,449.5
	a. Tanaman Pangan	733,158.2	736,003.8	726,357.6	747,387.2	767,608.8
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	67,956.9	68,592.7	59,538.0	63,611.6	62,850.7
	c. Perkebunan Semusim	14,024.6	14,317.0	14,406.9	13,902.3	13,236.3
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	595,679.0	632,367.5	574,894.0	568,012.3	562,485.3
	e. Perkebunan Tahunan	23,985.8	25,515.3	25,399.2	25,256.5	25,618.6
	f. Peternakan	314,668.3	318,072.3	331,495.1	347,556.0	359,977.2
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	32,560.3	32,828.8	35,655.4	35,928.0	36,672.6
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	65,233.1	66,514.8	69,058.3	71,635.1	72,601.7
	3 Perikanan	65,856.7	69,813.6	75,683.4	79,693.9	81,658.0
B	Pertambangan dan Penggalian	97,861.6	100,263.1	101,804.8	102,422.6	102,781.3
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	97,861.6	100,263.1	101,804.8	102,422.6	102,781.3
C	Industri Pengolahan	2,011,903.8	2,138,364.4	2,224,275.1	2,283,703.1	2,404,767.2
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara			0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas			0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	935,172.7	1,013,260.1	1,116,885.1	1,161,311.1	1,238,366.6
	3 Pengolahan Tembakau	184,707.7	187,937.7	150,321.8	143,721.7	146,903.4
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	216,960.7	235,876.6	257,648.6	278,748.6	302,234.6
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	95,051.2	100,308.3	98,341.6	106,241.6	111,297.2
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	74,815.6	77,630.6	77,115.7	75,515.7	74,516.7
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	18,380.5	18,699.1	19,486.0	19,872.0	20,945.2
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	21,534.5	21,867.2	23,658.6	25,522.6	27,129.5
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	10,663.4	10,625.4	10,200.6	9,500.8	9,107.6
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	94,372.4	101,490.8	102,770.2	98,450.2	98,700.9
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	107,651.2	112,822.7	117,922.0	117,721.0	119,563.6
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	21,935.1	21,844.6	23,515.5	24,915.5	26,129.8
	14 Industri Alat Angkutan	2,617.2	2,590.0	2,350.3	2,185.3	2,092.4
	15 Industri Furnitur	184,639.9	187,940.4	181,179.8	176,117.8	183,029.8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	43,401.7	45,470.8	42,879.2	43,879.2	44,749.8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,649.1	21,910.9	23,520.2	24,243.8	27,905.3
	1 Ketenagalistrikan	20,464.2	21,712.2	23,312.4	24,033.5	27,689.4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	184.9	198.7	207.8	210.3	216.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	12,151.7	12,222.4	12,649.0	13,022.1	13,407.7
F	Konstruksi	1,305,124.7	1,368,231.2	1,447,564.0	1,506,241.3	1,567,472.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,095,015.8	1,156,441.8	1,232,188.2	1,315,611.2	1,401,507.7
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	109,322.2	115,813.5	127,492.1	132,420.2	141,670.3
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	985,693.6	1,040,628.2	1,104,696.1	1,183,191.1	1,259,837.4
H	Transportasi dan Pergudangan	687,776.6	721,870.5	749,086.1	777,541.9	809,961.0
	1 Angkutan Rel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Angkutan Darat	545,642.2	570,330.7	583,998.9	603,298.9	623,673.4
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	142,134.5	151,539.7	165,087.2	174,242.9	186,287.6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,342,268.4	1,443,507.6	1,555,098.5	1,646,727.0	1,750,671.5
	1 Penyediaan Akomodasi	155,655.9	167,916.8	178,419.3	191,349.3	207,258.6
	2 Penyediaan Makan Minum	1,186,612.5	1,275,590.8	1,376,679.2	1,455,377.7	1,543,412.9
J	Informasi dan Komunikasi	1,277,883.8	1,358,556.6	1,454,258.1	1,536,406.9	1,664,675.1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	314,929.7	351,945.0	385,477.1	418,450.3	439,689.6
	1 Jasa Perantara Keuangan	280,495.8	316,712.0	348,753.2	379,506.4	398,421.1
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	12,045.2	12,256.5	13,193.9	13,673.9	14,156.4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	22,072.4	22,657.7	23,197.1	24,927.1	26,759.5
	4 Jasa Penunjang Keuangan	316.4	318.8	333.0	343.0	352.6
L	Real Estate	870,666.5	910,010.4	989,905.3	1,057,941.5	1,119,537.2
M,N	Jasa Perusahaan	73,135.3	76,405.4	81,440.8	87,194.2	90,911.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	910,575.3	959,446.7	1,010,099.0	1,063,245.3	1,125,300.6
P	Jasa Pendidikan	948,651.7	996,811.5	1,073,653.8	1,157,438.0	1,194,995.4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	244,130.4	262,486.9	281,683.2	302,837.0	318,577.5
R,S,T,U	Jasa lainnya	281,174.5	296,218.9	315,933.2	342,511.4	363,114.3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13,407,021.8	14,138,719.3	14,851,124.1	15,588,520.4	16,377,984.3

Lampiran Tabel 18.
Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Bantul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.73	2.66	-2.62	2.12	1.52
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.80	2.56	-3.28	1.92	1.49
	a. Tanaman Pangan	3.93	0.39	-1.31	2.90	2.71
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1.63	0.94	-13.20	6.84	-1.20
	c. Perkebunan Semusim	4.28	2.09	0.63	-3.50	-4.79
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	11.21	6.16	-9.09	-1.20	-0.97
	e. Perkebunan Tahunan	3.17	6.38	-0.46	-0.56	1.43
	f. Peternakan	2.21	1.08	4.22	4.84	3.57
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	2.30	0.82	8.61	0.76	2.07
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.32	1.96	3.82	3.73	1.35
	3 Perikanan	7.39	6.01	8.41	5.30	2.46
B	Pertambangan dan Penggalian	2.03	2.45	1.54	0.61	0.35
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2.03	2.45	1.54	0.61	0.35
C	Industri Pengolahan	-2.34	6.29	4.02	2.67	5.30
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-4.96	8.35	10.23	3.98	6.64
	3 Pengolahan Tembakau	0.27	1.75	-20.02	-4.39	2.21
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.34	8.72	9.23	8.19	8.43
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3.10	5.53	-1.96	8.03	4.76
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	1.56	3.76	-0.66	-2.07	-1.32
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-2.62	1.73	4.21	1.98	5.40
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1.42	1.55	8.19	7.88	6.30
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5.54	-0.36	-4.00	-6.86	-4.14
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.69	7.54	1.26	-4.20	0.25
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	-2.76	4.80	4.52	-0.17	1.57
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-1.02	-0.41	7.65	5.95	4.87
	14 Industri Alat Angkutan	3.85	-1.04	-9.26	-7.02	-4.25
	15 Industri Furnitur	-1.93	1.79	-3.60	-2.79	3.92
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	2.88	4.77	-5.70	2.33	1.98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.53	6.11	7.34	3.08	15.10
	1 Ketenagalistrikan	10.57	6.10	7.37	3.09	15.21
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	6.93	7.45	4.62	1.20	2.69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3.52	0.58	3.49	2.95	2.96
F	Konstruksi	5.10	4.84	5.80	4.05	4.07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	8.92	5.61	6.55	6.77	6.53
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	9.88	5.94	10.08	3.87	6.99
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	8.81	5.57	6.16	7.11	6.48
H	Transportasi dan Pergudangan	4.58	4.96	3.77	3.80	4.17
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	3.60	4.52	2.40	3.30	3.38
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	8.52	6.62	8.94	5.55	6.91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.34	7.54	7.73	5.89	6.31
	1 Penyediaan Akomodasi	8.82	7.88	6.25	7.25	8.31
	2 Penyediaan Makan Minum	6.02	7.50	7.92	5.72	6.05
J	Informasi dan Komunikasi	10.19	6.31	7.04	5.65	8.35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.62	11.75	9.53	8.55	5.08
	1 Jasa Perantara Keuangan	2.21	12.91	10.12	8.82	4.98
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	3.53	1.75	7.65	3.64	3.53
	3 Jasa Keuangan Lainnya	7.63	2.65	2.38	7.46	7.35
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.92	0.78	4.43	3.00	2.81
L	Real Estate	7.71	4.52	8.78	6.87	5.82
M,N	Jasa Perusahaan	6.23	4.47	6.59	7.06	4.26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	8.28	5.37	5.28	5.26	5.84
P	Jasa Pendidikan	6.24	5.08	7.71	7.80	3.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.62	7.52	7.31	7.51	5.20
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.99	5.35	6.66	8.41	6.02
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.33	5.46	5.04	4.97	5.06

Lampiran Tabel 19.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.38	15.34	14.46	14.60	14.39
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pert	14.37	14.30	13.37	13.49	13.31
	a. Tanaman Pangan	6.01	5.50	4.98	5.26	5.27
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.52	0.52	0.42	0.43	0.41
	c. Perkebunan Semusim	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4.77	5.25	4.94	4.75	4.59
	e. Perkebunan Tahunan	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19
	f. Peternakan	2.49	2.48	2.46	2.52	2.51
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.27	0.26	0.28	0.26	0.25
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.48	0.47	0.46	0.48	0.47
	3 Perikanan	0.52	0.58	0.62	0.63	0.61
B	Pertambangan dan Penggalian	0.71	0.66	0.66	0.65	0.61
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.71	0.66	0.66	0.65	0.61
C	Industri Pengolahan	15.12	15.44	15.50	15.06	15.17
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	6.96	7.18	7.71	7.62	7.80
	3 Pengolahan Tembakau	1.55	1.65	1.40	1.26	1.25
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.68	1.77	1.82	1.84	1.90
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.75	0.76	0.70	0.69	0.69
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0.52	0.50	0.46	0.43	0.40
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.69	0.71	0.70	0.66	0.62
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0.79	0.77	0.75	0.70	0.67
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15
	14 Industri Alat Angkutan	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
	15 Industri Furnitur	1.33	1.29	1.17	1.10	1.08
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0.32	0.31	0.29	0.29	0.29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13
	1 Ketenagalistrikan	0.12	0.10	0.10	0.11	0.13
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08
F	Konstruksi	9.51	9.37	9.35	9.33	9.29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	8.52	8.35	8.33	8.20	8.46
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0.86	0.87	0.90	0.90	0.94
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	7.66	7.48	7.43	7.30	7.52
H	Transportasi dan Pergudangan	4.97	4.89	4.95	4.87	4.79
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	3.86	3.81	3.84	3.75	3.66
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1.11	1.09	1.11	1.11	1.14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.32	10.97	11.38	11.59	11.67
	1 Penyediaan Akomodasi	1.24	1.32	1.31	1.36	1.39
	2 Penyediaan Makan Minum	9.08	9.65	10.06	10.22	10.28
J	Informasi dan Komunikasi	8.35	7.95	7.62	7.30	7.26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.48	2.58	2.73	2.82	2.82
	1 Jasa Perantara Keuangan	2.22	2.34	2.50	2.59	2.59
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	6.35	6.25	6.46	6.53	6.58
M,N	Jasa Perusahaan	0.52	0.48	0.49	0.49	0.48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6.95	7.11	7.27	7.41	7.51
P	Jasa Pendidikan	6.79	6.65	6.83	7.10	6.92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.81	1.80	1.79	1.84	1.85
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.03	1.96	1.98	2.01	1.98
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Lampiran Tabel 20.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Bantul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.81	0.38	-0.36	0.27	0.19
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.77	0.34	-0.42	0.23	0.17
	a. Tanaman Pangan	0.22	0.02	-0.07	0.14	0.13
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.01	0.00	-0.06	0.03	0.00
	c. Perkebunan Semusim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.47	0.27	-0.41	-0.05	-0.04
	e. Perkebunan Tahunan	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	f. Peternakan	0.05	0.03	0.09	0.11	0.08
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
	3 Perikanan	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01
B	Pertambangan dan Penggalian	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	-0.38	0.94	0.61	0.40	0.78
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	Industri Makanan dan Minuman					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-0.38	0.58	0.73	0.30	0.49
	3 Pengolahan Tembakau	0.00	0.02	-0.27	-0.04	0.02
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.01	0.14	0.15	0.14	0.15
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.02	0.04	-0.01	0.05	0.03
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	0.01	0.02	0.00	-0.01	-0.01
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.01	0.05	0.01	-0.03	0.00
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	-0.02	0.04	0.04	0.00	0.01
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	14 Industri Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15 Industri Furnitur	-0.03	0.02	-0.05	-0.03	0.04
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	0.01	0.02	-0.02	0.01	0.01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02
	1 Ketenagalistrikan	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Konstruksi	0.50	0.47	0.56	0.40	0.39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0.70	0.46	0.54	0.56	0.55
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0.08	0.05	0.08	0.03	0.06
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	0.63	0.41	0.45	0.53	0.49
H	Transportasi dan Pergudangan	0.24	0.25	0.19	0.19	0.21
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	0.15	0.18	0.10	0.13	0.13
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0.09	0.07	0.10	0.06	0.08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.63	0.76	0.79	0.62	0.67
	1 Penyediaan Akomodasi	0.10	0.09	0.07	0.09	0.10
	2 Penyediaan Makan Minum	0.53	0.66	0.71	0.53	0.56
J	Informasi dan Komunikasi	0.93	0.60	0.68	0.55	0.82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.06	0.28	0.24	0.22	0.14
	1 Jasa Perantara Keuangan	0.05	0.27	0.23	0.21	0.12
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	0.49	0.29	0.57	0.46	0.40
M,N	Jasa Perusahaan	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0.55	0.36	0.36	0.36	0.40
P	Jasa Pendidikan	0.44	0.36	0.54	0.56	0.24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.17	0.14	0.14	0.14	0.10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.12	0.11	0.14	0.18	0.13
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.33	5.46	5.04	4.97	5.06

Lampiran Tabel 21.
PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,838,937.2	3,046,994.5	3,150,565.0	3,535,656.7	3,787,293.3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertani	2,360,750.3	2,523,488.1	2,579,953.8	2,893,983.8	3,107,888.0
	a. Tanaman Pangan	1,414,887.1	1,439,232.6	1,421,015.0	1,654,410.2	1,791,821.4
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	7,286.8	8,097.9	7,688.8	8,291.0	8,677.1
	c. Perkebunan Semusim	3,471.8	3,764.8	4,241.7	4,493.2	4,552.8
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	344,722.4	415,139.3	422,137.3	442,591.4	460,530.8
	e. Perkebunan Tahunan	17,941.0	19,893.2	22,683.6	22,330.0	24,722.2
	f. Peternakan	523,620.3	584,180.9	642,772.5	700,251.6	750,359.2
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	48,820.9	53,179.5	59,414.8	61,616.5	67,224.5
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	391,254.0	421,629.6	456,036.4	513,727.3	545,492.0
	3 Perikanan	86,932.9	101,876.8	114,574.8	127,945.6	133,913.2
B	Pertambangan dan Penggalian	160,265.0	170,194.5	178,643.4	188,772.5	195,599.8
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	160,265.0	170,194.5	178,643.4	188,772.5	195,599.8
C	Industri Pengolahan	956,960.4	1,086,106.3	1,204,712.4	1,284,288.4	1,405,322.4
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara			0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas			0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	566,776.6	657,919.9	756,613.1	818,833.9	914,922.2
	3 Pengolahan Tembakau	629.5	731.7	717.7	723.5	786.0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	13,213.7	15,787.6	17,761.0	19,618.4	21,509.0
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2,663.8	2,994.2	3,203.5	3,396.8	3,694.0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	41,130.9	44,344.3	45,571.1	46,244.4	47,131.7
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	4,851.7	5,211.1	5,671.8	5,921.8	6,551.1
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	20,400.9	18,874.1	21,419.4	24,253.5	26,803.9
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3,641.2	3,862.5	4,169.9	3,936.4	3,855.4
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	80,422.8	93,029.3	102,467.1	104,925.5	107,745.7
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elek	48,697.4	52,076.8	56,260.6	57,098.5	60,097.3
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	16,755.3	17,263.2	18,909.4	20,086.2	22,234.6
	14 Industri Alat Angkutan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15 Industri Furnitur	121,090.6	133,734.0	129,259.2	133,428.5	141,812.2
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pema	36,686.1	40,277.5	42,688.7	45,821.1	48,179.4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,037.1	7,563.4	8,991.0	10,404.2	12,444.1
	1 Ketenagalistrikan	7,888.5	7,406.0	8,828.7	10,243.3	12,269.4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	148.6	157.4	162.3	161.0	174.7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	17,940.9	19,538.6	22,134.7	23,520.7	24,682.0
F	Konstruksi	1,004,221.5	1,109,379.3	1,198,556.4	1,298,853.1	1,407,758.0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	935,267.2	1,002,567.1	1,126,233.7	1,218,309.9	1,381,432.0
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	47,740.6	54,972.2	62,536.0	67,967.5	76,273.1
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan S	887,526.6	947,594.8	1,063,697.7	1,150,342.4	1,305,159.0
H	Transportasi dan Pergudangan	551,034.8	603,119.4	659,675.5	707,695.0	755,286.7
	1 Angkutan Rel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Angkutan Darat	436,353.3	478,073.4	520,332.7	553,254.7	584,595.8
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos d	114,681.5	125,046.0	139,342.8	154,440.2	170,690.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	544,434.6	628,770.2	726,389.4	813,608.1	883,856.8
	1 Penyediaan Akomodasi	9,997.9	11,963.7	13,190.2	15,062.6	16,703.7
	2 Penyediaan Makan Minum	534,436.8	616,806.5	713,199.2	798,545.6	867,153.1
J	Informasi dan Komunikasi	808,024.7	855,560.3	916,149.7	963,597.6	1,051,970.4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	211,943.4	243,579.5	284,852.3	322,775.3	346,867.9
	1 Jasa Perantara Keuangan	185,896.6	214,873.4	253,061.6	288,479.6	309,558.8
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	10,479.7	10,996.3	12,354.6	13,212.4	14,160.7
	3 Jasa Keuangan Lainnya	15,484.4	17,624.0	19,340.3	20,982.9	23,041.9
	4 Jasa Penunjang Keuangan	82.8	85.8	95.8	100.3	106.5
L	Real Estate	351,999.1	385,700.5	430,299.2	474,733.5	528,958.9
M,N	Jasa Perusahaan	49,077.8	49,472.5	55,035.7	60,222.3	64,966.4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	930,487.0	1,048,848.1	1,166,153.8	1,289,112.2	1,405,268.5
P	Jasa Pendidikan	629,714.2	678,669.5	772,874.0	876,367.3	928,758.6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,238.4	227,171.6	247,287.8	277,851.2	299,358.7
R,S,T,U	Jasa lainnya	338,771.2	367,105.3	408,817.1	452,888.9	502,230.6
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10,545,354.5	11,530,340.8	12,557,371.3	13,798,656.9	14,982,055.1

Lampiran Tabel 22.
PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,452,276.5	2,508,677.4	2,493,155.8	2,557,403.2	2,613,141.8
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertani	2,016,569.9	2,066,846.4	2,039,894.2	2,087,324.1	2,135,212.1
	a. Tanaman Pangan	1,210,971.2	1,226,636.7	1,203,663.7	1,238,415.9	1,272,198.9
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	6,473.9	6,648.4	6,443.5	6,719.0	6,714.2
	c. Perkebunan Semusim	3,189.4	3,310.8	3,376.1	3,284.3	3,189.6
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	301,945.2	320,819.1	287,592.9	285,079.0	283,004.5
	e. Perkebunan Tahunan	14,871.4	15,887.7	16,088.2	15,476.2	15,643.2
	f. Peternakan	435,640.2	449,408.6	476,208.5	491,092.1	505,490.9
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	43,478.5	44,135.1	46,521.3	47,257.6	48,971.0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	359,529.3	361,775.9	369,673.8	382,529.1	388,647.8
	3 Perikanan	76,177.4	80,055.1	83,587.8	87,550.0	89,281.9
B	Pertambangan dan Penggalian	151,107.6	158,455.7	160,985.2	161,383.4	162,657.3
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	151,107.6	158,455.7	160,985.2	161,383.4	162,657.3
C	Industri Pengolahan	895,217.6	968,727.9	1,008,531.4	1,035,163.3	1,089,755.5
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara			0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas			0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	523,204.0	576,211.1	614,314.3	644,235.3	687,751.2
	3 Pengolahan Tembakau	513.3	519.3	441.6	434.4	446.4
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	11,324.9	12,508.7	13,485.7	14,495.8	15,392.3
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2,477.3	2,640.8	2,683.9	2,814.1	2,905.2
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	40,593.6	42,682.7	42,615.2	41,981.3	41,913.5
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	4,695.9	4,810.5	5,007.7	5,112.1	5,426.2
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	22,062.6	21,919.6	23,629.0	25,342.3	27,252.7
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3,340.1	3,293.7	3,475.4	3,218.6	3,045.1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	75,478.0	82,617.9	86,256.3	82,204.4	82,544.9
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elek	46,291.4	48,872.5	50,380.1	49,946.6	52,264.1
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	15,364.0	15,225.0	16,214.7	17,092.5	18,095.3
	14 Industri Alat Angkutan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15 Industri Furnitur	115,301.8	120,905.8	113,772.1	111,399.3	115,419.8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pema	34,570.8	36,520.3	36,255.4	36,886.5	37,298.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,377.9	10,025.5	10,775.4	11,030.5	12,610.8
	1 Ketenagalistrikan	9,253.5	9,897.1	10,644.9	10,898.3	12,475.5
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	124.3	128.4	130.5	132.2	135.3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	16,544.6	16,785.1	17,437.0	17,940.0	18,351.0
F	Konstruksi	904,779.7	945,650.5	993,510.4	1,036,792.6	1,092,138.3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	866,000.1	910,271.7	971,903.7	1,038,835.3	1,111,128.3
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasiny	43,606.0	46,176.0	50,812.5	52,659.0	56,297.0
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan S	822,394.1	864,095.7	921,091.2	986,176.3	1,054,831.2
H	Transportasi dan Pergudangan	523,854.8	548,633.4	561,987.4	582,657.8	603,242.2
	1 Angkutan Rel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Angkutan Darat	424,133.5	443,223.9	449,507.6	463,407.5	476,301.8
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos d	99,721.2	105,409.5	112,479.8	119,250.2	126,940.5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	507,494.2	549,675.6	596,989.2	635,346.4	670,616.2
	1 Penyediaan Akomodasi	8,645.8	9,427.3	9,863.8	10,592.9	11,466.8
	2 Penyediaan Makan Minum	498,848.4	540,248.3	587,125.5	624,753.5	659,149.4
J	Informasi dan Komunikasi	834,951.0	886,937.7	957,028.2	1,011,119.7	1,099,899.7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	177,683.8	198,811.9	220,771.0	239,629.5	250,943.1
	1 Jasa Perantara Keuangan	154,282.9	174,194.0	194,619.7	211,890.4	221,671.8
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	9,442.9	9,596.0	10,261.8	10,669.1	11,075.5
	3 Jasa Keuangan Lainnya	13,886.0	14,945.5	15,811.0	16,988.9	18,112.8
	4 Jasa Penunjang Keuangan	72.0	73.4	78.4	81.0	83.1
L	Real Estate	326,602.0	341,097.1	368,705.2	393,209.3	420,060.4
M,N	Jasa Perusahaan	48,071.4	49,766.5	52,936.8	56,662.6	59,527.9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	849,357.4	887,944.9	939,395.0	988,811.7	1,040,788.4
P	Jasa Pendidikan	610,113.9	640,146.6	692,197.5	744,844.8	770,301.1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,216.6	208,405.4	223,760.5	239,841.1	250,576.0
R,S,T,U	Jasa lainnya	330,330.7	347,419.6	369,722.6	401,692.0	431,708.9
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9,695,979.8	10,177,432.5	10,639,792.3	11,152,363.1	11,697,446.9

Lampiran Tabel 23.
Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.16	2.30	-0.62	2.58	2.18
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.43	2.49	-1.30	2.33	2.29
	a. Tanaman Pangan	3.38	1.29	-1.87	2.89	2.73
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	1.12	2.69	-3.08	4.28	-0.07
	c. Perkebunan Semusim	5.75	3.81	1.97	-2.72	-2.88
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	12.90	6.25	-10.36	-0.87	-0.73
	e. Perkebunan Tahunan	0.86	6.83	1.26	-3.80	1.08
	f. Peternakan	2.19	3.16	5.96	3.13	2.93
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	4.24	1.51	5.41	1.58	3.63
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.97	0.62	2.18	3.48	1.60
	3 Perikanan	2.59	5.09	4.41	4.74	1.98
B	Pertambangan dan Penggalian	0.87	4.86	1.60	0.25	0.79
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Biji Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.87	4.86	1.60	0.25	0.79
C	Industri Pengolahan	-3.41	8.21	4.11	2.64	5.27
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-5.86	10.13	6.61	4.87	6.75
	3 Pengolahan Tembakau	0.65	1.17	-14.96	-1.64	2.76
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.13	10.45	7.81	7.49	6.18
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5.39	6.60	1.63	4.85	3.24
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	1.26	5.15	-0.16	-1.49	-0.16
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-2.92	2.44	4.10	2.09	6.14
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.78	-0.65	7.80	7.25	7.54
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6.02	-1.39	5.52	-7.39	-5.39
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	-2.14	9.46	4.40	-4.70	0.41
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektrik	0.61	5.58	3.08	-0.86	4.64
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-1.07	-0.90	6.50	5.41	5.87
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	-0.56	4.86	-5.90	-2.09	3.61
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemeliharaan	5.31	5.64	-0.73	1.74	1.12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.26	6.91	7.48	2.37	14.33
	1 Ketenagalistrikan	11.36	6.96	7.56	2.38	14.47
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4.25	3.27	1.61	1.29	2.33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	2.53	1.45	3.88	2.88	2.29
F	Konstruksi	5.87	4.52	5.06	4.36	5.34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7.01	5.11	6.77	6.89	6.96
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4.59	5.89	10.04	3.63	6.91
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda	7.14	5.07	6.60	7.07	6.96
H	Transportasi dan Pergudangan	2.59	4.73	2.43	3.68	3.53
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	1.90	4.50	1.42	3.09	2.78
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan	5.61	5.70	6.71	6.02	6.45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.76	8.31	8.61	6.43	5.55
	1 Penyediaan Akomodasi	8.50	9.04	4.63	7.39	8.25
	2 Penyediaan Makan Minum	4.70	8.30	8.68	6.41	5.51
J	Informasi dan Komunikasi	10.56	6.23	7.90	5.65	8.78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.79	11.89	11.05	8.54	4.72
	1 Jasa Perantara Keuangan	2.38	12.91	11.73	8.87	4.62
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	3.03	1.62	6.94	3.97	3.81
	3 Jasa Keuangan Lainnya	7.39	7.65	5.77	7.45	6.62
	4 Jasa Penunjang Keuangan	2.63	2.04	6.81	3.23	2.65
L	Real Estate	5.53	4.44	8.09	6.65	6.83
M,N	Jasa Perusahaan	8.75	3.53	6.37	7.04	5.06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	7.77	4.54	5.79	5.26	5.26
P	Jasa Pendidikan	5.64	4.92	8.13	7.61	3.42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.89	8.42	7.37	7.19	4.48
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.64	5.17	6.42	8.65	7.47
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.84	4.97	4.54	4.82	4.89

Lampiran Tabel 24.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.21	26.92	25.09	25.62	25.28
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	21.60	22.39	20.55	20.97	20.74
	a. Tanaman Pangan	13.07	13.42	11.32	11.99	11.96
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
	c. Perkebunan Semusim	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3.02	3.27	3.36	3.21	3.07
	e. Perkebunan Tahunan	0.17	0.17	0.18	0.16	0.17
	f. Peternakan	4.79	4.97	5.12	5.07	5.01
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.45	0.46	0.47	0.45	0.45
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3.81	3.71	3.63	3.72	3.64
	3 Perikanan	0.81	0.82	0.91	0.93	0.89
B	Pertambangan dan Penggalian	1.61	1.52	1.42	1.37	1.31
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Biji Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.61	1.52	1.42	1.37	1.31
C	Industri Pengolahan	10.07	9.07	9.59	9.31	9.38
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	6.14	5.37	6.03	5.93	6.11
	3 Pengolahan Tembakau	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bar	0.43	0.39	0.36	0.34	0.31
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.21	0.19	0.17	0.18	0.18
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.82	0.76	0.82	0.76	0.72
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elek	0.48	0.46	0.45	0.41	0.40
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	1.24	1.15	1.03	0.97	0.95
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pema	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
	1 Ketenagalistrikan	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0.18	0.17	0.18	0.17	0.16
F	Konstruksi	9.32	9.52	9.54	9.41	9.40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	8.76	8.87	8.97	8.83	9.22
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0.46	0.45	0.50	0.49	0.51
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan S	8.31	8.42	8.47	8.34	8.71
H	Transportasi dan Pergudangan	5.37	5.23	5.25	5.13	5.04
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	4.30	4.14	4.14	4.01	3.90
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos d	1.06	1.09	1.11	1.12	1.14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.25	5.16	5.78	5.90	5.90
	1 Penyediaan Akomodasi	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11
	2 Penyediaan Makan Minum	5.16	5.07	5.68	5.79	5.79
J	Informasi dan Komunikasi	7.72	7.66	7.30	6.98	7.02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.92	2.01	2.27	2.34	2.32
	1 Jasa Perantara Keuangan	1.67	1.76	2.02	2.09	2.07
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	3.28	3.34	3.43	3.44	3.53
M,N	Jasa Perusahaan	0.49	0.47	0.44	0.44	0.43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	8.43	8.82	9.29	9.34	9.38
P	Jasa Pendidikan	6.15	5.97	6.15	6.35	6.20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.92	1.97	1.97	2.01	2.00
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.25	3.21	3.26	3.28	3.35
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Lampiran Tabel 25.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Gunungkidul Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.06	0.58	-0.15	0.60	0.50
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.93	0.52	-0.26	0.45	0.43
	a. Tanaman Pangan	0.43	0.16	-0.23	0.33	0.30
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Perkebunan Semusim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.37	0.19	-0.33	-0.02	-0.02
	e. Perkebunan Tahunan	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00
	f. Peternakan	0.10	0.14	0.26	0.14	0.13
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.11	0.02	0.08	0.12	0.05
	3 Perikanan	0.02	0.04	0.03	0.04	0.02
B	Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.08	0.02	0.00	0.01
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.01	0.08	0.02	0.00	0.01
C	Industri Pengolahan	-0.34	0.76	0.39	0.25	0.49
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	Industri Makanan dan Minuman					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-0.35	0.55	0.37	0.28	0.39
	3 Pengolahan Tembakau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bar	0.01	0.02	0.00	-0.01	0.00
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	-0.02	0.07	0.04	-0.04	0.00
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elek	0.00	0.03	0.01	0.00	0.02
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	-0.01	0.06	-0.07	-0.02	0.04
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	1 Ketenagalistrikan	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
F	Konstruksi	0.54	0.42	0.47	0.41	0.50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0.61	0.46	0.61	0.63	0.65
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasiny	0.02	0.03	0.05	0.02	0.03
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan S	0.59	0.43	0.56	0.61	0.62
H	Transportasi dan Pergudangan	0.14	0.26	0.13	0.19	0.18
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	0.09	0.20	0.06	0.13	0.12
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos d	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.25	0.44	0.46	0.36	0.32
	1 Penyediaan Akomodasi	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
	2 Penyediaan Makan Minum	0.24	0.43	0.46	0.35	0.31
J	Informasi dan Komunikasi	0.86	0.54	0.69	0.51	0.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.05	0.22	0.22	0.18	0.10
	1 Jasa Perantara Keuangan	0.04	0.21	0.20	0.16	0.09
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	0.18	0.15	0.27	0.23	0.24
M,N	Jasa Perusahaan	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0.66	0.40	0.51	0.46	0.47
P	Jasa Pendidikan	0.35	0.31	0.51	0.49	0.23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.20	0.17	0.15	0.15	0.10
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.19	0.18	0.22	0.30	0.27
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.84	4.97	4.54	4.82	4.89

Lampiran Tabel 26.
PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,290,986.4	2,534,773.3	2,574,199.3	2,826,715.0	2,983,069.2
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	2,163,196.1	2,393,150.1	2,419,559.8	2,656,007.0	2,804,252.5
	a. Tanaman Pangan	695,100.8	702,048.9	683,578.0	788,383.7	857,513.6
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	136,030.6	149,463.6	140,352.4	152,636.0	157,337.6
	c. Perkebunan Semusim	18,448.8	19,262.9	21,070.3	21,865.3	22,659.4
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	819,493.2	999,876.2	1,004,807.8	1,064,913.3	1,096,458.4
	e. Perkebunan Tahunan	21,000.6	22,815.8	24,708.2	24,133.1	27,566.8
	f. Peternakan	429,423.6	452,807.4	491,989.4	548,606.1	582,411.4
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	43,698.6	46,875.4	53,053.7	55,469.6	60,305.2
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	52,202.8	55,127.0	58,660.8	64,826.9	68,547.8
	3 Perikanan	75,587.5	86,496.2	95,978.8	105,881.1	110,268.8
B	Pertambangan dan Penggalian	116,627.4	122,599.9	137,850.2	147,413.2	152,576.6
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	116,627.4	122,599.9	137,850.2	147,413.2	152,576.6
C	Industri Pengolahan	3,564,850.8	4,021,392.5	4,311,424.1	4,543,920.0	4,943,591.4
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1,471,990.4	1,693,806.6	1,932,243.4	2,070,675.7	2,312,503.0
	3 Pengolahan Tembakau	387,402.5	450,669.1	397,367.6	400,624.1	431,054.6
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	599,238.7	695,470.7	773,357.4	841,914.8	923,572.4
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	84,829.5	95,896.2	98,587.8	106,789.0	114,161.9
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	51,293.3	54,065.7	55,101.8	55,664.8	55,487.5
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	154,413.6	162,964.5	174,220.1	183,991.5	201,864.6
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	39,845.4	39,160.5	42,873.9	48,866.0	53,305.3
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	301,923.3	317,823.9	310,620.6	290,209.2	280,395.1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	142,406.5	162,811.4	171,954.9	170,680.4	176,705.1
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	7,469.1	7,828.9	8,394.6	8,586.6	8,993.7
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	47,188.7	48,291.9	52,871.6	56,932.3	60,216.5
	14 Industri Alat Angkutan	625.2	633.3	588.2	545.0	535.0
	15 Industri Furnitur	152,603.2	159,815.9	157,488.1	161,489.8	171,715.5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	123,621.4	132,154.0	135,754.2	146,951.0	153,081.3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,229.9	24,296.8	27,895.9	32,016.3	38,680.5
	1 Ketenagalistrikan	24,978.7	24,023.6	27,612.2	31,732.5	38,376.3
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	251.2	273.1	283.6	283.8	304.2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	13,270.2	14,052.2	16,069.8	17,198.3	17,992.7
F	Konstruksi	2,892,462.5	3,109,586.7	3,365,673.5	3,671,128.5	3,960,104.0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,935,808.7	2,103,955.9	2,362,696.9	2,574,664.1	2,883,199.6
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasin	447,595.8	512,528.6	574,589.7	624,929.2	700,629.9
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1,488,212.9	1,591,427.3	1,788,107.2	1,949,734.9	2,182,569.7
H	Transportasi dan Pergudangan	1,638,557.6	1,929,376.7	2,164,299.8	2,377,612.6	2,691,431.9
	1 Angkutan Rel	904.8	904.1	1,130.3	1,364.8	1,529.6
	2 Angkutan Darat	676,741.0	741,545.8	818,941.1	880,008.6	928,556.2
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	594,682.8	777,432.1	886,133.4	992,291.0	1,206,916.6
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	366,229.0	409,494.7	458,095.0	503,948.2	554,429.5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,495,259.2	2,796,604.3	3,086,048.1	3,450,076.4	3,803,368.4
	1 Penyediaan Akomodasi	510,975.5	611,660.5	661,704.5	751,632.1	833,492.0
	2 Penyediaan Makan Minum	1,984,283.7	2,184,943.8	2,424,343.6	2,698,444.3	2,969,876.4
J	Informasi dan Komunikasi	2,343,189.4	2,470,222.7	2,612,761.5	2,726,066.7	2,961,884.7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	726,674.2	860,246.4	992,908.7	1,114,723.3	1,205,541.8
	1 Jasa Perantara Keuangan	527,910.0	643,199.0	760,582.2	862,638.2	930,523.7
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	34,079.7	35,373.2	39,800.8	42,630.1	46,321.1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	163,476.4	180,443.4	191,189.8	208,056.0	227,213.2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1,208.2	1,230.8	1,335.9	1,399.0	1,483.8
L	Real Estate	2,014,600.3	2,129,836.5	2,383,940.9	2,626,348.2	2,923,612.0
M,N	Jasa Perusahaan	460,136.2	470,231.8	528,106.6	578,396.9	618,775.8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,594,237.3	1,796,460.4	2,021,715.0	2,251,056.6	2,520,298.8
P	Jasa Pendidikan	2,459,108.3	2,644,487.8	2,943,821.9	3,346,591.6	3,576,688.4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	590,589.7	646,475.9	701,977.8	791,283.7	868,505.4
R,S,T,U	Jasa lainnya	570,660.8	620,762.9	680,848.8	751,294.1	842,093.9
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	25,732,248.9	28,295,362.8	30,912,238.7	33,826,505.4	36,991,415.1

Lampiran Tabel 27.
PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,011,265.1	2,066,440.3	1,968,070.7	2,003,474.9	2,025,845.0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,897,844.3	1,948,817.1	1,848,247.5	1,879,168.7	1,899,889.7
	a. Tanaman Pangan	599,738.3	600,435.8	582,884.2	599,870.0	616,667.1
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	124,027.7	125,358.5	112,232.1	116,944.7	116,794.8
	c. Perkebunan Semusim	16,947.0	17,344.3	17,469.9	16,869.4	16,135.1
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	718,451.4	763,259.2	674,276.7	664,643.7	659,088.1
	e. Perkebunan Tahunan	17,325.5	18,253.2	18,129.9	17,432.2	17,293.4
	f. Peternakan	382,773.9	385,219.2	401,635.5	420,727.9	430,017.0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	38,580.5	38,947.0	41,619.1	42,680.8	43,894.2
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	49,464.7	50,127.0	51,327.0	52,717.8	53,309.7
	3 Perikanan	63,956.1	67,496.2	68,496.2	71,588.4	72,645.6
B	Pertambangan dan Penggalian	111,615.1	114,158.6	115,316.4	115,517.4	116,010.7
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	111,615.1	114,158.6	115,316.4	115,517.4	116,010.7
C	Industri Pengolahan	3,247,733.5	3,442,811.3	3,513,598.4	3,582,533.8	3,740,820.5
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1,363,388.6	1,487,910.9	1,591,997.5	1,648,531.5	1,757,123.3
	3 Pengolahan Tembakau	316,664.9	319,922.3	254,690.4	249,932.6	254,258.5
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	522,484.2	565,470.7	609,964.2	646,225.2	687,409.4
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	74,386.1	78,896.2	78,843.1	85,213.8	87,966.0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bahan	51,347.7	52,844.0	52,799.4	51,640.4	50,817.8
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	150,050.8	152,023.0	158,512.2	161,418.5	169,656.5
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	44,422.5	43,933.6	47,233.3	50,959.8	54,299.6
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	280,290.2	280,007.2	264,777.6	241,434.6	225,941.5
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	132,837.3	143,311.4	145,151.6	136,284.9	136,661.8
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik	7,081.4	7,378.9	7,536.8	7,529.5	7,707.5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	44,028.3	43,791.9	46,862.7	50,012.0	50,847.3
	14 Industri Alat Angkutan	566.5	553.3	498.4	460.6	441.1
	15 Industri Furnitur	146,892.8	149,613.9	143,200.6	138,977.7	143,970.2
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemeliharaan	113,292.3	117,154.0	111,530.6	113,912.5	113,720.1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30,687.6	32,747.5	33,932.0	34,426.8	39,685.0
	1 Ketenagalistrikan	30,478.7	32,523.6	33,702.4	34,192.0	39,446.8
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	209.0	223.8	229.6	234.8	238.3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	12,402.5	12,547.3	13,051.2	13,445.4	13,768.0
F	Konstruksi	2,689,103.6	2,816,446.0	2,975,378.7	3,107,439.5	3,255,739.8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,788,177.8	1,882,435.0	2,003,871.3	2,132,734.9	2,266,178.9
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	412,347.4	437,695.2	474,735.9	494,492.7	528,028.2
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1,375,830.4	1,444,739.7	1,529,135.4	1,638,242.2	1,738,150.7
H	Transportasi dan Pergudangan	1,486,851.7	1,621,175.8	1,708,682.4	1,775,484.4	1,906,605.9
	1 Angkutan Rel	826.1	809.0	862.5	931.2	962.7
	2 Angkutan Darat	657,299.0	687,115.5	711,859.4	739,902.5	754,977.3
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	515,711.0	597,096.7	631,131.2	650,043.1	740,177.1
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	313,015.5	336,154.7	364,829.3	384,607.6	410,488.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,273,315.2	2,435,074.3	2,581,614.6	2,738,288.4	2,902,017.7
	1 Penyediaan Akomodasi	436,712.6	472,561.4	494,344.9	530,855.6	574,810.8
	2 Penyediaan Makan Minum	1,836,602.6	1,962,512.9	2,087,269.7	2,207,432.8	2,327,206.9
J	Informasi dan Komunikasi	2,370,708.0	2,571,044.5	2,757,450.5	2,908,483.0	3,146,691.0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	630,611.7	713,637.0	778,030.1	845,349.5	889,891.3
	1 Jasa Perantara Keuangan	452,063.0	522,438.0	579,972.0	632,965.3	664,853.7
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	30,624.4	31,252.6	33,351.5	34,707.1	36,114.8
	3 Jasa Keuangan Lainnya	146,825.1	158,837.1	163,538.7	176,472.8	187,689.5
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1,099.2	1,109.3	1,167.9	1,204.2	1,233.3
L	Real Estate	1,923,376.6	2,019,632.4	2,188,665.9	2,333,477.3	2,462,400.1
M,N	Jasa Perusahaan	457,275.9	472,690.1	515,392.4	552,150.3	571,731.6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,446,081.9	1,517,840.3	1,618,043.2	1,702,107.9	1,802,366.0
P	Jasa Pendidikan	2,370,403.3	2,470,132.9	2,681,853.4	2,893,218.8	3,008,341.9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	550,302.6	593,989.7	641,582.9	690,675.4	721,549.5
R,S,T,U	Jasa lainnya	557,200.8	584,611.3	618,537.2	669,199.2	704,252.1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23,957,112.8	25,367,414.2	26,713,071.2	28,098,006.9	29,573,895.0

Lampiran Tabel 28.
Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Sleman Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.86	2.74	-4.76	1.80	1.12
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	5.91	2.69	-5.16	1.67	1.10
	a. Tanaman Pangan	3.97	0.12	-2.92	2.91	2.80
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.44	1.07	-10.47	4.20	-0.13
	c. Perkebunan Semusim	4.63	2.34	0.72	-3.44	-4.35
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	11.22	6.24	-11.66	-1.43	-0.84
	e. Perkebunan Tahunan	3.41	5.35	-0.68	-3.85	-0.80
	f. Peternakan	2.19	0.64	4.26	4.75	2.21
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1.24	0.95	6.86	2.55	2.84
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.72	1.34	2.39	2.71	1.12
	3 Perikanan	7.76	5.54	1.48	4.51	1.48
B	Pertambangan dan Penggalian	1.50	2.28	1.01	0.17	0.43
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.50	2.28	1.01	0.17	0.43
C	Industri Pengolahan	-2.12	6.01	2.06	1.96	4.42
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-6.08	9.13	7.00	3.55	6.59
	3 Pengolahan Tembakau	-0.51	1.03	-20.39	-1.87	1.73
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.32	8.23	7.87	5.94	6.37
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4.46	6.06	-0.07	8.08	3.23
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0.19	2.91	-0.08	-2.20	-1.59
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-1.94	1.31	4.27	1.83	5.10
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3.14	-1.10	7.51	7.89	6.55
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5.06	-0.10	-5.44	-8.82	-6.42
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	-1.23	7.88	1.28	-6.11	0.28
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	-3.96	4.20	2.14	-0.10	2.36
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.12	-0.54	7.01	6.72	1.67
	14 Industri Alat Angkutan	0.12	-2.32	-9.92	-7.58	-4.24
	15 Industri Furnitur	-1.89	1.85	-4.29	-2.95	3.59
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	6.97	3.41	-4.80	2.14	-0.17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.82	6.71	3.62	1.46	15.27
	1 Ketenagalistrikan	9.87	6.71	3.62	1.45	15.37
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	3.99	7.11	2.57	2.29	1.47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4.24	1.17	4.02	3.02	2.40
F	Konstruksi	6.08	4.74	5.64	4.44	4.77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7.76	5.27	6.45	6.43	6.26
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	7.49	6.15	8.46	4.16	6.78
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	7.85	5.01	5.84	7.14	6.10
H	Transportasi dan Pergudangan	8.50	9.03	5.40	3.91	7.39
	1 Angkutan Rel	2.14	-2.08	6.61	7.97	3.39
	2 Angkutan Darat	1.41	4.54	3.60	3.94	2.04
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	17.96	15.78	5.70	3.00	13.87
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	10.13	7.39	8.53	5.42	6.73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.79	7.12	6.02	6.07	5.98
	1 Penyediaan Akomodasi	11.59	8.21	4.61	7.39	8.28
	2 Penyediaan Makan Minum	5.71	6.86	6.36	5.76	5.43
J	Informasi dan Komunikasi	10.05	8.45	7.25	5.48	8.19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.66	13.17	9.02	8.65	5.27
	1 Jasa Perantara Keuangan	2.62	15.57	11.01	9.14	5.04
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	2.34	2.05	6.72	4.06	4.06
	3 Jasa Keuangan Lainnya	7.35	8.18	2.96	7.91	6.36
	4 Jasa Penunjang Keuangan	-0.41	0.92	5.28	3.11	2.42
L	Real Estate	8.86	5.00	8.37	6.62	5.52
M,N	Jasa Perusahaan	8.30	3.37	9.03	7.13	3.55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	7.09	4.96	6.60	5.20	5.89
P	Jasa Pendidikan	5.05	4.21	8.57	7.88	3.98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.08	7.94	8.01	7.65	4.47
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.90	4.92	5.80	8.19	5.24
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.79	5.89	5.30	5.18	5.25

Lampiran Tabel 29.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sleman Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.90	8.96	8.33	8.36	8.06
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	8.41	8.46	7.83	7.85	7.58
	a. Tanaman Pangan	2.70	2.48	2.21	2.33	2.32
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.53	0.53	0.45	0.45	0.43
	c. Perkebunan Semusim	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3.18	3.53	3.25	3.15	2.96
	e. Perkebunan Tahunan	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
	f. Peternakan	1.67	1.60	1.59	1.62	1.57
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19
	3 Perikanan	0.29	0.31	0.31	0.31	0.30
B	Pertambangan dan Penggalian	0.45	0.43	0.45	0.44	0.41
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.45	0.43	0.45	0.44	0.41
C	Industri Pengolahan	13.85	14.21	13.95	13.43	13.36
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.72	5.99	6.25	6.12	6.25
	3 Pengolahan Tembakau	1.51	1.59	1.29	1.18	1.17
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2.33	2.46	2.50	2.49	2.50
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.33	0.34	0.32	0.32	0.31
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0.20	0.19	0.18	0.16	0.15
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0.60	0.58	0.56	0.54	0.55
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.17	1.12	1.00	0.86	0.76
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.55	0.58	0.56	0.50	0.48
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16
	14 Industri Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15 Industri Furnitur	0.59	0.56	0.51	0.48	0.46
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0.48	0.47	0.44	0.43	0.41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10
	1 Ketenagalistrikan	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
F	Konstruksi	11.24	10.99	10.89	10.85	10.71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil da	7.52	7.44	7.64	7.61	7.79
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	1.74	1.81	1.86	1.85	1.89
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5.78	5.62	5.78	5.76	5.90
H	Transportasi dan Pergudangan	6.37	6.82	7.00	7.03	7.28
	1 Angkutan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Angkutan Darat	2.63	2.62	2.65	2.60	2.51
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	2.31	2.75	2.87	2.93	3.26
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1.42	1.45	1.48	1.49	1.50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.70	9.88	9.98	10.20	10.28
	1 Penyediaan Akomodasi	1.99	2.16	2.14	2.22	2.25
	2 Penyediaan Makan Minum	7.71	7.72	7.84	7.98	8.03
J	Informasi dan Komunikasi	9.11	8.73	8.45	8.06	8.01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.82	3.04	3.21	3.30	3.26
	1 Jasa Perantara Keuangan	2.05	2.27	2.46	2.55	2.52
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.64	0.64	0.62	0.62	0.61
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	7.83	7.53	7.71	7.76	7.90
M,N	Jasa Perusahaan	1.79	1.66	1.71	1.71	1.67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6.20	6.35	6.54	6.65	6.81
P	Jasa Pendidikan	9.56	9.35	9.52	9.89	9.67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.30	2.28	2.27	2.34	2.35
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.22	2.19	2.20	2.22	2.28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Lampiran Tabel 30.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten Sleman Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.49	0.23	-0.39	0.13	0.08
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.47	0.21	-0.40	0.12	0.07
	a. Tanaman Pangan	0.10	0.00	-0.07	0.06	0.06
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.00	0.01	-0.05	0.02	0.00
	c. Perkebunan Semusim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.32	0.19	-0.35	-0.04	-0.02
	e. Perkebunan Tahunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f. Peternakan	0.04	0.01	0.06	0.07	0.03
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	3 Perikanan	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00
B	Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	-0.31	0.81	0.28	0.26	0.56
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	Industri Makanan dan Minuman					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-0.39	0.52	0.41	0.21	0.39
	3 Pengolahan Tembakau	-0.01	0.01	-0.26	-0.02	0.02
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.01	0.18	0.18	0.14	0.15
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-0.01	0.01	0.03	0.01	0.03
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.06	0.00	-0.06	-0.09	-0.06
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	-0.01	0.04	0.01	-0.03	0.00
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	14 Industri Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15 Industri Furnitur	-0.01	0.01	-0.03	-0.02	0.02
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	0.03	0.02	-0.02	0.01	0.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02
	1 Ketenagalistrikan	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Konstruksi	0.68	0.53	0.63	0.49	0.53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0.57	0.39	0.48	0.48	0.47
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0.13	0.11	0.15	0.07	0.12
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	0.44	0.29	0.33	0.41	0.36
H	Transportasi dan Pergudangan	0.51	0.56	0.34	0.25	0.47
	1 Angkutan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Angkutan Darat	0.04	0.12	0.10	0.10	0.05
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	0.35	0.34	0.13	0.07	0.32
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0.13	0.10	0.11	0.07	0.09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.64	0.68	0.58	0.59	0.58
	1 Penyediaan Akomodasi	0.20	0.15	0.09	0.14	0.16
	2 Penyediaan Makan Minum	0.44	0.53	0.49	0.45	0.43
J	Informasi dan Komunikasi	0.96	0.84	0.73	0.57	0.85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.10	0.35	0.25	0.25	0.16
	1 Jasa Perantara Keuangan	0.05	0.29	0.23	0.20	0.11
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.04	0.05	0.02	0.05	0.04
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	0.69	0.40	0.67	0.54	0.46
M,N	Jasa Perusahaan	0.15	0.06	0.17	0.14	0.07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0.42	0.30	0.40	0.31	0.36
P	Jasa Pendidikan	0.50	0.42	0.83	0.79	0.41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.22	0.18	0.19	0.18	0.11
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.14	0.11	0.13	0.19	0.12
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.79	5.89	5.30	5.18	5.25

Lampiran Tabel 31.
PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,074.5	43,311.0	41,998.0	45,154.5	46,844.5
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	39,375.9	42,548.4	41,196.9	44,299.3	45,944.7
	a. Tanaman Pangan	3,397.4	3,453.3	3,454.1	3,878.8	3,904.7
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	260.4	282.0	265.8	285.9	291.5
	c. Perkebunan Semusim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4,975.9	5,634.2	6,155.8	6,592.5	6,796.4
	e. Perkebunan Tahunan	4.4	4.6	5.3	5.5	6.1
	f. Peternakan	29,967.3	32,347.2	30,488.8	32,682.6	34,067.8
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	770.5	827.1	827.2	854.0	878.3
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Perikanan	698.7	762.6	801.1	855.2	899.8
B	Pertambangan dan Penggalian	869.2	912.6	1,017.4	1,041.0	1,087.0
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	869.2	912.6	1,017.4	1,041.0	1,087.0
C	Industri Pengolahan	2,825,696.2	3,162,724.6	3,503,705.6	3,659,952.7	3,954,959.2
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara			0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas			0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1,470,766.9	1,709,793.3	1,938,840.9	2,028,045.2	2,221,396.8
	3 Pengolahan Tembakau	33,368.8	38,895.7	36,540.7	35,944.0	38,721.4
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	135,091.8	165,768.4	178,274.8	193,756.4	208,423.0
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	101,668.6	116,816.4	123,869.1	134,743.1	142,910.0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	11,122.5	11,796.0	11,811.5	12,077.2	12,090.5
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	65,791.6	70,357.6	79,210.4	83,205.0	91,017.3
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4,562.4	4,301.1	4,557.4	5,104.8	5,543.5
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	15,309.8	15,819.0	15,284.2	14,325.5	14,199.6
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	7,047.7	8,094.6	8,606.6	9,005.0	9,312.3
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	604,269.9	633,192.9	684,596.4	691,446.5	726,811.5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	316,374.2	322,943.7	355,834.5	382,482.6	411,020.1
	14 Industri Alat Angkutan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15 Industri Furnitur	25,898.9	26,798.9	26,305.7	26,981.5	28,441.9
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	34,423.0	38,146.9	39,973.5	42,835.9	45,071.2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36,436.5	34,920.0	41,416.1	48,055.5	57,415.1
	1 Ketenagalistrikan	36,227.4	34,694.3	41,173.3	47,813.8	57,157.4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	209.0	225.7	242.7	241.7	257.6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	31,958.4	34,604.5	39,433.3	42,035.3	43,862.7
F	Konstruksi	1,684,536.5	1,857,547.3	1,993,618.2	2,133,134.0	2,265,491.9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,465,195.8	1,622,198.4	1,773,124.2	1,923,298.6	2,130,471.8
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	356,971.5	404,582.3	446,139.0	486,831.5	541,359.8
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1,108,224.3	1,217,616.1	1,326,985.2	1,436,467.1	1,589,111.9
H	Transportasi dan Pergudangan	825,264.4	898,347.9	1,011,503.3	1,095,534.7	1,155,210.8
	1 Angkutan Rel	53,971.3	58,656.8	79,890.7	96,446.5	104,960.4
	2 Angkutan Darat	636,007.1	693,220.2	767,846.4	818,178.8	850,572.3
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	135,286.1	146,471.0	163,766.2	180,909.4	199,678.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,447,398.1	2,841,005.2	3,177,195.7	3,540,966.4	3,863,755.8
	1 Penyediaan Akomodasi	667,292.4	798,596.6	888,517.5	1,005,818.8	1,129,363.6
	2 Penyediaan Makan Minum	1,780,105.8	2,042,408.6	2,288,678.2	2,535,147.6	2,734,392.2
J	Informasi dan Komunikasi	2,585,689.5	2,658,361.7	2,671,115.1	2,767,355.9	2,999,250.3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,236,641.9	1,446,245.6	1,612,478.4	1,790,994.2	1,943,983.5
	1 Jasa Perantara Keuangan	748,200.4	920,811.4	1,038,975.8	1,174,140.0	1,265,872.2
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	181,515.7	191,523.8	213,675.8	226,695.4	245,380.8
	3 Jasa Keuangan Lainnya	302,199.0	328,952.3	354,266.1	384,333.2	426,514.4
	4 Jasa Penunjang Keuangan	4,726.8	4,958.1	5,560.7	5,825.6	6,216.1
L	Real Estate	1,929,863.5	2,077,702.6	2,304,808.7	2,496,071.1	2,664,981.3
M,N	Jasa Perusahaan	245,134.4	246,546.1	270,552.0	296,115.3	311,413.0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,914,362.1	2,160,769.5	2,408,848.6	2,682,897.3	2,927,107.9
P	Jasa Pendidikan	1,938,828.6	2,018,579.1	2,251,404.1	2,535,454.3	2,689,907.1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	775,467.0	831,318.6	903,928.4	1,016,645.1	1,085,552.8
R,S,T,U	Jasa lainnya	553,438.7	602,697.2	658,138.5	717,935.4	774,487.0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20,536,855.5	22,537,791.9	24,664,285.5	26,792,641.4	28,915,781.6

Lampiran Tabel 32.
PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,709.1	36,100.0	35,733.8	36,052.7	36,377.3
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	35,066.9	35,453.1	35,075.5	35,380.3	35,694.1
	a. Tanaman Pangan	3,163.1	3,165.9	3,119.4	3,166.7	3,183.3
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	231.9	234.2	232.7	235.8	235.2
	c. Perkebunan Semusim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4,639.1	4,725.1	4,761.3	4,716.7	4,704.5
	e. Perkebunan Tahunan	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
	f. Peternakan	26,298.5	26,588.5	26,226.3	26,524.7	26,823.0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	730.2	735.2	731.6	732.3	744.1
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Perikanan	642.2	647.0	658.3	672.4	683.2
B	Pertambangan dan Penggalian	837.1	839.0	850.0	851.2	856.1
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	837.1	839.0	850.0	851.2	856.1
C	Industri Pengolahan	2,630,976.6	2,813,952.7	2,943,904.5	2,996,573.4	3,123,936.8
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara			0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas			0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1,380,446.8	1,515,575.9	1,614,793.0	1,633,407.2	1,715,314.1
	3 Pengolahan Tembakau	27,072.6	27,429.3	22,827.9	21,646.2	22,309.4
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	114,305.4	128,688.5	134,580.7	142,673.0	150,254.5
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	88,581.9	94,675.5	95,294.4	103,412.9	107,428.8
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	10,479.5	10,817.4	10,576.4	10,410.3	10,236.8
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	63,915.7	64,838.9	67,248.8	68,700.6	71,937.8
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4,916.9	4,786.6	5,016.6	5,315.7	5,551.8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	13,883.8	13,771.4	12,821.8	11,796.7	11,282.8
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	6,643.3	7,155.8	7,253.2	7,066.1	7,088.7
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	566,949.3	592,985.5	604,042.1	601,150.8	621,437.2
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	296,561.9	293,377.0	311,670.4	333,074.6	342,510.2
	14 Industri Alat Angkutan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15 Industri Furnitur	24,792.1	25,150.5	23,971.7	23,293.0	24,064.5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	32,427.3	34,700.3	33,807.4	34,626.4	34,520.3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45,056.7	47,599.0	50,700.6	51,794.6	58,012.8
	1 Ketenagalistrikan	44,883.4	47,416.0	50,506.8	51,596.8	57,809.5
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	173.2	183.0	193.7	197.8	203.3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	30,166.8	30,712.0	31,963.4	32,797.8	33,527.3
F	Konstruksi	1,526,571.8	1,600,097.5	1,674,189.0	1,722,508.1	1,783,818.9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,326,260.7	1,407,238.6	1,480,894.1	1,569,644.8	1,656,673.7
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	322,298.5	340,394.6	364,016.1	373,699.6	395,400.4
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1,003,962.2	1,066,844.0	1,116,877.9	1,195,945.2	1,261,273.3
H	Transportasi dan Pergudangan	785,335.2	815,841.3	838,086.9	870,914.5	895,462.9
	1 Angkutan Rel	48,470.6	47,936.7	57,131.8	61,691.1	63,730.7
	2 Angkutan Darat	618,719.0	644,133.5	646,826.9	667,836.5	681,196.4
	3 Angkutan Laut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	118,145.5	123,771.1	134,128.2	141,386.9	150,535.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,183,269.6	2,320,365.4	2,444,064.8	2,589,749.8	2,740,135.5
	1 Penyediaan Akomodasi	585,034.6	635,310.9	662,200.6	714,829.4	771,995.5
	2 Penyediaan Makan Minum	1,598,235.0	1,685,054.6	1,781,864.2	1,874,920.4	1,968,140.0
J	Informasi dan Komunikasi	2,654,507.8	2,779,291.4	2,898,953.3	3,035,921.6	3,280,050.1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,077,853.5	1,196,258.9	1,273,749.8	1,374,111.3	1,446,289.8
	1 Jasa Perantara Keuangan	641,889.1	750,030.2	807,905.0	880,574.7	924,255.2
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	163,399.4	167,205.4	179,444.2	185,159.7	192,616.4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	268,467.3	274,958.1	282,049.0	303,891.0	324,786.5
	4 Jasa Penunjang Keuangan	4,097.8	4,065.2	4,351.7	4,485.9	4,631.6
L	Real Estate	1,782,655.3	1,848,546.3	1,972,048.8	2,074,601.9	2,167,878.8
M,N	Jasa Perusahaan	238,288.9	245,485.7	259,521.0	278,211.9	285,922.7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,729,732.9	1,813,729.6	1,914,203.7	2,021,480.1	2,139,889.8
P	Jasa Pendidikan	1,889,249.1	1,960,166.2	2,088,605.8	2,235,519.7	2,313,155.3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	721,038.9	766,206.6	818,611.5	879,118.7	920,126.8
R,S,T,U	Jasa lainnya	531,565.1	557,127.4	581,682.5	623,162.3	655,987.2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19,189,074.8	20,239,557.7	21,307,763.6	22,393,014.5	23,538,101.8

Lampiran Tabel 33.
Laju Pertumbuhan Pdrb Kota Yogyakarta Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.66	1.09	-1.01	0.89	0.90
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	0.62	1.10	-1.07	0.87	0.89
	a. Tanaman Pangan	0.75	0.09	-1.47	1.52	0.53
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.35	0.98	-0.64	1.32	-0.27
	c. Perkebunan Semusim					
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-0.82	1.86	0.76	-0.94	-0.26
	e. Perkebunan Tahunan	1.08	1.33	0.83	-1.41	0.55
	f. Peternakan	0.86	1.10	-1.36	1.14	1.12
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.74	0.68	-0.49	0.10	1.61
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu					
	3 Perikanan	2.63	0.75	1.76	2.14	1.60
B	Pertambangan dan Penggalian	0.70	0.23	1.31	0.14	0.58
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.70	0.23	1.31	0.14	0.58
C	Industri Pengolahan	-2.87	6.95	4.62	1.79	4.25
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-5.16	9.79	6.55	1.15	5.01
	3 Pengolahan Tembakau	-2.27	1.32	-16.78	-5.18	3.06
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.29	12.58	4.58	6.01	5.31
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5.35	6.88	0.65	8.52	3.88
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0.43	3.22	-2.23	-1.57	-1.67
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-2.82	1.44	3.72	2.16	4.71
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.57	-2.65	4.80	5.96	4.44
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-0.78	-0.81	-6.90	-7.99	-4.36
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	2.60	7.72	1.36	-2.58	0.32
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	-3.31	4.59	1.86	-0.48	3.37
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4.01	-1.07	6.24	6.87	2.83
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	-1.57	1.45	-4.69	-2.83	3.31
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	6.78	7.01	-2.57	2.42	-0.31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.32	5.64	6.52	2.16	12.01
	1 Ketenagalistrikan	10.34	5.64	6.52	2.16	12.04
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4.70	5.63	5.89	2.10	2.77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	3.16	1.81	4.07	2.61	2.22
F	Konstruksi	4.70	4.82	4.63	2.89	3.56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil da	6.32	6.11	5.23	5.99	5.54
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	8.43	5.61	6.94	2.66	5.81
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5.67	6.26	4.69	7.08	5.46
H	Transportasi dan Pergudangan	1.75	3.88	2.73	3.92	2.82
	1 Angkutan Rel	2.01	-1.10	19.18	7.98	3.31
	2 Angkutan Darat	1.01	4.11	0.42	3.25	2.00
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	5.67	4.76	8.37	5.41	6.47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.18	6.28	5.33	5.96	5.81
	1 Penyediaan Akomodasi	12.16	8.59	4.23	7.95	8.00
	2 Penyediaan Makan Minum	5.47	5.43	5.75	5.22	4.97
J	Informasi dan Komunikasi	10.89	4.70	4.31	4.72	8.04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.16	10.99	6.48	7.88	5.25
	1 Jasa Perantara Keuangan	3.55	16.85	7.72	8.99	4.96
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	2.98	2.33	7.32	3.19	4.03
	3 Jasa Keuangan Lainnya	6.48	2.42	2.58	7.74	6.88
	4 Jasa Penunjang Keuangan	-0.90	-0.79	7.05	3.08	3.25
L	Real Estate	7.39	3.70	6.68	5.20	4.50
M,N	Jasa Perusahaan	8.95	3.02	5.72	7.20	2.77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	7.27	4.86	5.54	5.60	5.86
P	Jasa Pendidikan	5.81	3.75	6.55	7.03	3.47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.08	6.26	6.84	7.39	4.66
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.33	4.81	4.41	7.13	5.27
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.40	5.47	5.28	5.09	5.11

Lampiran Tabel 34.
Distribusi Persentase PDRB Kota Yogyakarta Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.20	0.19	0.17	0.17	0.16
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertan	0.19	0.19	0.17	0.17	0.16
	a. Tanaman Pangan	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Perkebunan Semusim					
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	e. Perkebunan Tahunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f. Peternakan	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu					
	3 Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	13.76	14.03	14.21	13.66	13.68
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7.16	7.59	7.86	7.57	7.68
	3 Pengolahan Tembakau	0.16	0.17	0.15	0.13	0.13
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.66	0.74	0.72	0.72	0.72
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.50	0.52	0.50	0.50	0.49
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	2.94	2.81	2.78	2.58	2.51
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1.54	1.43	1.44	1.43	1.42
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pem	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.15	0.17	0.18	0.20
	1 Ketenagalistrikan	0.18	0.15	0.17	0.18	0.20
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15
F	Konstruksi	8.20	8.24	8.08	7.96	7.83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7.13	7.20	7.19	7.18	7.37
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	1.74	1.80	1.81	1.82	1.87
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5.40	5.40	5.38	5.36	5.50
H	Transportasi dan Pergudangan	4.02	3.99	4.10	4.09	4.00
	1 Angkutan Rel	0.26	0.26	0.32	0.36	0.36
	2 Angkutan Darat	3.10	3.08	3.11	3.05	2.94
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0.66	0.65	0.66	0.68	0.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.92	12.61	12.88	13.22	13.36
	1 Penyediaan Akomodasi	3.25	3.54	3.60	3.75	3.91
	2 Penyediaan Makan Minum	8.67	9.06	9.28	9.46	9.46
J	Informasi dan Komunikasi	12.59	11.80	10.83	10.33	10.37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.02	6.42	6.54	6.68	6.72
	1 Jasa Perantara Keuangan	3.64	4.09	4.21	4.38	4.38
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.88	0.85	0.87	0.85	0.85
	3 Jasa Keuangan Lainnya	1.47	1.46	1.44	1.43	1.48
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
L	Real Estate	9.40	9.22	9.34	9.32	9.22
M,N	Jasa Perusahaan	1.19	1.09	1.10	1.11	1.08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	9.32	9.59	9.77	10.01	10.12
P	Jasa Pendidikan	9.44	8.96	9.13	9.46	9.30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.78	3.69	3.66	3.79	3.75
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.69	2.67	2.67	2.68	2.68
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Lampiran Tabel 35.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kota Yogyakarta Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. Tanaman Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c. Perkebunan Semusim					
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e. Perkebunan Tahunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f. Peternakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu					
	3 Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	-0.43	0.95	0.64	0.25	0.57
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	-0.41	0.70	0.49	0.09	0.37
	3 Pengolahan Tembakau	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.01	0.07	0.03	0.04	0.03
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.02	0.03	0.00	0.04	0.02
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	-0.11	0.14	0.05	-0.01	0.09
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.06	-0.02	0.09	0.10	0.04
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03
	1 Ketenagalistrikan	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
F	Konstruksi	0.38	0.38	0.37	0.23	0.27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0.43	0.42	0.36	0.42	0.39
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0.14	0.09	0.12	0.05	0.10
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	0.30	0.33	0.25	0.37	0.29
H	Transportasi dan Pergudangan	0.07	0.16	0.11	0.15	0.11
	1 Angkutan Rel	0.01	0.00	0.05	0.02	0.01
	2 Angkutan Darat	0.03	0.13	0.01	0.10	0.06
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.80	0.71	0.61	0.68	0.67
	1 Penyediaan Akomodasi	0.35	0.26	0.13	0.25	0.26
	2 Penyediaan Makan Minum	0.46	0.45	0.48	0.44	0.42
J	Informasi dan Komunikasi	1.43	0.65	0.59	0.64	1.09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.24	0.62	0.38	0.47	0.32
	1 Jasa Perantara Keuangan	0.12	0.56	0.29	0.34	0.20
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.03	0.02	0.06	0.03	0.03
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.09	0.03	0.04	0.10	0.09
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	0.67	0.34	0.61	0.48	0.42
M,N	Jasa Perusahaan	0.11	0.04	0.07	0.09	0.03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0.64	0.44	0.50	0.50	0.53
P	Jasa Pendidikan	0.57	0.37	0.63	0.69	0.35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.30	0.24	0.26	0.28	0.18
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.15	0.13	0.12	0.19	0.15
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.40	5.47	5.28	5.09	5.11